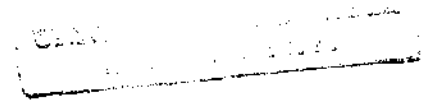


BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Pemikiran

Pada dasarnya *jam 'iyah* NU adalah *jam 'iyahnya* para ulama. Peranan ulama di dalam NU bukan sekedar pimpinan tertinggi, melainkan juga pengawas, pembimbing, pembina dan penegur apabila terjadi penyimpangan. Peranan seperti itu, tentu saja banyak berpengaruh dalam kebebasan berorganisasi yang telah diatur oleh Anggaran Dasar. Misalnya, dalam soal pemilihan Ketua Tanfidziyah yang seharusnya dipilih secara bebas oleh Muktamar, sedikit banyak akan terwarnai oleh otoritas ulama. Dengan kata lain, betapa pun hebatnya seorang calon pimpinan Tanfidziyah, tanpa legitimasi ulama, sulit diterima. (Anam, 1999:184).

Itulah kelemahan yang terjadi pada tubuh NU dulu jika dikaitkan dengan tuntutan masyarakat modern, di antaranya adalah: *Pertama*, faktor rekrutmen SDM NU dalam kepengurusan cenderung menitik beratkan pada aspek loyalitas dibandingkan aspek kapasitas dan profesionalisme, akibatnya kelembagaan tidak sanggup bersikap mandiri dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, apalagi bersikap kritis kepada tuntutan-tuntutan warganya, sehingga program kinerjanya hampir tidak dipahami secara pasti apa yang dibutuhkan umat dan apa problem prinsip yang kini sedang dihadapinya. *Kedua*, sifat ketergantungan lembaga kepada atas (*figure central*) tanpa berusaha secara mandiri dan bersifat proaktif untuk memahami kebutuhan bawah. (Fatah Yasin, *Duta Masyarakat, Kado untuk Pengurus Baru PWNU Jawa Timur*, 16 Oktober 2002, hal. 4).

Menurut Yasin, NU sekarang melalui Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, merekomendasikan bahwa program kerja NU harus berorientasi kepada terwujudnya kemandirian (baik secara jama'ah maupun jam'iyah) yang selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, manajemen kelembagaan NU Jatim yang selama ini bertumpu pada kekuatan *figure central* perlu melakukan kajian ulang terhadap dampak yang tidak konstruktif itu. Implikasinya, akan terjadi krisis kepemimpinan karena upaya proses pengkaderan yang berkualitas kurang berjalan efektif, juga akan dapat menimbulkan efek samping yang tidak kondusif terhadap upaya konsolidasi kebersamaan antar pengurus.

Program kerja NU yang berorientasi kepada terwujudnya kemandirian (baik secara jama'ah maupun jam'iyah) yang selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat ditunjukkan pada saat Mukhtar NU ke-30 tanggal 21-26 Nopember 1999 M (13-18 Sya'ban 1420 H) di Lirboyo, yakni saat terpilihnya pemimpin baru NU, yaitu Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004, yang tidak lagi mengutamakan nasab kiai.

Namun demikian, tidak sedikit orang yang masih meragukan kemampuan Hasyim menahkodai NU. (Aula, *Nakoda Baru*, 1999:14). Misalnya, saat menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU, beredar isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim. Seperti tidak adanya nasab kiai. Tetapi, isu-isu tersebut terbukti tidak cukup kuat mempengaruhi cabang-cabang dan wilayah untuk tetap memberikan dukungannya kepada Hasyim.

Terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai pemimpin baru NU dalam Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim bisa jadi merupakan kader NU yang langka. Disebut

langka, karena ia benar-benar aktif di NU sejak di ranting hingga menjadi Ketua Umum PBNU. Aktifitas ke-NU-an pria kelahiran Tuban 8 Agustus 1944 ini dimulai saat ia menjadi Ketua Ranting GP Ansor Bululawang Malang, Ketua Ancab GP Ansor Bululawang Malang, Ketua cabang GP Ansor Malang, Ketua PW GP Ansor Jatim, salah satu Ketua GP Ansor sampai menjadi Ketua PWNU Jatim.

Prestasi Hasyim Muzadi sebagai ketua PWNU Jatim 1992-1997 sebagai berikut: *Pertama*, berhasil secara signifikan menggerakkan kepengurusan NU Jatim hingga badan-badan otonomnya. Dan satu hal yang patut dicatat, pada pemilu 1999 lalu, Jatim menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional. bahkan Hasyim sukses dua kali memimpin NU Jatim. (Aula, 1999:29-30). *Kedua*, Hasyim Muzadi juga mampu membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan (*jamiyyah ijtimaiyyah diniyah*) yang mandiri dan sekaligus mampu memberikan pencerahan dalam pengelolaan organisasi secara profesional. (Baidlawi, 1999:xvii). Ini bisa dilihat, meningkatnya wawasan organisasi para pengurus dan kadernya, berikut kemampuan dalam melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, dalam bingkai semangat mengedepankan kebaikan umat (*mabadi' khaira ummah*). *Ketiga*, PWNU Jatim dibawah kepemimpinan Hasyim kinerjanya semakin baik dan memiliki karakteristik organisasi yang jelas. Dari aspek manajerial, PWNU Jatim dikelola lebih profesional. Kerja kejamiiyahan lebih diutamakan dan berusaha menghindari keterlibatan secara vulgar dengan dunia politik. Program Kerja organisasi tersusun rapi, dengan wawasan jauh ke depan. (Baidlawi, 1999:xxiii).

Melihat fenomena-fenomena di atas, studi dan kajian tentang NU sampai sekarang cukup menarik, karena masih langkanya perhatian yang serius para peneliti

yang melakukan studi khusus mengenai hal ini dan baru dua dasawarsa belakangan ini mulai tampak perhatian itu setelah tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid mengenai NU dipublikasikan (Haidar, 1998:xi).

Selain itu, studi tentang NU tetap menarik, karena warga NU pernah menjadi Presiden dan kini ada yang menjadi Wapres, karena itu NU yang akan terus mencetak pemimpin-pemimpin nasional. (Hasyim Muzadi, Kompas, *NU Telah Mencetak Presiden dan Wapres*, 5 Januari 2002).

Bahkan studi tentang NU sangat menarik dilakukan, karena munculnya generasi muda Islam (NU) telah mengelaborasi pemikiran-pemikiran liberal, dan post-tradisional dengan kiblat para pemikir-pemikir Muslim dan Kristen/Katolik. Apa yang terjadi di lingkungan Komunitas Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)-nya yakni Ulil Abshar Abdalla merupakan fenomena kelompok generasi yang sungguh mampu memberi warna dan situasi baru peta pemikiran keagamaan (baca: keislaman Indonesia) mutakhir. Liberalisme Islam menjadi mazhab baru pemikiran Islam Indonesia. (Kompas, *Membangun Generasi Pasca NU dan Muhammadiyah*, 26 Juli 2002). Termasuk baru-baru ini beberapa intelektual muslim yang berkultur Nahdlatul Ulama (NU) mendeklarasikan pendirian Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) dimotori oleh Masdar Farid Mas'udi, yang diharap bisa menghadirkan agama sebagai jalan menuju terciptanya perubahan pada arah realitas. Bukan hanya sebagai dokumen teologis belaka. (Duta Masyarakat, *Jaringan Islam Emansipatoris*, 1 Oktober 2002, hal. 12).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian studi tentang NU ini, terutama tentang: "*Terpilihnya Hasyim Muzadi Sebagai Ketua Umum PBNU 1999-*

2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim,” secara spesifik unik dan belum pernah diteliti, yakni suksesi Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi menitik beratkan pada prestasi dan profesionalisme seorang kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004.

1.2. Kajian Terdahulu Mengenai NU

Studi tentang NU sudah banyak dilakukan baik oleh akademisi, peneliti, pemerhati, intelektual, dan ilmuwan baik dalam maupun luar negeri. Adapun studi tentang NU yang pernah dilakukan adalah: (1) Penelitian **Choirul Anam (1999)** tentang “*Pertumbuhan dan Perkembangan NU*”, kajian ini membahas tentang: *Pertama*, masa pertumbuhan NU sebagai organisasi sosial keagamaan sebelum dan sesudah Muktamar pertama dan kedua, yakni: (a) Muktamar pertama, 14-16 Rabiul Awwal 1345 H (21-23 September 1926 M), di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, (b) Muktamar kedua, di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, pada 14-16 Rabiul Tsani 1346 H (9-11 Oktober 1927 M), (c) Muktamar ketiga, digelar pada 23-25 Rabiul Tsani 1347 H (28-30 September 1928 M) di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, (d) Muktamar keempat, di Semarang, Jawa Tengah, pada 12-15 Rabiul Tsani 1348 H (17-20 September 1929 M) di Hotel Arabistan Kampung Melayu, (e) Muktamar kelima, di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 13-16 Rabiul Tsani 1349 H (7-10 September 1930 M), (f) Muktamar keenam, di Cirebon, Jawa Barat, pada 12 Rabiul Tsani 1350 H (29 Agustus 1930 M), (g) Muktamar ketujuh, di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Rabiul Tsani 1351 H (9 Agustus 1932 M), (h) Muktamar kedelapan, yang berlangsung di Jakarta tidak lagi jatuh pada Rabiul Tsani,

tetapi 12 Muharram 1352 H (7 Mei 1933 M). Menurut Anam, perjalanan NU semenjak Mukhtamar pertama sampai kedelapan (1926-1933) merupakan masa perintisan. *Kedua*, masa perkembangan NU dimulai sejak Mukhtamar kesembilan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 21-26 April 1934. Ada beberapa sebab yang bisa dijadikan alasan memilih Mukhtamar Banyuwangi ini sebagai titik awal sejarah perkembangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, yakni: (a) karena Mukhtamar Banyuwangi inilah mulai diberlakukan mekanisme kerja baru; pemisahan sidang antara Syuriah dan Tanfidziyah di dalam Mukhtamar. Sejak itu Tanfidziyah mengadakan sidang sendiri dengan materi permasalahan sendiri pula. Dan begitu juga Syuriah, mengurus majelisnya sendiri dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama. (b) karena semenjak Mukhtamar Banyuwangi inilah tata cara persidangan mulai diperbaharui. Apabila pada beberapa kali Mukhtamar mulai Mukhtamar sebelumnya sidang cukup dilakukan dengan duduk melantai di atas tikar atau permadani sambil membawa tumpukan kitab-kitab mazhab, kebiasaan seperti itu tidak lagi dijumpai di Mukhtamar Banyuwangi. Bentuk persidangan sudah diatur rapi dan agak berbau formal, peserta sidang dipersilahkan duduk di kursi menghadap pimpinan sidang, (c) karena dalam Mukhtamar kesembilan mulai tampak peran-peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti misalnya, Mahfudz Shiddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid dan lain sebagainya. Lebih dari itu, titik berat aktivitas NU semenjak Mukhtamar Banyuwangi mulai tertuju kepada usaha melibatkan diri dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya. (2) Penelitian M. Ali Haidar (1998) tentang "*Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*", kajiannya tentang: dasar pemikiran NU untuk

menyikapi gejala-gejala sosial politik dengan pertimbangan beberapa kaidah fikih, yakni: (a) kaidah pertama ialah, *ma yudraku kulluh la yutraku kulluh* berarti kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya (bagian-bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan), (b) kaidah kedua ialah, *dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih* artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar, (c) kaidah ketiga ialah, memilih bahaya yang paling ringan akibatnya menurut kaidah *iza ta'arada mafsadatani ru'iy a'zamuha dararan bi irtika bi akhaffihima* artinya apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya. (3) Penelitian Mujamil Qamar (2002) berjudul "*NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*", fokus kajiannya tentang: tipe-tipe pemikiran cendekiawan NU ditinjau dari segi dinamikanya, adalah: (a) *Pola pikir antisipatif* ialah berpikir yang condong menanggapi sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Pola pikir ini mengakui perkembangan yang linier, baik yang terduga maupun tidak terduga. Tipologi pemikiran ini terdapat pada pemikiran Muhammad Tholchah Hasan, (b) *Pola pikir eklektik* adalah suatu pemikiran yang berusaha memilih semua yang dianggap terbaik tidak peduli dari aliran manapun, filsafat manapun, dan teori manapun, asal lebih baik daripada yang lain, itulah yang dipilih. Tipologi pemikiran ini terdapat pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Sahal Mahfudh, (c) *Pola pikir divergen* adalah berpikir yang menjelajah keluar dari cara-cara berpikir konvensional (seperti lazimnya). Pola pikir ini demikian sering diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid,

Said Agiel Siradj, dan Sjechul Hadi Permono, (d) *Pola pikir integralistik* adalah model berpikir yang berusaha menyatukan berbagai hal. Tipologi pemikiran ini terdapat pada pemikiran Ali Yafic, (e) *Pola pikir responsif* adalah berpikir yang condong memberikan jawaban terhadap problem-problem yang sedang dihadapi umat. Tipologi pemikiran ini terdapat pada pemikiran Achmad Siddiq dan Abdul Muchith Muzadi. (4) Penelitian **Moh. Mahbub (1998)** tentang "*Kiprah Politik NU Pasca Khittah Studi Hubungan NU Dengan Negara (Dalam Perspektif State and Civil Society)*", menyimpulkan ada 3 (tiga) hal yang diharapkan dari Muktamar Situbondo, yakni: (a) Reorientasi program, (b) Rekonsiliasi, (c) Regenerasi, kemudian, ada dua hal yang penting dalam pemulihan khittah itu ialah: (1) Ditegaskannya kembali peran ulama dalam kepemimpinan formal NU. Ditegaskan bahwa pengurus NU di semua tingkatan adalah pengurus syuriah, (2) Diputuskan bahwa NU sebagai sebuah organisasi tidak terikat dengan organisasi politik, setelah sekian lama dalam kiprah politik praktis, kini NU kembali keorientasi semula, yaitu memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan secara luas, meliputi segala aspek politik, sosial ekonomi, budaya dan agama. (5) Penelitian **Bahrul Ulum (2002)** dengan judul: "*Bodohnya NU*" apa "*NU Dibodohi*"? *Jejak langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, ia menyimpulkan, dalam memasuki babak baru perpolitikan nasional, NU mengalami 4 (empat) pergesceran orientasi dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yakni: (a) Dari peran Politik NU yang independen dan oposan menjadi partisan, (b) Dari peran Politik kerakyatan menjadi kekuasaan, (c) Dari wacana institusional menjadi wacana personal, (d) Dari peran-peran yang berorientasi jangka panjang ke peran jangka

pendek. Bila diamati secara mendalam, terjadinya perubahan orientasi politik NU, sedikitnya memiliki 3 (tiga) alasan, yakni: (a) Terbukanya kesempatan untuk mengekspresikan hak dan kecenderungannya untuk berpolitik. Hal ini dapat dipahami, di mana pada masa Orde Baru, kesempatan seperti ini nyaris tidak didapatkan, (b) kuatnya desakan dari warga NU sendiri, yang sudah lama merasa terpinggirkan dalam percaturan politik formal selama Orde Baru suara politik warga NU diperebutkan oleh ketiga kontestan pemilu (Golkar, PPP dan PDI), (c) Besarnya massa yang dimiliki NU (kira-kira 30 juta orang). Hal ini merupakan modal utama bagi eksistensi dan keutuhan sebuah parpol, (d) Naluri politik NU yang tidak pernah hilang. (6) Penelitian **Martin Van Bruinessen (1999)** tentang: "*NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*", kajian ini membahas 2 (dua) wacana penting di akhir 1980-an yakni: (a) NU dan Masalah Keagamaan, selama akhir 1980-an dan awal 1990-an, berbagai upaya serius dilakukan untuk mengembangkan sebuah wacana baru, untuk menerapkan dan memperluas cakupan penalaran fiqh tradisional ke wilayah-wilayah masalah yang baru, dan untuk membuat diskusi lebih sistematis dan relevan, (b) NU dan Problem Sosial-Ekonomi, selama 1980-an, yang ditekankan adalah upaya-upaya pengembangan masyarakat melalui pesantren dan berbagai usaha pengembangan ekonomi yang disponsori NU. (7) Penelitian **Kofifah Indar Parawansa (1990)** tentang: "*Perilaku Politik NU: Studi Tentang Keterlibatan NU dalam Partai Politik Tahun 1945-1984*", ia menyimpulkan bahwa Perilaku Politik NU sebagai berikut: (a) Perilaku politik NU dipengaruhi ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah, khususnya pada doktrin mengenai fiqh, (b) Meskipun perilaku politik NU selalu dilandasi nilai keagamaan yang diambil melalui penarikan hukum fiqh, akan

tetapi faktor kultur yang turut membentuk perilaku politiknya juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Terutama kultur keulamaannya yang begitu dominan mewarnai aktifitasnya, (c) Meskipun Ahlussunnah Wal Jamaah selalu dipakai sebagai landasan setiap aktifitas politiknya, akan tetapi dinamika politik NU ternyata mengalami fluktuasi (pasang surut). (8) Penelitian Moh. Adnan (2000) tentang: "*NU dan Civil Society: Kecemasan Faksi Kultural Generasi Muda NU Surabaya Terhadap Dinamika NU Pasca Mukhtar Ke-30 Di Lirboyo*", ia menyimpulkan bahwa relasi NU dan Civil Society selalu bongkar pasang, sangat tergantung dari situasi eksternal kebangsaan yang melingkupinya. Relasi bongkar pasang ini akan bisa menghambat demokratisasi, jika kelembagaan NU tidak konsisten dengan mandat awal, organisasi sosial keagamaan. Lewat momentum Mukhtarlah, NU menyatakan sikap dan mengambil posisi, akan berada di mana ia apakah pada elemen negara atau *Civil Society*. namun ternyata hasil Mukhtar Lirboyo, NU tetap mempertahankan khittah 1926, dengan demikian NU tetap menjadi gerakan *Civil Society (mutammadin)*, dengan memberikan kebebasan pada warganya untuk memberikan pilihan politiknya sesuai dengan pertimbangan rasional.

Dari penjelasan di atas, studi dan kajian tentang NU yang dilakukan para akademisi, peneliti, pemerhati, intelektual, dan ilmuwan baik dalam maupun luar negeri yang diketahui penulis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu Mengenai NU

No.	Nama	Tahun	Fokus Kajian	Judul
1.	Kofifah Indar Parawansa	1990	Politik	Perilaku Politik NU: Studi Tentang Keterlibatan NU dalam Partai Politik Tahun 1945-1984.
2.	M. Ali Haidar	1998	Fikih	Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik.
3.	Moh. Mahbub	1998	Politik	Kiprah Politik NU Pasca Khittah Studi Hubungan NU Dengan Negara (Dalam Perspektif State and Civil Society).
4.	Choirul Anam	1999	Sejarah NU.	Pertumbuhan dan Perkembangan NU.
5.	Martin Van Bruinessen	1999	Wacana Keagamaan dan Transformasi Sosial-Ekonomi NU '80-an	NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.
6.	Moh. Adnan	2000	NU dan Civil Society	NU dan Civil Society: Kecemasan Faksi Kultural Generasi Muda NU Surabaya Terhadap Dinamika NU Pasca Mukhtamar Ke-30 Di Lirboyo.
7.	Mujamil Qamar	2002	Dinamika Pemikiran NU	NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam.
8.	Bahrul Ulum	2002	Politik	"Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi"? Jejak langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik.
9.	Muhammad Shodiq	2003	Sukses kepemimpinan PBNU	Dinamika Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 (Studi Kasus Atas Terpilihnya KH. A. Hasyim Muzadi Pada Mukhtamar NU Ke-30 Pada Tanggal 21-26 Nopember 1999 di Lirboyo-Kediri-Jatim).

Berdasarkan studi-studi tentang NU di atas, ada lima catatan penting tentang studi NU tersebut. *Pertama*, fokus kajiannya hanya pada sejarah NU. *Kedua*, hanya memusatkan pada persoalan politik NU. *Ketiga*, terkonsentrasi hanya pada persoalan

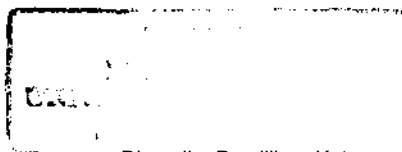
Fiqh NU. *Keempat*, memusatkan hanya pada persoalan sosial keagamaan NU. *Kelima*, fokus kajiannya hanya pada dinamika pemikiran NU.

Sedangkan studi dan kajian NU tentang suksesi kepemimpinan PBNU belum pernah ada. Oleh karena itu, studi ini mengisi ruang kosong, atau lebih tepat ruang masih tersedia untuk studi tentang NU. Salah satu aspek yang menarik dan belum pernah dijadikan fokus kajian ialah tentang: "*Terpilihnya Hasyim Muzadi Sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.*"

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Hasyim Muzadi sebagai fokus kajian karena didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, selama ini Ketua Umum PBNU sejak muktamar pertama sampai dengan muktamar keduapuluh sembilan selalu berasal dari kiai nasab, sedangkan peneliti memilih Hasyim Muzadi (baca: **Kiai Nasib**) dalam penelitian ini bukan termasuk **Kiai Nasab** atau **IGGI (Ikatan Gus-Gus Indonesia)**, sehingga beredar isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim Muzadi pada saat menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004, seperti tidak adanya nasab kiai. *Kedua*, studi dan kajian NU tentang suksesi kepemimpinan PBNU belum pernah ada.

1.3. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang pemikiran di atas, masalah yang hendak dijawab dari fokus penelitian ini adalah: Mengapa Hasyim Muzadi bukan nasab kiai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim?



1.4. Tujuan Penelitian

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah untuk *mendapatkan pengetahuan deskriptif-kualitatif* tentang: mengapa Hasyim Muzadi bukan nasab kiai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah aktifitas akademis, maka penelitian ini, jelas bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi masyarakat. Lebih dari itu, penulis tetap mempunyai cita-cita dan keinginan yang besar, agar penelitian ini bermanfaat dalam 4 (empat) relevansi, yaitu:

1. *Relevansi substansi*, yakni studi ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu-ilmu sosial bahwa telah terjadi pergeseran suksesi kepemimpinan PBNU 1999-2004 yang tidak lagi mementingkan nasab kiai, tetapi prestasi dan profesionalisme Ketua Umum PBNU lebih diutamakan.
2. *Relevansi sosial*, yaitu studi ini untuk memberikan kontribusi keilmuan dan kepastakaan bagi NU sebagai *jam'iyah* (organisasi) dan *jama'ah* (warga NU).
3. *Relevansi personal*, yaitu peneliti sangat tertarik dalam studi NU ini, terutama terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang tidak lagi mengutamakan nasab kiai, tetapi mengedepankan prestasi dan profesionalisme seorang Ketua Umum PBNU 1999-2004.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah yakni, Teori Interaksionisme Simbolik, Teori Konflik, Teori Strukturalis dan Teori Aksi.

2.1.1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini menekankan pada individu. Individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan analisis melalui interaksinya dengan individu lainnya. (Soeprpto, 2002:63).

Ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan dalam mengawali pembicaraan tentang interaksi simbolis ini. *Pertama*, interaksi simbolisme membawa makna bahwa teori ini menitikberatkan kemampuan manusia untuk menciptakan simbol-simbol dan mempergunakannya. *Kedua*, manusia mempergunakan simbol-simbol tertentu untuk berkomunikasi dengan manusia lain. *Ketiga*, dengan menginterpretasikan simbol-simbol yang diberikan oleh pihak lain seorang individu akan berperilaku tertentu sebagai tanggapan terhadap adanya simbol yang ia terima. (Zamroni, 1992:54-55).

Istilah teori interaksionisme simbolis berasal dari Herbert Blumer, yakni mempelajari bagaimana setiap individu berkembang secara sosial sebagai akibat dari partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa premis yang dikemukakan Blumer mengenai interaksi simbolik. *Pertama*, interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung

antar manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karenanya, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. *Kedua*, manusia itu memiliki “kedirian” (self). Ia dapat membuat dirinya sebagai objek dari tindakannya sendiri, atau ia bertindak menuju pada dirinya sendiri sebagaimana ia dapat bertindak menuju pada tindakan orang lain. Hal ini mendorong individu untuk membuat indikasi terhadap dirinya sendiri, adapun indikasi kedirian itu kita sebut dengan keseluruhan kesadaran. Kesadaran individu itu bertingkat-tingkat dari denyut jantung sampai kepada makna yang rumit, semuanya ini merupakan indikasi kedirian, dan kehidupan kesadaran manusia mengalir pada indikasi kedirian. Lebih jauh lagi, kedirian (self) dan bentuknya itu dijumpai oleh bahasa yang mendorong manusia untuk mengabstraksikan sesuatu yang berasal dari lingkungannya, dan memberikannya makna (membuatnya menjadi suatu objek). Objek itu bukan hanya merupakan rangsangan tetapi ia dibentuk oleh disposisi tindakan individu. Dengan pengertian semacam ini, maka manusia cenderung membangun dan memperbaharui tindakannya dan dunianya. (Zeitlin, 1998:331-332).

Menurut Blumer, sebagaimana yang dikutip Poloma (2000:258), bahwa interaksionisme-simbolis bertumpu pada tiga premis; yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi-sosial berlangsung.

Teori interaksionisme simbolis merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karena itu, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.

Dalam konteks itu, menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke mana arah tindakannya. Sebenarnya, interpretasi harus tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna-makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan. Blumer mengatakan individu bukan dikelilingi oleh lingkungan objek-objek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar ialah dia membentuk objek-objek itu.

Dalam pada itu, maka individu sebenarnya sedang merancang objek-objek yang berbeda, memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol.

Dengan begitu, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai *self-indication*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan

untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba “mengantisipasi” tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu.

Contoh: pertimbangan dari seorang wanita muda (yang sudah memiliki suami) untuk memenuhi acara atau ajakan makan malam atas rekan pria sekerjanya, selalu akan dikaitkan oleh si wanita tersebut pada pengalaman-pengalaman masa lalu, di mana sebelumnya ia bisa menilai dan memberikan makna (Wallace and Wolf, 1980; Poloma, 1984; Soeprapto, 2002).

2.1.2. Teori Konflik

Menurut Ramlan Surbakti (1999:149-152), istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Pada dasarnya pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan bukan hanya bagaimana suatu tatanan sosial terpelihara meskipun di dalamnya terdapat banyak kesenjangan, namun juga bagaimana struktur sosial mengalami perubahan. Pendekatan ini memandang masyarakat, organisasi dan berbagai sistem sosial lainnya sebagai ajang pertandingan perorangan dan kelompok kesesuaian kepentingan dan kerja sama tidak diabaikan, namun perhatian memang lebih diberikan pada karakter persaingan atau ketidaksesuaian. Pemaksaan/koersi dipandang sebagai cara utama bagi setiap orang untuk mencapai keinginannya. Di lain pihak diasumsikan pula

bahwa manusia pada umumnya tidak ingin didominasi atau dipaksa, sehingga setiap kali ada pemaksaan mereka akan berusaha melawan. (Kuper dan Kuper ,2000:155-156).

Menurut Dahrendorf, konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Maksud dan inti pemikiran Dahrendorf ini terkandung dalam 4 (empat) proposisi sebagai berikut: *Pertama*, setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terjadi di mana saja. *Kedua*, setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik; konflik sosial terdapat di mana saja. *Ketiga*, setiap unsur dalam satu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya. *Keempat*, setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota yang lain. (Lauer, 2001:281).

Ada 3 (tiga) jenis karakter pihak yang berkonflik, hakikat tujuan serta sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri. *Pertama*, pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kekompakannya. Pada titik ekstrim yang satu, kita melihat pemerintah, serikat buruh dan berbagai entitas lainnya yang memiliki peraturan keanggotaan dan pedoman tindakan yang ketat. Sedangkan pada titik ekstrim lainnya kita melihat entitas-entitas longgar yang bersifat abstrak seperti kelas sosial atau pendukung ideologi tertentu yang kohesivitasnya sulit dilihat ataupun dibuktikan. Hampir setiap konflik sosial melibatkan banyak pihak yang antara satu sama lain terkadang tumpang-tindih. *Kedua*, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan, dan tujuan itu sendiri juga bervariasi mulai dari

penguasaan tanah, perebutan uang, atau sekedar pertikaian atas hal-hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak-pihak tertentu. Konflik yang terjadi karena memperebutkan sesuatu yang mengandung materi disebut sebagai konflik konsensual, sedangkan memperebutkan sesuatu yang mengandung nilai disebut sebagai konflik dissensual. Hampir setiap konflik bisa disebut konflik konsensual sekaligus dissensual, karena setiap tujuan atau kepentingan yang terlibat di dalamnya memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap pihak yang terlibat, mulai dari hal-hal yang menyangkut kepentingan remeh sampai dengan hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia. *Ketiga*, konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara itu sendiri sangat bervariasi mulai dari pemaksaan terang-terangan, ancaman, sampai dengan bujukan (misalnya bujukan dari partai-partai politik dalam pemilihan umum). (Kuper dan Kuper, 2000: 156-157).

Sedangkan jenis-jenis konflik ada 6 (enam) yaitu:

1. Konflik ideologis ialah konflik terwujud di dalam bentuk perbedaan-perbedaan pengertian dasar di antara berbagai-bagai golongan masyarakat mengenai berbagai macam hal atau konflik antara sistem-nilai yang dianut oleh serta menjadi ideologi dari berbagai-bagai kesatuan sosial. (Nasikun, 2003:63 dan 69).
2. Konflik politis ialah konflik terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya di dalam masyarakat. (Nasikun, 2003:63).
3. Konflik Laten ialah kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu. (Johnson, 1986:186).

4. Konflik manifest ialah kepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan. (Johnson, 1986:186).
5. Konflik realistik ialah alat untuk suatu tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. (Johnson, 1986:202).
6. Konflik non-realistik ialah ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri. (Johnson, 1986:202).

Teori konflik memiliki beberapa asumsi antara lain: *Pertama*, manusia sebagai makhluk hidup memiliki sejumlah kepentingan paling dasar yang mereka inginkan dan mereka berusaha untuk mendapatkan kepentingan tersebut. *Kedua*, kekuasaan mendapatkan penekanan sebagai pusat hubungan sosial. Kekuasaan bukan hanya merupakan sesuatu yang langka, dan tidak terbagi secara merata, sehingga merupakan sumber konflik, tetapi juga pada hakekatnya kekuatan itu bersifat pemaksaan. *Ketiga*, ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai suatu senjata yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, dan mungkin bertentangan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Ideologi dan nilai sama sekali bukan merupakan sarana untuk mencapai integrasi dan mengembangkan identitas suatu bangsa. (Zamroni, 1992:30).

Ada beberapa pendapat yang dijelaskan teori konflik. *Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. *Kedua*, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam

masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. (Ritzer, 1992:30-31).

Ralp Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. *Pertama*, kelompok semu (*quasi group*) yaitu kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. *Kedua*, kelompok kepentingan (*interest group*) yaitu terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. (Ritzer, 1992:32-33).

2.1.3. Teori Struktural-Fungsional

Beberapa tokoh utama pengembang dan pendukung teori struktural fungsional pada zaman modern ini bisa disebut antara lain Talcott Parsons, Robert K. Merton dan Neil Smelser.

Menurut teori struktural-fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Lembaga keagamaan berfungsi membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan penuh pengabdian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Lembaga ekonomi memiliki fungsi untuk

mengatur proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Lembaga keluarga berfungsi menjaga keberlangsungan perkembangan jumlah penduduk. Kesemua lembaga yang ada di masyarakat akan senantiasa saling berinteraksi dan satu sama lain akan melaksanakan penyesuaian sehingga di masyarakat akan senantiasa berada pada keseimbangan. (Zamroni, 1992:25-26).

Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya, dapat kita kaji melalui sejumlah anggapan dasar mereka sebagai berikut:

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
3. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan- penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial

pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berpose ke arah itu.

5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
6. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional.; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
7. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan *fungsionalisme struktural*, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian warga besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri. (Nasikun, mengutip Pierre L. Van Den Berghe, 2003:10-12).

Talcott Parsons berhasil mengurai lebih lanjut konsep rasional barat (yang berisi *system of values*) pada dua tingkat, yaitu **tataran individual** (*The Structure of Social Action*) dan **tataran kelembagaan**. (Salim, 2002:100-105). Dalam kerangka berpikirnya, setiap *actor* (pelaku) sosial akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*goal*) dengan memakai alternatif-alternatif kegiatan yang telah dipikirkannya melalui penggunaan alat (*mean*) yang terpilih.

Pada tataran individual, pandangan tentang nilai dan norma sebetulnya merupakan hasil pengendapan dari cara berpikir masa lampau. Dengan demikian tidak harus cocok atau sesuai dengan masa kini, karena situasi dan kondisinya memang berbeda. Dalam proses pengambilan keputusan nilai dan norma individual harus cocok dengan tindakan yang hendak diambil.

Pilihan bertindak dengan demikian harus mampu dijalankan dengan kesadaran yang mandiri. Artinya semua tindakan yang dipilih harus sesuai dengan kesadarannya sendiri. Orang barat yang rasional dikenal sebagai '*modernity*', yaitu memiliki orientasi berpikir pada future, bersifat universalistik (humanistik), impersonal dan patuh serta tunduk kepada hukum (*equality before law*).

Pada tataran kelembagaan, Talcott Parsons berpendapat bahwa semua lembaga yang ada pada hakikatnya adalah suatu sistem dan setiap lembaga akan menjalankan 4 fungsi dasar yang disebut A-G-I-I. berasal dari empat konsep utama yaitu: ***Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latent Pattern Maintenance***. (Salim, 2002:101-105, Johnson, 1986:130-131).

1. Adaptation

Menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Ada dua dimensi permasalahan yang dapat kita bedakan. *Pertama*, harus ada “suatu penyesuaian dari sistem itu terhadap ‘tuntutan kenyataan’ yang keras yang tidak dapat diubah”. *Kedua*, ada proses “transformasi aktif dari situasi itu”. Ini meliputi penggunaan segi-segi situasi itu yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, usaha memperoleh alat itu secara analitis harus dipisahkan dari pencapaian tujuan. Lingkungan, meliputi yang fisik dan yang sosial. Untuk suatu kelompok kecil, lingkungan sosial akan terdiri dari satuan institusional yang lebih besar di mana kelompok itu berada. (Dalam studi Bales mengenai kelompok kecil, lingkungan itu adalah lingkungan akademis). Untuk sistem-sistem yang lebih besar, seperti misalnya masyarakat keseluruhan, lingkungan akan meliputi sistem-sistem sosial lainnya (misalnya, masyarakat lain) dan lingkungan fisik.

2. Goal Attainment

Merupakan persyaratan fungsional yang muncul dari pandangan Parsons bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya. Namun, perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Dalam salah satu dari kedua hal itu, pencapaian tujuan merupakan sejenis kulminasi tindakan yang secara intrinsik memuaskan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian persiapan. Menurut skema alat-tujuan (*means-end schema*), pencapaian maksud ini adalah *tujuannya*, sedangkan kegiatan penyesuaian yang sudah terjadi sebelumnya merupakan *alat* untuk merealisasi tujuan ini. Pada tingkat individu dan sistem sosial ada pelbagai tujuan yang diinginkan. Jadi

persyaratan fungsional untuk mencapai tujuan akan harus meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan prioritas dari sekian banyak tujuan.

3. Integration

Merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dalam sistem sosial itu. Supaya sistem sosial itu berfungsi secara efektif sebagai satu satuan, harus ada paling kurang suatu tingkat solidaritas di antara individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup, yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan. Ikatan-ikatan emosional ini tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Kalau tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata-mata.

4. Latent Pattern Maintenance

Konsep latensi (*latency*) menunjukkan pada berhentinya interaksi. Para anggota dalam sistem sosial apa saja bisa letih dan jenuh serta tunduk pada sistem sosial lainnya di mana mungkin mereka terlibat. Karena itu, semua sistem sosial harus berjaga-jaga bilamana sistem itu sewaktu-waktu kocar-kacir dan para anggotanya tidak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota sistem. Dalam studi kelompok kecil Bales, saat yang dimaksudkan adalah waktu antara pertemuan. Tetapi selama periode ini komitmen para anggota pada sistem itu harus tetap utuh sehingga pada waktu yang tepat peran-peran sistem dapat diaktifkan kembali dan interaksi sistem diteruskan. Dalam beberapa hal, mekanisme tertentu dapat dikembangkan untuk

membantu memulihkan dorongan motivasional dan untuk membarui atau memperkuat komitmen terhadap pola-pola budayanya. Untuk sistem yang besar, seperti masyarakat keseluruhan, hal ini dapat dilihat dalam bentuk ritual bersama (misalnya perayaan hari raya). Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat dilihat sebagai pernyataan simbolis dari para anggotanya untuk terus mengikat dirinya dengan sistem itu.

Dalam membahas struktur sosial, dikenal dua konsep penting: status (*status*) dan peran (*role*). Definisi Ralph Linton mengenai kedua konsep tersebut adalah sebagai berikut: suatu status (*status*) ialah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan suatu peran (*role*) ialah manakala seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. (Sunarto, 2000:54-55).

Tipologi lain tentang struktur sosial yang dipopulerkan Linton ialah pembagian status menjadi status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*). Pertama, status yang diperoleh (*ascribed status*) ialah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawa sejak lahir. Status yang termasuk dalam kategori ini ialah usia (misalnya, anak, orang dewasa, manusia lanjut), jenis kelamin (setiap masyarakat menetapkan kegiatan dan sikap berbeda bagi laki-laki dan perempuan), hubungan kekerabatan, dan kelahiran dalam suatu kelompok khusus seperti kasta atau kelas dan sebagian besar status dalam semua sistem sosial termasuk dalam kategori ini. Kedua, status yang diraih ialah status yang memerlukan kualitas tertentu dan tidak diberikan kepada individu sejak lahir melainkan harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi.

2.1.4. Teori Aksi

Teori ini mengikuti karya Weber. Adapun asumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons sebagai berikut: *Pertama*, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. *Kedua*, sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. *Ketiga*, dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. *Keempat*, kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya. *Kelima*, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya. *Keenam*, ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. *Ketujuh*, studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*). (Ritzer, 1992:53-54).

Menurut Doyle Paul Johnson (1986:114 dan 116), mengutip Parsons dan Shils dalam buku *Toward A General Theory of Action* meliputi pengembangan pelbagai kategori dan sistem klasifikasi untuk menganalisa orientasi subjektif individu. Dalam kerangka umum ini, variable-variabel berpola itu memperlihatkan lima pilihan dikotomi yang harus diambil seorang, secara eksplisit atau implisit, dalam menghadapi orang lain dalam situasi sosial apa saja.

1. Afektifitas versus netralitas afektif

Ini merupakan dilema mengenai apakah mencari atau mengharapkan kepuasan emosional dari orang lain atau tidak, dalam situasi sosial. Pilihan yang jatuh ke afektifitas akan berarti bahwa orang-orang yang terlibat itu akan berhubungan satu sama lain secara emosional (senang satu sama lain), dan saling memberikan kepuasan secara langsung. Sebaliknya, memilih netralitas afektif berarti bahwa orang itu menghindari keterlibatan emosional atau pemuasan yang langsung.

2. Orientasi-diri (*self-orientation*) versus orientasi kolektivitas.

Dilema ini berhubungan dengan kepentingan yang harus diutamakan. Orientasi-diri akan berarti bahwa kepentingan pribadi orang itu sendirilah yang mendapat prioritas, sedangkan orientasi kolektif akan berarti bahwa kepentingan orang lain atau kolektivitas secara keseluruhan yang harus diprioritaskan. Artinya, dimensi moral kolektiflah yang diutamakan. Sebagai ilustrasi, hubungan dagang diharapkan berjalan menurut kepentingan pribadi dari mereka yang terlibat. Sebaliknya, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan dalam suatu kongregasi diharapkan berjalan menurut nilai-nilai moral bersama yang mungkin menuntut pengorbanan kepentingan individu.

3. Universalisme versus partikularisme

Dilema ini berhubungan dengan ruang lingkup dari standar-standar normatif yang mengatur suatu hubungan sosial. Pola universalistik mencakup standar-standar yang diterapkan untuk semua orang lain yang dapat diklasifikasikan bersama menurut kategori-kategori yang sudah dibatasi secara impersonal. Sebaliknya, pola partikularistik mencakup standar-standar yang didasarkan pada suatu hubungan

tertentu (*particular*) di antara mereka yang berinteraksi atau didasarkan pada sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kedua pihak. Secara implisit, dikotomi ada dalam analisa perbandingan Weber mengenai agama. Suatu agama universalistik adalah agama yang berusaha mempersatukan semua orang tanpa memandang perbedaan rasial, bangsa, dan lain-lain ke dalam satu komunitas moral; sebaliknya, Suatu agama partikularistik, misalnya agama, suku, bangsa, hanya mempersatukan anggota suatu komunitas atau masyarakat tertentu, dan menggunakan standar-standar normatif yang berbeda untuk orang dalam dan orang luar.

Parsons berusaha menunjukkan bahwa dikotomi ini memperlihatkan dilema apakah prioritas diberikan ke standar kognitif atau standar apresiatif. Pola universalistik muncul karena mengutamakan standar kognitif di atas standar apresiatif, karena standar kognitif, menurut hakikatnya, bebas dari hubungan-hubungan tertentu. Sebaliknya, hubungan partikularistik muncul karena mengutamakan standar apresiatif, karena di dalamnya ada suatu ikatan katektik yang mempersatukan mereka dengan suatu ikatan tertentu.

4. Askripsi versus prestasi (*achievement*)

Parsons melihat variabel ini (dan yang berikutnya) berbeda dengan ketiga variabel sebelumnya dalam hal di mana yang diperhatikan adalah persepsi orang yang bertindak atau klasifikasi orang lain, dan bukan orientasi pribadinya. Intinya, orang lain dapat dilihat dan dinilai menurut *siapa mereka* atau *apa yang mereka buat*. Dalam askripsi, orang lain diperlakukan menurut kualitas dan sifatnya yang khusus, yang membatasi keterlibatannya dalam suatu hubungan sosial. Sebaliknya, pola prestasi menekankan pada penampilan atau kemampuan yang nyata.

5. Spesifitas versus kekaburan (*diffuseness*)

Pada dasarnya, variabel ini berhubungan dengan ruang lingkup keterlibatan seseorang dengan orang lainnya. Dalam suatu hubungan yang spesifik, kewajiban untuk membenarkan tuntutan itu; sedangkan dalam hubungan yang ditandai oleh kekaburan, kewajiban untuk membuktikan akan ada pada orang kepada siapa tuntutan dijatuhkan untuk menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak terpenuhi.

Keempat teori tersebut, yakni teori interaksionisme simbolik, teori konflik, teori strukturalis dan teori aksi digunakan penulis untuk mendeskripsikan terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim 21-26 Nopember 1999.

2.2. Nahdlatul Ulama (NU)

Sebagaimana yang ditulis para akademisi, peneliti, pemerhati, intelektual, dan ilmuwan baik dalam maupun luar negeri tentang NU, demikian juga yang terdapat dalam Anggaran Dasar (AD) Nahdlatul Ulama Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: *Jam'iyah* ini bernama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, untuk waktu yang tak terbatas. (Hayat dkk., 2002:79).

Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama adalah kondisi transisi dari keterpurukan umat menuju kepada penyadaran pemahaman keagamaan mengalami puncaknya pada 20-an. Pada tahun 1924, Makkah ditaklukkan oleh Abd al-Aziz ibn Sa'ud yang beraliran Wahabi. Karena itu maka kala itu menjadi trend reformasi ajaran Islam dengan menekankan wawasan Islam sebagai falsafah hidup berdasarkan

Al-Qur'an dan Hadits. Ibn Sa'ud ketika berkuasa dengan mengalahkan Raja Hijaz (Makkah), Syarief Husein, dan putranya pada tahun 1924, tersebarlah berita bahwa para penguasa baru ini akan menghilangkan mazhab yang ada. Dan untuk mengambil alih komando umat, maka Ibn Sa'ud merencanakan menggelar Mukhtamar Khilafiah sebagai ganti Daulah Usmaniyah. Kala itu, seluruh negara Islam diundang melalui perwakilannya, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan direkomendasi adalah HOS Cjokroaminoto (Syarikat Islam), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah), serta KH. Wahab Hasbullah (pesantren). Namun karena tidak mewakili organisasi permanen, maka nama KH. Wahab Hasbullah dicoret. Peristiwa ini menyisakan sakit hati bagi kalangan pesantren karena tidak ada lagi yang dapat dititipi keberatan akan tindakan pemerintahan Ibn Sa'ud. Kalangan pesantren sangat tidak terima dengan rencana pengusaha Makkah kala itu yang anti kebebasan bermazhab, pembumihangusan makam para ulama, kegiatan membaca kitab barzanji dan sebagainya.

Karena kekecewaan yang tidak terbingga kepada kalangan modernis di tanah air serta faktor luar negeri, Maka, para ulama pesantren membentuk Komite Hijaz (panitia aksi untuk menanggulangi tindakan-tindakan pengusaha Hijaz), serta mengirimkan sendiri delegasi menghadap Raja Ibn Sa'ud.

Bagi para kiai pengasuh pondok pesantren, pembaruan adalah sebuah keharusan. Seperti diketahui, KH. Hasyim Asy'ari tidak mempersoalkan dan menerima gagasan dari Muhammad Abduh untuk menghimbau umat agar kembali kepada Islam. Namun KH. Hasyim Asy'ari tidak dapat menerima pemikiran Muhammad Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterkaitannya dengan *madzhab*.

Namun karena ide pembaruan yang dikemukakan kalangan modernis dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan, bahkan membodoh-bodohkan dan membutatulkan ulama pesantren, maka kiai pesantren menolaknya. Sehingga, bukan substansi dari pembaruan yang ditolak para kiai, tapi pandangan bahwa ulama pesantren sebagai kelompok yang rendah kualitas intelektualnya sehingga menyinggung wibawa ulama pengasuh lembaga pendidikan Islam tertua itu. Bagi NU pembaruan adalah keharusan dengan tanpa harus menghilangkan khazanah keilmuan yang telah ada.

Dan untuk di NU, barangkali orang-orang semacam *Almaghfirullah* Kiai Haji Achmad Siddiq, Kiai Haji Abdul Muchit Muzadi, Kiai Haji MA. Sahal Mahfudz, Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqiel Siradj, dan Masdar F. Mas'udi adalah diantara para pembaharu NU tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena dari pemikiran merekalah, para *nahdliyin* dapat menemukan pencerahan pemikiran utamanya dalam masalah keagamaan.

Tampilnya tokoh-tokoh dari generasi muda seperti Ulil Abshar Abdalla, Jadul Maula, Zuhairi Misrawi serta generasi seangkatan dengan mereka adalah buah dari progresifitas pemikiran para tokoh NU tersebut. (Aula, 2003:16-17).

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi *jam'iyah* (organisasi massa) lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam *Ahlus Sunnah Waljama'ah*. Aliran pemikiran Islam *Ahlus Sunnah Waljama'ah* di bidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *ta'awun* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama

(NU) untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak pada ekstrim kiri dan kanan yang secara fundamentalis sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Responsif yang akseleratif, akurat, dan objektif atas kompleksitas problema empirik masyarakat bangsa tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran kiai (ulama) semata, sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga profesional muda yang terampil, visible dan kapabel dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual sistematis dan organis. Di sinilah pendirian sebuah organisasi yang independen dan otonom Nahdlatul Ulama (NU) menemukan pikiran urgensitasnya. (<http://www.ngo.or.id/lakpesdam/profil.htm>).

Doktrin *Ahlus Sunnah Waljama'ah* (baca: ASWAJA) melandasi seluruh gerak dan sikap NU. Manusia dalam kehidupan sosialnya tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan, apakah ia berkuasa atau dikuasai. Doktrin ASWAJA yang merupakan interpretasi dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mempunyai pandangan tersendiri tentang kekuasaan dan kepemimpinan. NU sebagai referensi dari doktrin ASWAJA mempunyai sikap yang jelas terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, baik di saat mereka berkuasa dan memimpin, maupun di saat mereka di kuasai dan dipimpin. (<http://members.tripod.com/aljawad/buletinew/edisi ke 11.htm>).

Selain itu, Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi telah berusia 76 tahun, namun sebetulnya usia NU dari tradisi telah ada jauh sebelum itu. Dengan kata lain, banyak suka dan duka telah dilalui sehingga tidak sedikit juga pelajaran yang bisa dipetik. Dari perjalanan panjang tersebut, minimal NU telah mengalami 3 (tiga) fase

yakni fase NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang menitikberatkan gerakannya pada aspek sosial keagamaan. Kemudian fase NU politik karena NU menempatkan dirinya sebagai partai politik atau bergabung ke dalam partai politik, seperti Partai NU dan Masyumi. Dan terakhir, adalah fase NU kultural, kata Mabroer MS (Duta Masyarakat, *Revivalisme Nahdlatul Ulama ke Depan*, 12 Oktober 2002, hal.4).

Dengan usianya yang lebih tua dibandingkan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan sudah banyak makan asam garam dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berbasis sangat luas dengan pengikutnya yang berjumlah besar, telah mencatatkan diri dalam pentas sejarah Nasional. Tidak sedikit kontribusi yang diberikan oleh organisasi para kiai ini; mulai dari merebut kemerdekaan, mempertahankannya, kemudian langkah metamorfosisnya menjadi partai politik dan kemudian *khittah* 1926 (kembali pada misi didirikannya organisasi NU) (Moesa, 2002:v).

Menurut M. Saekhan Muchith (Duta Masyarakat, *Mempertanyakan Profesionalisme NU*, 11 Oktober 2002, hal. 4), bahwa Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia pantas dikatakan organisasi massa (ormas) terbesar, dengan jumlah pengikut (massa) sekitar 42 juta jiwa dan tersebar hampir secara merata di seluruh Indonesia. Karena pusat kelahirannya di Jawa Timur maka Propinsi Jawa Timur yang nota benanya ibu kota kedua setelah Jakarta, menjadi basis utama pengikut NU (warga *nahdliyin*) paling mayoritas dibanding propinsi lainnya di Indonesia. Memang, NU mempunyai basis wilayah dan pengaruh luas dan menghimpun

keanggotaan cukup mengesankan, kata Iqbal Abdurraut Saimima (*Pesantren, Perti, Mendayung antara Tradisionalisme dan Modernisme*, No. 3/Vol.V/1988, hal.78).

Menurut sebagian orang, NU identik organisasi massa (ormas) terbesar, dengan notabene pengikut (massa) mayoritas di pedesaan, maka tidak heran apabila orang mengatakan bahwa *jama'ah* (warga) NU itu “ndesoni”, “kolof”, “konservatif”, “normatif”.

Bahkan pada kadar tertentu pula, sebagaimana sering dilekatkan oleh para pengamat, apabila disebut sebagai oportunis dalam ekspresi politiknya. Lepas dari realitas subjektif dan objektif yang demikian, yang nyata dalam konfigurasi kelompok strategis negeri ini, NU merupakan organisasi yang cukup memainkan peran penting, terutama dilihat dari potensi yang tersembunyi di balik basis massanya yang tersebar merata di kawasan periferial secara ekonomi-politik dan secara kultural berbudaya agraris, kata K.H. Dharwis (<http://www.kmnu.org/pustaka/buku3/antar.txt> Yogyakarta, November 1994).

Oleh karena itu, sudah saatnya tokoh-tokoh NU yang tidak terjun dalam persoalan politik untuk memikirkan masalah reformasi di tubuh NU yakni: *pertama*, soal metode fatwa NU. Munas NU di Lampung tahun 1992 telah menghasilkan keputusan mengenai “Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kini NU sudah membuka diri untuk bermazhab *manhaji* (metode), menempuh prosedur *istinbath jama'i* (dengan menggunakan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyah* secara kolektif) dan menggunakan faktor-faktor ekonomi, budaya, politik dan sosial sebagai salah satu pisau analisis dengan menggunakan fatwa. Tujuh tahun sudah metode baru ini berlalu. Namun sayangnya,

metode tersebut belum pernah dijalankan oleh ulama NU. *Kedua*, sosialisasi hasil fatwa NU. Buku kumpulan fatwa NU (sejak muktamar 1926) dicetak dengan kualitas kertas yang tidak memadai. Belum lagi dari sudut penggunaan bahasa Indonesia yang penuh dengan *uslub* (struktur kalimat) yang sangat berbau “kitab kuning” sehingga tidak mudah dimengerti oleh kalangan awam. Penjelasan tambahan dalam bentuk catatan kaki tampaknya diperlukan agar para peneliti ataupun orang awam dapat memahami istilah-istilah rumit ataupun konteks sosial ketika fatwa itu dikeluarkan. (<http://buletin.hypermart.net/edisi6/kritik.htm>).

Jika kedua masalah reformasi di tubuh NU itu bisa dibahas dan dihasilkan oleh PBNU maka akan ada perubahan besar di tubuh NU. Perubahan besar yang dimaksud adalah perubahan kurikulum pesantren dalam rangka mencetak kader ulama NU yang siap berfatwa dengan metode baru di atas. Perubahan besar juga dapat lahir dengan adanya usaha melakukan revisi terhadap fatwa ulama NU yang lalu, yang boleh jadi sudah tidak cocok lagi dengan perubahan sosial yang ada.

2.3. Kepemimpinan NU

Kepemimpinan NU yang dimaksud dalam penelitian ini, menekankan pada struktur organisasi Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana yang dijelaskan pada AD (Anggaran Dasar) Nahdlatul Ulama (Hasil-hasil Muktamar XXX NU, 2000:110), pada Bab VI Pasal 9 tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:

- a. Pengurus Besar
- b. Pengurus Wilayah

- c. Pengurus Cabang
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang
- e. Pengurus Ranting

Demikian juga dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Nahdlatul Ulama (Hasil-hasil Mukhtamar XXX NU, 2000:125), pada Bab IV Pasal 8 tentang tingkat kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Pusat
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi
- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif; dan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di Luar Negeri.
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan
- e. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Desa/Kelurahan

Melihat AD dan ART (Anggaran Rumah Tangga) Nahdlatul Ulama tersebut, maka dalam penelitian ini, kepemimpinan NU difokuskan lagi kepada Pengurus Besar (PB) untuk tingkat pusat yakni kepemimpinan PBNU yang terpilih hasil Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim pada 21-26 Nopember 1999 M (13-18 Sya'ban 1420 H) yakni saat terpilihnya pemimpin baru NU, yaitu Hasyim Muzadi sebagai Ketua PBNU 1999-2004.

Dan agar kepemimpinan NU dalam penelitian ini lebih fokus, maka penekanannya pada Hasyim Muzadi yang terpilih sebagai Ketua PBNU 1999-2004.

Alasan penulis, karena terpilihnya Hasyim Muzadi pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri pada 21-26 Nopember 1999 M (13-18 Sya'ban 1420 H), sangat unik dan menarik untuk diteliti yakni saat menjelang pemilihan Ketua PBNU 1999-

2004, beredar isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim Muzadi, yakni tidak adanya nasab kiai. Tetapi, isu-isu tersebut terbukti tidak cukup kuat mempengaruhi cabang-cabang dan wilayah untuk tetap memberikan dukungannya kepada Hasyim Muzadi.

Terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua PBNU 1999-2004 merupakan prestasi luar biasa di NU, karena tidak lagi mempermasalahkan nasab kiai. Evendhy M. Siregar (1989:135-175), menjelaskan tentang munculnya sang pemimpin sebagai berikut:

a) Faktor munculnya pemimpin yaitu:

1. **Faktor bakat** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena bakat yang dimilikinya sejak lahir.
2. **Faktor keturunan** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena faktor keturunan (tradisional).
3. **Faktor karena dipilih** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena dipilih secara konstitusional.
4. **Faktor situasi dan kehendak sejarah** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena faktor situasi dan kehendak sejarah.
5. **Faktor agama** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena berdasarkan faktor agama.
6. **Faktor kekuatan** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena kekuatan otot yang dimilikinya.
7. **Faktor uang** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena berdasarkan uang yang dimilikinya.

8. **Faktor ditentukan group** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena ia termasuk mata rantai atau group kunci penentu (*decision maker*) dan oleh group tersebut ia ditunjuk untuk menjadi pemimpin organisasi.
 9. **Faktor keluarga** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena ditentukan koneksi atau famili yang memegang kunci penentu (*decision maker*.)
 10. **Faktor ABS** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena pintar menjilat (*yes man*) dan ABS (*Asal Bapak Senang*).
 11. **Faktor menggunakan jalan pintas** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena menggunakan jalan pintas. Contoh cara kudeta (*coup d'etat*), membunuh saingan atau lawan politiknya, mencatut nama keluarga (*nepotisme*), menggunakan kekuatan ekonomi (uang) yang dimilikinya.
 12. **Faktor prestasi** yaitu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin karena faktor prestasi atau kemampuan yang dimilikinya dan dibina oleh dirinya sendiri.
- b) Gaya kepemimpinan yaitu:
1. **Gaya diktator** yaitu pemimpin jenis ini melakukan segala sesuatunya berdasarkan paksaan atau kekuasaan mutlak.
 2. **Gaya demokratis** yaitu pemimpin jenis ini adalah yang paling terbaik, karena selalu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak masyarakat banyak.
 3. **Gaya bebas** yaitu pemimpin jenis ini selalu memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada anggota atau masyarakat pemilihnya.
 4. **Gaya pelopor** yaitu pemimpin jenis ini biasanya selalu didepan (*pelopor*) untuk memberikan contoh atau suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

5. **Gaya manipulasi** yaitu pemimpin jenis ini selalu melakukan tipuan dan rayuan.
6. **Gaya transaksi** yaitu pemimpin jenis ini selalu melakukan transaksi (imbalan) dengan para anggota masyarakat yang dipimpinnya.
7. **Gaya biar lambat asal selamat** yaitu pemimpin jenis ini melakukan segala sesuatunya sangat berhati-hati.
8. **Gaya alang-alang** yaitu pemimpin jenis ini tak ubahnya seperti daun alang-alang sangat mudah bergoyang jika dihembus angin.
9. **Gaya gabungan** yaitu pemimpin jenis ini dalam melakukan kebijakannya dengan menggabungkan gaya dan cara-cara kepemimpinannya yang ada.

c) Jenis kepemimpinan yaitu:

1. **Supra struktur** yaitu jenis pemimpin yang terdapat dilembaga pemerintahan (birokrasi), dan di ABRI.
2. **Infra struktur** yaitu jenis pemimpin yang terdapat ditengah-tengah masyarakat seperti di orpol, ormas dan LSM.
3. **Pemimpin formal** yaitu jenis pemimpin yang menduduki jabatan secara formal, contoh di orpol, ormas, pemerintahan, ABRI, dan di perusahaan swasta.
4. **Pemimpin non formal** yaitu jenis pemimpin yang ditokohkan atau dituakan di satu daerah (lingkungan) tertentu.

Dengan demikian, faktor-faktor munculnya pemimpin, gaya kepemimpinan, dan jenis kepemimpinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Faktor Munculnya Pemimpin, Gaya Kepemimpinan, Dan Jenis Kepemimpinan

FAKTOR-FAKTOR MUNCULNYA PEMIMPIN, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN JENIS KEPEMIMPINAN	
A. Faktor munculnya pemimpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor bakat 2. Faktor keturunan 3. Faktor karena dipilih 4. Faktor situasi dan kehendak sejarah 5. Faktor agama 6. Faktor kekuatan 7. Faktor uang 8. Faktor ditentukan group 9. Faktor keluarga 10. Faktor ABS 11. Faktor menggunakan jalan pintas 12. Faktor prestasi
B. Gaya kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaya diktator 2. Gaya demokratis 3. Gaya bebas 4. Gaya pelopor 5. Gaya manipulasi 6. Gaya transaksi 7. Gaya biar lambat asal selamat 8. Gaya alang-alang 9. Gaya gabungan
C. Jenis kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supra struktur 2. Infra struktur 3. Pemimpin formal 4. Pemimpin non formal

Sumber:

Siregar, Evendhy M., (1989). *Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Berhasil.* Jakarta: Rajawali, hal. 135-175.

2.4. Mukhtar NU

Sebagaimana disebutkan dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Nahdlatul Ulama Bab XIX tentang tentang permusyawaratan Tingkat Nasional, pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: "Muktamar adalah instansi permusyawaratan tertinggi di

dalam Nahdlatul Ulama, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali dalam lima tahun". Sedangkan ayat (2) Muktamar dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada ayat (3) Muktamar dihadiri oleh: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan ayat (4) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang yang sah. (Hasil-hasil Muktamar XXX NU, 2000:138).

Moh. Adnan (Skripsi, 2000:49-50) mengungkapkan, Muktamar NU adalah lembaga Permusyawaratan Tertinggi yang diselenggarakan PBNU setiap 5 tahun sekali, sebagai sarana untuk mengevaluasi program selama 5 tahun mendatang. Selain itu, kata Adnan, Muktamar juga membahas masalah hukum fikih, program dasar NU untuk periode berikutnya, serta membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama, politik, serta kemaslahatan umat, terutama persoalan-persoalan bangsa yang aktual.

Selama kurang lebih 77 tahun berdiri, NU telah melaksanakan Muktamar sebanyak 30 kali. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan Muktamar NU selama tiga puluh kali, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Tempat, Waktu, dan Nama Ketua Umum PBNU
Hasil Muktamar NU Selama Tiga Puluh Kali

Momentum Muktamar	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Nama Ketua Umum PBNU
Muktamar ke-1	Surabaya, 21 Oktober 1926	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-2	Surabaya, 9 Oktober 1927	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-3	Surabaya, 28 September 1928	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-4	Semarang, 21 September 1929	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-5	Pekalongan, 21 September 1930	KH. Hasan Gipo

Muktamar ke-6	Cirebon, 21 Agustus 1931	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-7	Bandung, 9 Agustus 1932	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-8	Jakarta, 7 Mei 1933	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-9	Banyuwangi, 21-26 April 1934	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-10	Surakarta, 13-18 April 1935	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-11	Banjarmasin, 8-12 Juni 1936	KH. Hasan Gipo
Muktamar ke-12	Malang, 20-24 Juni 1937	KH. Machfoezh Siddiq
Muktamar ke-13	Mcnes, 11-16 Juni 1938	KH. Machfoezh Siddiq
Muktamar ke-14	Magelang, 15-21 Juli 1939	KH. Machfoezh Siddiq
Muktamar ke-15	Surabaya, 15-21 Juli 1940	KH. Machfoezh Siddiq
Muktamar ke-16	Purwokerto, 26-29 Maret 1946	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-17	Madiun, 25 Mei 1947	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-18	Jakarta, 30 April-1 Mei 1950	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-19	Palembang, 28 April- 1 Mei 1952	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-20	Surabaya, 9-14 September 1954	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-21	Medan, Desember 1956	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-22	Jakarta, 13-18 Desember 1960	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-23	Surakarta, 24-29 Desember 1963	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-24	Bandung, 3-9 Juli 1967	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-25	Surabaya, 20-25 Desember 1971	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-26	Semarang, 5-11 Juni 1979	KH. Idham Chalid
Muktamar ke-27	Situbondo, 8-12 Desember 1984	KH. Abdurrahman Wahid
Muktamar ke-28	Yogyakarta, 25-28 Nopember 1989	KH. Abdurrahman Wahid
Muktamar ke-29	Cipasing, 1-5 Desember 1994	KH. Abdurrahman Wahid
Muktamar ke-30	Lirboyo, 21-25 Nopember 1999	KH. Hasyim Muzadi

Sumber:

1. **Adnan, Moh.** (2000). *NU dan Civil Society: Kecemasan Faksi Kultural Generasi Muda NU Surabaya Terhadap Dinamika NU Pasca Muktamar Ke-30 di Lirboyo*. Skripsi, Surabaya: FISIP-UNAIR., hal. 50-51.
2. **Wawancara** peneliti dengan Said Aqiel Siradj tentang siapa saja nama-nama Ketua Umum PBNU melalui Telp. Hp. 0811834960 pada hari Minggu, 20 Juli 2003, Pukul 22.30 WIB.
3. **Bruinessen, Martin Van.** (1999). *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: I.K.I.S, hal. 50.

Dengan demikian, Muktamar NU adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama (NU), yang diselenggarakan oleh PBNU setiap 5 tahun sekali, sebagai sarana untuk mengevaluasi program selama 5 tahun mendatang, juga membahas masalah hukum fikih, program dasar NU untuk periode berikutnya, serta

membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama, politik, serta kemaslahatan umat, terutama persoalan-persoalan bangsa yang aktual.

Pada *Muktamar NU pertama* pada 14-16 Rabiul Awwal 1345 H (21-23 September 1926 M), di Hotel Muslimin Jalan Pancelch Surabaya, tampak sekali keinginan NU untuk kembali memantapkan dirinya sebagai pembela paham *Ahlussunah Wal Jama'ah 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Muktamar pertama yang dihadiri 93 orang kiai dari Jawa dan Madura, juga tiga orang kiai masing-masing Kiai Abdullah dari Palembang, Kiai Abu Bakar dari Kalimantan dan Kiai Abdul Kadir dari Martapura, itu telah berhasil memutuskan 21 masalah penting. Namun, di antara dua puluh satu masalah itu, yang dianggap paling menonjol oleh peserta muktamar saat itu, adalah masalah madzhab.

Persoalan empat madzhab: Hanafi (80-150 H), Maliki (93-179 H), Syafi'i (150-204 H) dan Hambali (164-241 H), dikupas demikian jauh dalam muktamar baik mengenai riwayat hidup, jalur keturunan, kualitas keilmuan, kecerdasan akal, keabsahannya sebagai mujtahid mutlak, kuantitas muslim yang menganut maupun kemasyhurannya yang hingga kini belum tertandingi. Atas dasar itu, muktamar kembali menegaskan: mengharuskan bagi umat Islam zaman kini untuk mengikuti salah satu dari empat madzhab dalam rangka menjalankan ajaran Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah*.

Di samping itu, muktamar pertama juga melaporkan kemajuan yang dicapai oleh madrasah '*Nahdlatul Wathan*'. Selain telah membuka beberapa cabang di daerah, *Nahdlatul Wathan* juga telah membentuk cabang baru bernama '*Jam'iyatun Nashihin*', semacam perkumpulan muballigh. Perkumpulan ini khusus bagi kaum

muda berusia 15 tahun ke atas untuk dididik sebagai guru dan muballigh. Setiap lima hari sekali mereka diberi pelajaran ilmu pengetahuan agama meliputi: Ilmu Hukum (*Fikih*), Theologi (Ketauhidan) dan Tafsir, yang kesemuanya bersumber pada kitab-kitab kuno seperti '*Fathul Qarib*', '*Tafsir Jalalin*', '*Kifayatul Awam*', '*Tanwirul Qulub*' dan lain-lain. Aktifitas belajarnya tidak ditentukan tempatnya, tetapi ditempuh dengan cara bergiliran dari rumah anggota satu ke anggota yang lain dan seterusnya. Dalam muktamar pertama, diinformasikan juga bahwa '*Jam'iyatun Nashihin*', telah berhasil mendidik 25 kader muballigh muda yang siap untuk diterjunkan sebagai guru maupun muballigh. Dari sini bisa dilihat bahwa muktamar pertama NU, ketika itu baru berumur 8 bulan, merupakan arena pematangan eksistensi NU sebagai pembela paham *Ahlussunah Wal Jama'ah 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Selain itu, sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan, NU terlihat mulai merintis jalan ke bidang-bidang itu.

Muktamar NU Kedua yang juga dipusatkan di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, pada 14-16 Rabiul Tsani 1346 H (9-11 Oktober 1927 M). Muktamar Kedua dihadiri 146 kiai dari Jawa dan Madura serta 242 orang terdiri dari kelompok pengusaha, petani dan buruh. Hadir juga dr. Soetomo (pendiri Indonesische Studieclub) dan beberapa pejabat pemerintah Surabaya serta wakil dari Inladshe Zaken, Vander Plas.

Seperti halnya muktamar pertama, muktamar kedua pun berhasil memutuskan beberapa masalah penting. Namun, tekanannya bukan lagi pada persolan madzhab, melainkan telah berkembang pada persolan kemasyarakatan. Misalnya, masalah perkawinan di bawah umur yang ditangani pemerintah Hindia-Belanda, dinilai

banyak menyimpang dari hukum fiqih. NU meminta kepada pemerintah agar masalah tersebut benar-benar diawasi dan terutama mengenai walinya. Juga tentang Penghulu atau Naib. Dalam hal ini, NU meminta kepada pemerintah agar orang yang akan dijadikan Penghulu atau Naib itu terlebih dulu mendapat persetujuan dari para ulama setempat. Dan syarat seseorang yang akan diangkat menjadi Penghulu, harus berpegang pada salah satu dari empat madzhab.

Muktamar kedua juga meminta kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk memasukkan kurikulum agama Islam pada setiap sekolah umum di Jawa dan Madura. Dalam hal ini, muktamar berpegang pada mayoritas penduduk Jawa dan Madura serta para pelajar di sekolah umum yang beragama Islam. Bila di negara mayoritas muslim tidak diajarkan pelajaran agama Islam, menurut pandangan NU, sama artinya dengan berusaha mendangkalkan Islam.

Dalam Muktamar Kedua juga membahas dan memutuskan mengenai hukumnya menyerupai orang Belanda dalam hal berpakaian, misalnya memakai celana, dasi, topi dan sepatu. Muktamar memutuskan hukumnya haram, apabila niat menyerupai itu dimaksudkan untuk seluruhnya termasuk kesombongannya, kekafirannya dan kegagahannya. Tapi kalau sekedar mode, boleh saja asal tidak melanggar batas aurat yang sudah ditentukan Islam.

Muktamar NU Ketiga yang juga dipusatkan di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya, pada 23-25 Rabiul Tsani 1347 H (28-30 September 1928 M). Muktamar Ketiga ini lebih maju dibandingkan muktamar sebelumnya. Bila dalam muktamar kedua dihadiri 146 kiai, muktamar ketiga ini lebih meningkat lagi sampai 260 kiai dari 35 cabang NU di Jawa dan Madura. Itu pun belum terhitung peserta yang bukan

kiai (pengurus Tanfidziyah), pengusaha, kaum buruh dan juga pemuda-pemuda NU, sehingga muktamar ketiga, terlihat cukup berhasil terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengikut. Dalam muktamar ketiga, selain membahas berbagai masalah keagamaan, juga memutuskan beberapa masalah penting yang tidak terjadi pada muktamar pertama dan kedua. Misalnya, pemilihan pengurus baru. Meskipun muktamar diputuskan setiap tahun sekali, perubahan pengurus tidak dilakukan pada muktamar tahun pertama maupun kedua. Baru pada muktamar tahun ketiga inilah diadakan pemilihan pengurus baru dengan menggunakan sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Dan hasilnya seperti berikut ini:

SYURIAH

Rais : KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng-Jombang
 Wakil Rais : KH. Sa'id Peneleh-Surabaya
 Katib Awwal : KH. Mas Alwi Kawatan-Surabaya
 Katib Tsani : KH. Amin Kemayoran-Surabaya
 Katib Tsalis : KH. Ghufron-Surabaya
 A'wan : KH. Amin Praban-Surabaya
 KH. Ridwan-Surabaya
 KH. Abdullah-Surabaya
 KH. Anwar Rangah-Surabaya
 KH. Abdul Majid-Surabaya
 KH. Bishri-Surabaya
 KH. Abdul Halim Pacarkeling-Surabaya
 KH. Ridwan-Semarang
 KH. Khalil-Lasem
 KH. Raden Asnawi-Kudus
 KH. Raden Hambali-Kudus
 KH. Ma'shum-Jombang
 KH. Bishri Syansuri-Jombang
 KH. Amir-Pekalongan

MUSTASYAR:

Syekh Abdul 'Alim Ash-Shiddiqi-India
 (sejak muktamar kedua ia aktif mengikutinya)
 Syekh Ahmad Ghanim Al Amir-Mesir

KH. Abdul Wahab Hasbullah-Surabaya
KH. Ma`ruf-Kediri
KH. Shaleh-Juwono
KH. Syamsuddin-Banyuwangi
KH. Nahrawi-Malang
KH. Yasin-Malang
KH. Zuhdi-Pekalongan
KH. Abbas-Pekalongan
KH. Abdurrahman-Banten

TANFIDZIYAH:

President : H. Hasan Gipo Ampel-Surabaya
Vice President : H. Ahzab Peneleh-Surabaya
Kassier I : H. Ihsan Ampel-Surabaya
Kassier II : H. Abdul Fatah Bubutan-Surabaya
Secretaris I : Muhammad Shadiq Kawatan-Surabaya
Secretaris II : Muhammad Hadi Shadiq Tembok-Surabaya
Secretaris III : Badrun-Surabaya

KOMISARIS:

H. Shaleh Syamil Ampel-Surabaya
H. Nawawi Jagalan-Surabaya
H. Burhan Pasarbesar-Surabaya
H. Siraj Gemblongan-Surabaya
H. Dahlan Bubutan-Surabaya
H. Abdul Manan Bubutan-Surabaya
H. Ja'far Pasarbesar-Surabaya
H. Abdullah Hakim Petukangan-Surabaya
H. Ihsan Kepusari-Surabaya
H. Dahlan Lawangseketeng-Surabaya
H. Yasin Kawatan-Surabaya
H. Shaleh Sukodono-Surabaya
H. Nahrawi Bubutan-Surabaya
H. Abdus Syukur Petukangan-Surabaya

Pemilihan pengurus baru muktamar ketiga, agaknya, memang perlu dilakukan, bukan karena beberapa anggota pengurus lama tidak lagi aktif, melainkan juga karena perlunya persyaratan administratif dan penanganan khusus bagi permohonan '*rechtspersoon*' kepada pemerintah Hindia-Belanda, guna mendapatkan pengakuan secara hukum. Ketika itu, tiga orang pengurus terpilih, masing-masing:

KH. Sa'id bin Shaleh (Wakil Rais), H. Hasan Gipo (President Tanfidziyah) dan Muhammad Sugeng alias Muhammad Shadiq Yudhadhiwiryono (Secretaris I), diberi kuasa penuh untuk mengurus permohonan '*rechtspersoon*' tersebut.

Surat permohonan tertanggal 5 September 1929 diajukan kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Betawi. Dan lima bulan kemudian, persisnya pada 6 Pebruari 1930, permohonan dikabulkan. Ini berarti, sejak dikabulkannya permohonan itu, NU diakui sebagai organisasi berbadan hukum, yang kemudian secara resmi ditulis dalam '*Besluit Rechtspersoon*' No. XI buat lamanya 29 tahun.

Masih di dalam muktamar ketiga. Seperti muktamar pertama dan kedua, muktamar ketiga juga diakhiri dengan 'rapat akbar' di Masjid Ampel. Seluruh keputusan muktamar dibacakan di depan umum. Sekedar untuk memberitahukan hasil yang telah dicapai oleh muktamar. Tradisi 'rapat umum' ini memang perlu dipertahankan, oleh karena selain bermanfaat menarik massa NU, juga secara tidak langsung memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ummat NU yang ikut memikul biaya muktamar.

Keputusan yang paling penting di dalam muktamar ketiga, terutama dalam hubungannya dengan usaha pengembangan NU, adalah sebuah keputusan yang dihasilkan oleh 'Majelis Khamis' (komisi lima), yang dipimpin Kiai Shaleh Banyuwangi dengan anggota Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ridwan, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Muharram Kediri. Majelis kelima ini memutuskan: membentuk '*Lajnatun Nashihin*' semacam komisi propaganda untuk menyiarkan NU ke berbagai daerah.

Anggota '*Lajnatun Nashihin*' ini terdiri dari sembilan orang: Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Raden Asnawi, Kiai Ma'shum, Kiai Mas Alwi, Kiai

Musta'in, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Halim dan Ustadz Abdullah Ubaid. Tugas komisi ini mendatangi berbagai daerah (terutama Jawa dan Madura) guna menjelaskan maksud dan tujuan NU, untuk kemudian mendirikan cabang ditempat-tempat tersebut. Dan dalam pelaksanaan tugasnya terdapat pembagian wilayah tertentu. Misalnya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Abdul Halim lebih mengutamakan daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mas Alwi, dan beberapa anggota lainnya lebih terfokus di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Tapi, bukan, berarti pembagian secara ketat. Dalam pelaksanaannya, ternyata, seringkali terjadi tukar-menukar.

Kerja '*Lajnatun Nashihin*' (komisi propaganda) ini ternyata cukup ampuh. Buktinya, dalam waktu singkat, diberbagai daerah di seluruh Jawa dan Madura, bermunculan cabang-cabang NU bak cendawan di musim hujan. Sehingga, muktamar berikutnya tidak perlu lagi dipusatkan di Surabaya, tetapi diadakan secara berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya.

Begitu pula pada *Muktamar NU Keempat*, di Hotel 'Arabistan' Kampung Melayu Semarang, Jawa Tengah, pada 12-15 Rabiul Tsani 1348 H (17-20 September 1929 M). Sedangkan acara penutupannya (dengan rapat akbar), dilangsungkan di Masjid Jami' kota Semarang. Muktamar ini menyedot perhatian masyarakat luas, dan dihadiri tidak kurang 1450 peserta muktamar, terdiri dari 350 orang kiai, 900 orang pendamping (pengiring kiai) dan 200 orang pimpinan Tanfidziyah. Sedangkan cabang NU yang sudah terbentuk, tercatat 63 cabang, dengan rincian 13 cabang di Jawa Barat, 27 cabang di Jawa Tengah dan 23 cabang berada di Jawa Timur, termasuk Madura.

Persidangan muktamar keempat dibagi menjadi tujuh majelis dan setiap majelis dipimpin seorang kiai, didampingi dua orang penulis yang bertugas sebagai pencatat hasil musyawarah majelis. Demikian pula, materi permasalahannya diambil dari berbagai daerah yang jauh sebelumnya, sudah dikirimkan ke *Hoofdbestuur* NU. Permasalahan keagamaan (*masail diniyyah*) yang dibahas dari muktamar ke muktamar juga tidak terlalu sama. Bahkan lebih tepat jika dikatakan selalu aktual, mengikuti perkembangan dan kejadian di masyarakat. Namun, dari sekian banyak masalah yang dibahas, secara umum bisa dikelompokkan dalam tiga masalah: masalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia sebagai rakyat dengan pemerintah.

Muktamar keempat (Semarang) merupakan langkah awal bagi keberhasilan NU memperkenalkan diri ke berbagai daerah. Bukan hanya berhasil memperkenalkan diri dan membentuk cabang baru saja, melainkan juga sukses menggugah para ulama terkemuka untuk memberikan dukungannya terhadap NU. Sebab ternyata, kehadiran Kiai Hasyim Asy'ari disetiap muktamar, khususnya muktamar Semarang, cukup menggugah semangat para kiai, khususnya kiai terkemuka dari Sukamiskin (Kiai Haji Abbas), untuk datang ke Semarang guna menyatakan dukungannya terhadap NU.

Muktamar NU kelima di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 13-16 Rabiul Tsani 1349 H (7-10 September 1930 M). Muktamar inipun tidak kalah hebatnya dengan muktamar Semarang. Selain terdapat penambahan cabang baru, muktamar Pekalongan juga mengumumkan terbentuknya cabang NU di luar Jawa, yaitu di Kalimantan (Banjar Martapura). Selain itu, kehadiran Kiai Hasyim Asy'ari di dalam muktamar pekalongan ini ternyata tidak hanya menggugah semangat pengusaha batik

setempat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan muktamar, melainkan juga membangunkan semangat para kiai khususnya kiai ternama dari Termas, Kiai Haji Dimiyati. Kiai yang belum pernah mengikuti muktamar ini, seketika itu datang ke Pekalongan dan menyatakan dukungannya terhadap NU.

Usaha memperkenalkan NU keluar daerah terus ditingkatkan. Pada 12 Rabiul Tsani 1350 H (29 Agustus 1931 M) dilangsungkan *Muktamar NU keenam* di Cirebon, Jawa Barat. Dan tahun berikutnya, pada 13 Rabiul Tsani 1351 H (9 Agustus 1932 M) diselenggarakan *Muktamar NU ketujuh* di Bandung Jawa Barat. Sejak muktamar ketujuh inilah, terjadi perubahan waktu muktamar untuk periode berikutnya. Kiai Hasyim Asy'ari tidak lagi menentukan bulan Rabiul Tsani sebagai bulan muktamar, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada peserta muktamar untuk memilih sendiri bulan (waktu) apa yang disukai. Karena itu, *Muktamar NU kedelapan* yang berlangsung di Jakarta tidak lagi jatuh pada Rabiul Tsani, tetapi pada 12 Muharram 1352 H (7 Mei 1933 M). Hingga di sini kita bisa melihat perjalanan NU semenjak muktamar pertama sampai kedelapan (1926-1933) merupakan masa perintisan. (Anam, 1999:80-88).

Sedangkan masa perkembangan NU dimulai pada saat *Muktamar NU kesembilan* di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 21-26 April 1934 lahir sebuah keputusan membentuk wadah pemuda yang diberi nama '**Anshor Nahdlatol Oelama (ANO)**'. Organisasi pemuda ini kemudian menjadi lebih penting artinya menopang induk organisasi, setelah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangganya (PID/PRT) disahkan dalam muktamar NU berikutnya di Sala, Jawa Tengah.

Selain membentuk ANO, muktamar Banyuwangi juga memutuskan beberapa masalah keagamaan (*masail diniyyah*) antara lain: masalah perselisihan paham tentang sembahyang Jum'at, masalah perlunya memudahkan perkawinan buat orang Kristen yang telah masuk Islam dan hukuman berat bagi orang yang menghina Al-Qur'an.

Tentu saja keputusan seperti itu erat hubungannya dengan perkembangan situasi dimasa itu. Lahirnya keputusan senantiasa merupakan akibat dari sebab yang terjadi. Misalnya, karena pada saat itu umat Islam sedang terpukul oleh tulisan-tulisan yang dimuat diberbagai surat kabar dan majalah, yang nadanya menghina Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Seorang pengarang Cina, **Oei Bee Thai**, misalnya, menulis artikel di majalah **Hoa Kiao** (1932) yang isi pokoknya menghina habis Nabi Muhammad SAW. Dalam bagian tulisannya Oei menyatakan, peraturan perkawinan dalam Al-Qur'an mulanya hanya untuk melampiaskan nafsu nabi. Tulisan ini membuat geger umat Islam termasuk NU. Sehingga, wajar jika kemudian NU membuat keputusan *masail diniyyah*.

Semakin banyak tulisan yang memojokkan ajaran Islam (suatu kondisi yang memang diciptakan oleh politik Belanda guna mengaburkan ajaran Islam), semakin rapat pula hubungan NU dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, khususnya kelompok pembaharu. Mungkin, inilah memang ciri umat Islam yang, apabila diserang kelompok luar Islam, segera melupakan segala bentuk pertengkaran internal Islam, untuk kemudian merapat dalam satu barisan menghadapi serangan dari luar.

Itu terbukti, ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan statuta baru yang disebut '**Ordonansi Guru**' di tahun 1923, yang kemudian ditegaskan lagi pada

1925, dan diperluas lagi ke sekolah-sekolah swasta yang bermunculan di tahun 1932, maka pertentangan soal khilafiyah antara kelompok pembaharu dan NU mendadak mereda dengan sendirinya.

Terlebih lagi ketika kemudian diketahui bahwa, Ordonansi Guru itu tidak hanya berlaku bagi pembatasan tugas para guru agama atau muballigh saja, tetapi juga berlaku bagi penempatan Bupati beserta bawahannya di Jawa. Padahal mereka itu kurang paham bahkan buta terhadap hukum-hukum Islam. Karena itu, kelompok-kelompok Islam semakin tidak tertarik pada pemusatan perhatian guna menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial yang kafir itu.

Sikap menghindari terjadinya pertengkaran di antara kelompok Islam sendiri dan mengutamakan perhatiannya terhadap keselamatan agama, telah dibuktikan kembali dalam *Muktamar NU kesepuluh* pada 13-18 April 1935, di Sala, Jawa Tengah. Muktamar secara terang-terangan menentang kebijaksanaan Belanda tentang pengangkatan pejabat yang berwenang mengurus soal agama Islam. Apabila pemerintah kolonial tidak mengadakan syarat-syarat kemampuan ilmu agama Islam bagi pejabat yang hendak mengurus soal keagamaan, NU akan membentuk badan tersendiri bagi kepentingan penyelesaian masalah agama seperti perselisihan soal waris dan sebagainya. Dengan demikian, NU semakin terlihat taringnya sebagai organisasi sosial keagamaan, yang secara keras menentang politik pemerintahan kolonial.

Tentu saja, sikap NU semacam itu semakin membuat ketakutan pemerintah Hindia Belanda akan kegagalan politiknya. Lebih-lebih ketika muktamar kesepuluh itu, jumlah anggota NU yang sudah terdaftar sekitar 67.000 orang, tersebar di 68

cabang di seluruh Indonesia. Ini berarti, NU sebagai ormas keagamaan tidak bisa dianggap remeh.

Muktamar NU kesebelas (8-12 Juli 1935), sebuah organisasi lokal di Kalimantan, Hidayatul Islamiyah, menyatakan bergabung ke dalam NU. Sedangkan *Muktamar NU keduabelas* (20-24 Juni 1937) di Malang, jumlah cabang melonjak menjadi 84 dan tiga cabang baru di Sumbawa Besar dan Palembang. Kemudian pada saat Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, jumlah cabang NU naik menjadi 120 cabang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, potensi ulama bermazhab di Indonesia telah terorganisasi, dan tinggal meningkatkan peranannya lebih luas lagi. Oleh karena merasa telah memiliki kekuatan, maka tidaklah heran jika kemudian sikap NU terlihat semakin keras terhadap politik pemerintahan Hindia-Belanda, terutama yang menyangkut urusan agama Islam. Misalnya, dalam muktamar kesebelas di Banjarmasin, NU kembali mengajukan mosi agar supaya pemerintah membatalkan niatnya mengadakan pencatatan sukarela perkawinan orang-orang yang hak perkawinannya belum ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, niat mengadakan pencatatan semacam itu, menurut NU, justru akan membuka kemungkinan penyelewengan hukum Islam bagi para pemeluknya.

Begitu pula dalam muktamar NU keduabelas di Malang ini, NU masih tetap mempersoalkan penyerahan kekuasaan urusan waris dari *Raad* agama kepada pengadilan negeri. Ini berarti perselisihan urusan waris tidak lagi diselesaikan berdasarkan hukum agama, tetapi justru hukum adat yang menjadi pegangannya. Selain itu, NU juga mempersoalkan niat pemerintah Belanda mengenai rencana

penerapan undang-undang perkawinan. Baik masalah waris yang diserahkan ke pengadilan negeri maupun rencana pencatatan perkawinan, keduanya ditolak NU dalam muktamar NU keduabelas di Malang. (Anam, 1999:94-98).

Muktamar NU ketigabelas di Menes, Banten, 11-16 Juni 1938, dibidang pendidikan NU memutuskan membentuk badan otonom yang bertugas mengembangkan pendidikan NU dan badan tersebut diberi nama 'Ma'arif NU' yang dalam perkembangan berikutnya lebih dikenal dengan nama 'LP Ma'arif' (Lembaga Pendidikan Ma'arif). Badan otonom tersebut dipimpin langsung KH. A. Wahid Hasyim, yang memang sebelumnya (12 Pebruari 1938) ia telah mengadakan konperensi khusus bagian pendidikan NU Jawa Timur di Singosari-Malang. Apa yang dihasilkan oleh konperensi Malang itu, oleh KH. A. Wahid Hasyim dibawa ke muktamar Menes dan berhasil disetujui untuk meningkatkan pendidikan dikalangan sekolah NU.

Tentang konsep strategi pengembangan sekolah NU ini antara lain: membagi madrasah NU menjadi madrasah 'umum' dan madrasah 'ikhtisasiyah' (kejuruan) seperti pertukangan, pertanian, hukum maupun perdagangan dan sebagainya. Sedangkan madrasah 'umum' dibedakan menurut jenjang: *Madrasah Awwaliyah* (semacam TK) dengan masa pendidikan dua tahun, *Madrasah Ibtida'iyah* (semacam SD) selama tiga tahun, *Madrasah Tsanawiyah* (semacam SLP) selama tiga tahun, *Madrasah Mu'allimin Al Wustha* dan *Al-Ulya* (semacam Pendidikan Guru Agama (PGA) menengah dan atas) selama tiga tahun. Sedangkan kurikulum dipergunakan campuran agama dan umum. Dan nama madrasah diharuskan mencantumkan nama NU.

Namun perubahan mendasar seperti itu tidak berarti bersih dari hambatan maupun rintangan. Pada mulanya, para pendidik dikalangan NU belum tertarik bahkan menolak kurikulum pelajaran umum. Bisa dimengerti, karena pada saat itu semangat anti Belanda telah memasuki sendi kehidupan masyarakat NU yang amat dalam. Sehingga segala apa yang dilakukan Belanda, dianggapnya membahayakan umat Islam. Namun, karena kegigihan KH. A. Wahid Hasyim didalam memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada para pendidik NU, akhirnya berbagai sekolah NU berkembang menjadi bentuk sekolah modern yang mengajarkan kurikulum campuran agama dan umum.

Sedangkan dibidang kewanitaan, pada muktamar ketigabelas di Menes, Banten, 1938, NU membentuk organisasi wanita yang diberi nama '**Nahdlatoel Oelama Bahagian Moeslimat**' (NOM). Organisasi ini diawal berdirinya bertujuan: mendidik dan mengajar kaum muslimat, agar supaya menjadi isteri dan ibu yang utama dari 'Ahlussunnah Wal Jamaah', mengadakan pengajaran dan pendidikan, kursus dan dakwah, mendirikan dan mengurus madrasah bagian banat (perempuan) dan mengusahakan kerajinan dan jalan mendapat rezeki yang halal. Organisasi wanita NU ini kemudian berkembang pesat dengan nama 'Muslimat NU', terutama setelah mendapat pengesahan dan persetujuan muktamar NU kelimabelas di Surabaya.

Muktamar NU keempatbelas di Magelang, pada 15-21 Juli 1939 keinginan NU untuk memajukan pendidikan semakin terlihat. Selain itu, muktamar ini memutuskan berbagai masalah yang juga dimajukan dalam **Al Majlisul Islami 'Ala Indonesia (MIAI)**, seperti masalah pencabutan artikel 117 Indische Staatsregeling (Undang-Undang Dasar), masalah pemindahan Raad agama ke Hakim Landraad,

masalah hukuman berat bagi penghina Islam dan lain sebagainya, juga menuntut kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mencabut 'Ordonansi Guru 1925' guna melepas ikatan pengajaran Islam dari penyempitan peraturan pemerintah. Selain itu, muktamar juga mendesak pemerintah untuk tidak memberi subsidi kepada usaha atau sekolah manapun, oleh karena pengertian subsidi itu sendiri justru menyalahi prinsip netral terhadap agama.

Sikap penolakan NU terhadap pemberian subsidi itu didasarkan pada kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan. Perbandingan antara dana yang diberikan atau diperbantukan kepada Katholik dan Protestan dengan yang diberikan kepada organisasi-organisasi Islam betul-betul tidak berimbang.

Perbandingan dana bantuan subsidi itu lengkapnya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Perbandingan Dana Bantuan Subsidi Pemerintah
Kepada Katholik Dan Protestan Dengan Organisasi-Organisasi Islam

Tahoen	Oentoek Protestan dan Katholik	Oentoek Islam
1920	f 1.010.100	f 5.900
1921	f 1.110.100	f 5.900
1922	f 1.077.100	f 5.900
1923	f 1.095.100	f 5.900
1924	f 1.116.100	f 5.900
1925	f 1.115.000	f 4.000
1926	f 1.108.000	f 4.000
1927	f 1.417.000	f 4.000
1928	f 1.748.000	f 4.000
1929	f 1.728.000	f 4.000
1930	f 1.641.000	f 4.000
1931	f 1.612.000	f 4.000
1932	f 1.862.300	f 4.700
1933	f 1.601.000	f 7.700
1934	f 1.511.500	f 7.500

1935	f 1.176.500	f 7.500
1936	f 1.007.500	f 7.500
1937	f 1.004.500	f 7.500
1938	f 1.022.500	f 7.500
1939	f 1.197.500	f 7.500
1940	f 1.304.400	f 4.600

Sumber: **Anam, Choirul, (1999). *Petumbuhan dan Perkembangan NU***. Surabaya: Bisma Satu, hal. 112.

Keinginan keras NU untuk memajukan dan mengembangkan sekolah dalam muktamar keempatbelas di Magelang ini, terutama ketika lembaga Ma'arif dipimpin KH. Wahid Hasyim, terlihat cukup berhasil. Ratusan bahkan mungkin ribuan sekolah NU bermunculan diberbagai cabang NU di seluruh daerah. Dan menurut statistik 1981 jumlah sekolah NU di seluruh Indonesia berjumlah 22.165 buah. Untuk lebih jelasnya bisa diikuti tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah dan Jenis Sekolah NU di seluruh Indonesia
(dihimpun dari 26 wilayah NU (Propinsi) tahun 1981)

No.	Jenis	Jumlah	Jumlah setelah dikonfirmasi terjadi penambahan
1.	Taman Kanak-kanak	1.221	1.162
2.	Madrasah Ibtidaiyah	14.472	3.846
3.	Madrasah Tsanawiyah	93	309
4.	Madrasah Aliyah	47	100
5.	SMP	115	132
6.	SMA	37	40
7.	PGA	263	84
8.	Mu'allimat	71	-
9.	SPG	7	8
10.	ST	22	-
11.	STM	7	5
12.	SMEP	5	-
13.	SMEA	4	-
14.	SPMA	1	-

Jumlah	16.365	5800 = 22.165
---------------	---------------	----------------------

Sumber: **Anam, Choirul**, (1999). *Petumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu, hal.113.

Muktamar NU kelimabelas pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, merupakan muktamar terakhir bagi NU di masa penjajahan Belanda. Hal-hal yang diputuskan dalam muktamar NU menjelang runtuhnya pemerintah Hindia-Belanda. Seperti semenjak berdirinya Badan Federasi Perkumpulan Islam bernama: '**AL Majlisul Islami 'Ala Indonesia (MIAI)**' pada 12-15 Rajab 1356 H (18-21 September 1937 M) di Pondok Kebondalem, Surabaya oleh empat orang tokoh pergerakan Islam yakni: Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur dan dibantu W. Wondoamiseno (Syarikat Islam), maka keterlibatan NU dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin menonjol. Sampai pun ketika MIAI berada dalam front kesatuan bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) menuntut Indonesia berparlemen, NU tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Dan bahkan sejak semula, ketika GAPI mengadakan 'Kongres Rakyat Indonesia' (KORINDO) di Batavia (Jakarta), 23-25 Desember 1939 untuk menuntut Indonesia berparlemen, NU mengutus KH. Mahfudz Shiddiq untuk mengikuti kongres tersebut sebagai manifestasi kesepakatan dan persetujuan NU terhadap tuntutan GAPI.

Namun, sejauh tuntutan GAPI yang memerlukan bentuk aksi, NU memberikan keleluasaan kepada beberapa tokoh yang dianggap representatif untuk melakukan hal itu melalui MIAI. Karena itu, tokoh-tokoh NU yang berada di MIAI selalu tampil bersama GAPI dalam setiap aksi menuntut Indonesia berparlemen. Sebagai contoh, front kesatuan antara GAPI dan MIAI yang melahirkan aksi bernama

KORINDO (Kongres Rakyat Indonesia). Duduk dalam kepemimpinan KORINDO (kepengurusannya menggunakan sistem presidium secara bergiliran) adalah: Mr. Sartono, Dr. AK. Gani (Gerindo), KH. A Wahid Hasyim (NU), Abikoeso Tjokrosoejoso (PSII), Soekardjo Wirjopranoto (Parindra), Wirjoningrat (Parindra), KH. Mahfudz Shiddiq (NU), Atiek Soewardi (Pasundan), KH. Muhammad Ilyas (NU), Kasimo (Khatolik) dan Dr. Leimena (Kristen).

Adapun permasalahan yang dibahas dalam Mukhtar NU kelimabelas ini, selain memutuskan berbagai masalah keagamaan juga mendesak pemerintah Hindia-Belanda untuk segera mengadakan perbaikan dan tindakan terhadap beberapa hal, seperti memberikan pertolongan kepada jamaah haji Indonesia yang menderita di Mekkah akibat pecahnya perang antara Jerman dan Belanda, mencabut 'Goeroe Ordonantie 1925', memberikan kebebasan kepada muballigh dan guru agama untuk mengajarkan Islam, memberikan kuasa penuh kepada pengurus masjid untuk mempergunakan kas-kas masjid bagi kepentingan kemaslahatan Islam, menindak tegas para penghina Islam dan memindahkan pelanggar makam Islam ke tempat lain, membatalkan niat mencabut artikel 117, tetapi pemerintah harus mencabut artikel 178 dan meniadakan pemberian subsidi karena menyalahi prinsip netral terhadap agama.

Keputusan lain, mengadakan aksi pengembalian pelajar Indonesia dari Saudi Arabia semata-mata karena pecahnya Perang Dunia II, melarang pemuda Indonesia, khususnya pemuda Islam untuk memasuki milisi Belanda, mengharamkan pemberian sumbangan darah bagi kepentingan militer Belanda.

Namun, keputusan yang paling penting dalam Mukhtar NU kelimabelas, adalah mengenai sikap NU terhadap calon kepemimpinan nasional. Dalam mukhtar

ini NU telah yakin bahwa kemerdekaan akan segera tercapai. Sehingga perlu mengadakan rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan 11 orang tokoh NU dipimpin KH. Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama: Soekarno dan Muhammad Hatta. Rapat berakhir dengan kesepakatan: Soekarno calon presiden pertama dan Muhammad Hatta (ketika itu) mendapat dukungan satu suara. (Anam, 1999:94-115).

Muktamar NU keenambelas pada 26-29 Maret 1946 di Purwokerto, menegaskan: NU masuk sebagai **anggota istimewa Masyumi**. Bahkan lebih dari itu, muktamar juga menyerukan kepada seluruh warga NU di semua tingkatan untuk tetap aktif mendukung tegaknya Partai Islam Masyumi. Hingga kemudian tidak jarang dijumpai pimpinan NU di daerah yang juga merangkap sebagai pimpinan partai Masyumi.

Dan mungkin sekali karena (salah satu sebab) dukungan dari NU itu, Masyumi kemudian berkembang pesat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Menurut catatan Pengurus Besar Masyumi, sampai pada akhir Desember 1.950, Masyumi mempunyai 2.37 cabang, 1.080 anak cabang, 4.982 ranting dan jumlah anggota sekitar 10 juta orang.

Peranan NU di awal perkembangan partai Islam ini memang terasa cukup mewarnai. Terutama ketika pemerintah Syahrir menciptakan '**Perjanjian Linggarjati**' dan pemerintah Amir Syarifuddin menciptakan '**Perjanjian Renville**'. Kedua perjanjian ini menurut pandangan NU justru membahayakan kedaulatan Republik Indonesia. Memang, setiap kali persetujuan berlaku gendang senjata. Tetapi

karena persetujuan tidak pernah ditaati oleh pihak Belanda, maka genjatan senjata itu pun tidak pernah ada. Karena itu NU memperlihatkan sikap kerasnya menentang kedua perjanjian tersebut melalui Masyumi.

Kemudian dalam tubuh Partai Masyumi (akibat politik Linggarjati) lahir dua sayap. Golongan anti-Linggarjati yang diwakili Soekiman dengan dukungan NU, dan golongan pro-Linggarjati terdiri dari Mohammad Roem, Syafruddin Prawironegoro dan Mohammad Natsir.

Sejak itu, tubuh Masyumi memperlihatkan gejala kurang sehat. Bukan saja karena adanya **'the right wing and the left wing'** (sebagaimana lazimnya dalam setiap partai besar lahir 'sayap kanan' dan 'sayap kiri'), melainkan lebih dari itu, setapak demi setapak menjurus ke arah pembentukan kelompok intelektual mendominasi partai Islam yang kekuatannya justru berada pada dukungan ulama pesantren dan umat Islam. Tanpa dukungan ulama pesantren (baca: NU), Partai Masyumi akan sama saja kekuatannya dengan partai-partai politik lainnya, bahkan mungkin lebih kecil dibanding dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) atau bahkan PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa tokoh intelektual berpendidikan Barat seperti Mohammad Natsir, Mr. Mohammad Roem, Mr. Syafruddin Prawironegoro, Mr. Yusuf Wibisono, Abu Hanifah, Prawoto Mangkusasmito dan lain-lain, secara perorangan (seorang atau dua yang mewakili organisasi lokal seperti Mohammad Natsir), bisa duduk di dalam kepemimpinan partai, menguasai instrumen-instrumen partai dan jalur komunikasi dengan kekuatan eksekutif untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Kondisi timpang itu bisa terjadi oleh karena

struktur organisasi Masyumi yang tidak sepenuhnya berbentuk federatif, dalam mana NU, Muhammadiyah, PSII dan lain-lain sebagai anggotanya. Akan tetapi juga mempunyai anggota perorangan, yang justru merugikan organisasi-organisasi keagamaan yang menguasai basis-basis kekuatan umat Islam. Hal-hal seperti itu tentu saja sangat merugikan NU baik ideologis maupun organisatoris.

Muktamar NU ketujuhbelas pada 25 Mei 1947 di Madiun, menyetujui prakarsa KH. A. Wahid Hasyim untuk mendirikan 'Biro Politik NU', bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak kelompok intelektual yang mendominasi Masyumi, guna menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan amat merugikan NU.

Namun, berhubung suasana revolusi dan dua kali menghadapi agresi militer Belanda (21 Juli 1947 dan 18 Desember 1948), maka niat untuk menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan hal-hal yang kurang menguntungkan dalam Partai Masyumi, oleh NU ditanggguhkan sampai situasinya memungkinkan. Tiada maksud lain, kecuali agar konsentrasi umat Islam menghadapi agresi militer Belanda tidak tergoyahkan.

Penanggungan itu dipandang cukup bijaksana, oleh karena dua bulan setelah muktamar Madiun, agresi militer Belanda yang pertama (21 Juli 1947) berhasil merebut Markas Tertinggi Hizbullah dan Sabilillah di Malang. Berita buruk ini kemudian disampaikan oleh Kiai Ghufron, pimpinan Sabilillah Surabaya, dan dua orang utusan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Bung Tomo, kepada KH. Hasyim Asy'ari di Jombang. Begitu mendengar berita, KH. Hasyim Asy'ari langsung memegang kepala sambil berseru: "*Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah*".

lalu pingsan. Beliau mengalami pendarahan otak. Dokter Angka yang didatangkan dari Jombang tidak bisa berbuat apa-apa, karena keadaannya sedang parah sekali. Malam itu juga, 7 Ramadhan 1366 H bertepatan dengan 25 Juli 1947, Rais Akbar NU, KH. Hasyim Asy'ari berpulang ke Rahmatullah.

Sudah barang tentu wafatnya KH. Hasyim Asy'ari membawa pengaruh besar bagi *Jam'iyah* NU. Sebab kehadiran KH. Hasyim Asy'ari bukanlah sekedar sebagai Rais Akbar NU yang diatur oleh Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga organisasi. Lebih dari itu, beliau adalah seorang ulama yang berhak dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga NU di semua tingkatan. Bahkan bukan cuma warga NU yang merasa kehilangan, hampir seluruh bangsa Indonesia khususnya pemeluk agama Islam merasakan hal serupa seperti yang dialami warga NU.

Namun demikian, bukan berarti perjuangan NU harus berhenti. Seperti kata peribahasa 'patah satu tumbuh seribu, patah hilang tumbuh kembali'. Barisan NU semakin dirapatkan untuk menumpas segala bentuk imperialisme. Perhatian NU masih tetap tertuju ke arah pertempuran fisik melawan agresi militer Belanda. Beberapa pasukan tempur Hizbullah dan Sabilillah dikirim ke garis depan, dan sebagian lagi dikerahkan untuk mengamati aksi-aksi komunis yang mulai mencurigakan.

Ternyata benar, PKI (Partai Komunis Indonesia) senantiasa mengadakan aksi-aksi oposisi menentang pemerintah, hingga menimbulkan gejolak politik dalam negeri yang tengah menghadapi blokade politik, ekonomi dan militer oleh Belanda. Muso, nama pimpinan PKI itu, secara terus menerus mengadakan kampanye dalam

bentuk rapat-rapat umum secara besar-besaran. Dia menghasut rakyat agar menentang pemerintah Soekarno-Hatta yang, katanya, telah menjual Tanah Air kepada Belanda.

Aksi-aksi itu kemudian menemui puncaknya pada September 1948 di Madiun. PKI melakukan pemberontakan bersenjata yang dikenal dengan '**Madiun Affair**'. NU memandang pemberontakan PKI sebagai ancaman serius bagi keselamatan Republik Indonesia. Seluruh warga NU yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah disiagakan di seluruh daerah, mengingat di daerah-daerah, PKI telah membuat jaringan pemberontakan.

Sedangkan untuk menghadapi langsung pemberontakan PKI di Madiun, Markas Tertinggi Hizbullah pimpinan **Zainul Arifin** segera memerintahkan Devisi Hizbullah Surabaya pimpinan **Wahib Wahab**, dan Devisi Magelang di bawah pimpinan Saifuddin Zuhri, siaga penuh. Pasukan Wahib Wahab berangkat memasuki Madiun dari jurusan Nganjuk, sedangkan pasukan Saifuddin Zuhri dari jurusan Ngawi. Sementara itu pasukan '**Siliwangi**' mengadakan pengejaran dari Selatan Madiun. Kedua Devisi Hizbullah itu kemudian merebut kembali Madiun ke pangkuan Republik Indonesia, dengan cara bahu membahu bersama TNI dan lain-lain badan kelasykaran bersenjata.

Setelah permusuhan dengan Belanda dinyatakan selesai dengan berhasilnya **Konperensi Meja Bundar (KMB)** di Den Haag (23 Agustus-29 Oktober 1949), disusul dengan terbentuknya **Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)** dan kemudian disusul lagi terbentuknya Negara Kesatuan RI dengan kembalinya ibukota Jakarta, NU kembali mengalihkan perhatiannya kepada penyelesaian organisatoris dengan Partai Masyumi, yang tertahan hampir dua tahun lamanya.

Berkali-kali diadakan pertemuan antara NU dan Masyumi dan juga tukar menukar nota untuk penyelesaian secara organisatoris, antara lain tentang: **Mengubah Masyumi sebagai badan federasi, tentang perimbangan suara, tentang pembentukan Dewan Tertinggi Pimpinan umat Islam Indonesia, dan tentang perjuangan umat Islam secara demokratis dan konsekuen**, ternyata tidak selesai juga. Bahkan, pertemuan itu tidak pernah mendatangkan hasil, dan akhirnya menemui jalan buntu.

Muktamar NU kedelapanbelas pada 30 April - 3 Mei 1950 di Jakarta, diputuskan: NU keluar dari Masyumi. Tetapi pelaksanaan keputusan itu pun ditangguhkan sementara waktu untuk memberikan kesempatan kepada Partai Masyumi meninjau kembali pendiriannya atas koreksi NU. Selain keputusan penting itu, muktamar juga menetapkan **KH. Abdul Wahab Hasbullah** sebagai **Rais A'am** (istilahnya bukan lagi Rais Akbar) menggantikan KH. Hasyim Asy'ari. Dan, juga menyetujui berdirinya **Organisasi Remaja Wanita NU** yang diberi nama '**Fatayat NU**', (Anam, 1999:134-138).

Muktamar NU kesembilanbelas pada 28 April-1 Mei 1952 di Palembang, dilatar belakangi dengan beberapa waktu sebelu keluar dari Masyumi, KH. A. Wahid Hasyim selaku Ketua Muda PBNU telah banyak melakukan kegiatan prakondisi. Perkembangan politik dalam tubuh Masyumi senantiasa disampaikan kepada para tokoh NU baik di daerah maupun di pusat. Maksudnya agar mereka juga ikut menilai, memikirkan dan kemudian menentukan sikap. Puncak pra-kondisi itu ditandai dengan berkumpulnya tokoh-tokoh NU se-Jawa dan Madura di kediaman KH. Maksum Khalil, Jagalan-Jombang, awal April 1952. berbagai persoalan telah dibahas dan

akhirnya diputuskan: Secara organisatoris NU memisahkan diri dari Masyumi, dan mengusulkan kepada Masyumi akan segera mengadakan re-organisasi untuk menjadikan dirinya sebagai badan federasi. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam keputusan PBNU yang terkenal dengan “Surat Keputusan PBNU tanggal 5/6 April 1952.

Keputusan PBNU tersebut disampaikan dalam muktamar. Ternyata 61 suara menyetujui, 9 suara menolak dan 7 suara blanko. Dengan demikian, muktamar secara bulat menyetujui sikap NU memisahkan diri dari Masyumi dengan syarat sebagai berikut: (1) Pelaksanaan keputusan jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan umat Islam Indonesia, (2) Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan melalui perundingan dengan Masyumi, dan (3) Keputusan ini dijalankan dalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan membentuk Dewan Pimpinan Umat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, di mana partai-partai dan organisasi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama.

Selain itu, muktamar juga membentuk panitia terdiri dari 7 cabang, 3 di antaranya cabang yang disetujui kepada keputusan PBNU, 3 dari cabang yang kontra (tidak setuju) dan 1 cabang yang blanko. Panitia ini bersama dengan PBNU akan menentukan sikap: Apakah NU akan memproklamasikan menjadi partai politik atau tidak. Dan panitia ini akan bersidang menunggu hasil perundingan NU dengan Masyumi mengenai sikap tersebut. Ternyata, Masyumi tidak mau mendengarkan niat baik NU. Dan lahirlah **Partai Politik NU yang disponsori para kiai**.

Masih dalam Muktamar Palembang, NU memutuskan beberapa pokok pikiran yang erat hubungannya dengan politik: (1) Mendesak Pemerintah RI agar segera

mengadakan Pemilihan Umum, (2) Menyetujui kehendak Pemerintah RI untuk mengadakan penghematan dan membasmi pengeluaran yang tidak jujur, (3) Mendesak kepada pemerintah agar menggiatkan pendidikan Pancasila secara teratur dan bersungguh-sungguh, khususnya tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tampaknya kurang mendapat perhatian.

Dengan demikian, NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula ia hanya menitikberatkan orientasinya kepada soal-soal sosial dan keagamaan, maka, semenjak Muktamar Palembang NU menambah orientasi kepada masalah politik. AD-ART pun sudah tidak bernama *jam'iyah* lagi, tetapi sudah diubah menjadi AD-ART partai politik NU. Lapangan usahanya juga semakin membengkok kepada persoalan pertahanan keamanan, politik luar negeri dan dalam negeri, perburuhan dan persoalan sosial-budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tentu saja, tujuan untuk menumbuhkan masyarakat Islamiyah, tidak terlupakan. Meski sudah berubah dan tumbuh menjadi partai politik, pola organisasi NU masih tetap **pola organisasi *jam'iyah diniyah***, yakni **menempatkan ulama pada posisi sentral**. Dan mengenai keanggotaan pun masih juga dipertahankan, yakni **harus orang Indonesia yang beragama Islam dan berhaluan salah satu dari empat mazhab**. (Anam, 1999:245-246).

Muktamar NU ke-20 pada 8-13 September 1954 di Surabaya. Muktamar ini merupakan muktamar pertama semenjak NU menjadi partai politik. Secara tidak langsung, Muktamar Partai NU kali ini juga merupakan kerja konsolidasi untuk menghadapi pemilu mendatang.

Tentu saja segala perhatian diarahkan pada persoalan politik. Sebab pemilu yang akan berlangsung pada 29 September 1955 untuk anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante, merupakan momentum penting bagi mengukur potensi NU dan menentukan nasib dasar negara.

Tetapi, pada muktamar ke-20 itu, tata nilai NU sebagai *jam'iyah* belum banyak berubah. Muktamar masih juga membahas persoalan agama (*bahtsul masail*) yang berkembang pada masa itu. Salah satu persoalan agama yang menarik dalam pembahasan tersebut adalah hukumnya sandiwara menurut Islam. Muktamar memutuskan hukum sandiwara boleh, jika di dalam sandiwara itu tidak terdapat kemunkaran. Namun demikian, suasana muktamar sudah tidak sebagaimana lazimnya ketika NU masih berupa *Jam'iyah*. Sebab persoalan politik lebih mendapat perhatian peserta muktamar, ketimbang persoalan agama. Terlebih, Muktamar ke-20 itu tidak lagi ditunggu KH. A. Wahid Hasyim, tokoh politik terkemuka NU, karena pada tanggal 19 April 1953 beliau kembali ke Rahmatullah, dalam suatu kecelakaan mobil.

Walaupun telah ditinggalkan pemimpin terbaiknya, NU tetap gigih mengadakan propaganda demi kemenangan pemilu 1955. salah satu contoh kegigihan NU dalam berkampanye adalah melawan PKI ketika Partai Komunis itu hendak menggunakan tanda gambar “palu arit”, dengan tambahan kalimat “PKI dan orang-orang tak berpartai”. Idham Chalid dari NU yang bertugas sebagai jurubicara memprotes rencana PKI itu dan berhasil menggagalkannya. Dan DN. Aidit, Ketua CC PKI, pernah membujuk agar Idham mau menerima rencana tersebut, tapi Idham tetap menolaknya.

Kerja keras pemimpin NU tidaklah sia-sia. Hasil pemilu 1955 menunjukkan, NU berhasil keluar sebagai empat besar setelah Masyumi dan PNI. NU berhasil mendapatkan suara terbanyak 6.955.141 suara. Sehingga jumlah kursi di Parlemen yang semasa bergabung dengan Masyumi hanya 8 kursi, melonjak menjadi 45 kursi. Keberhasilan NU dalam pemilu 1955 bukan saja sekedar mengangkat prestise umat Islam dalam percaturan politik di Parlemen, tetapi juga di dalam kabinet. Di dalam Parlemen misalnya, partai-partai Islam telah menduduki 114 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan. Masyumi mendapat 57 kursi, NU mendapat 45 kursi, PSII mendapat 8 kursi, dan PERTI mendapat 4 kursi.

Sedangkan di dalam kabinet, dari 25 menteri yang diperebutkan, 13 di antaranya berhasil diduduki partai-partai Islam. Masyumi 5 orang menteri, PSII 2 orang menteri, PERTI seorang menteri dan NU mendudukkan 5 orang menteri. Jabatan menteri yang diduduki oleh NU adalah: Wakil Perdana Menteri (KH. Idham Chalid), Menteri Dalam Negeri (Sunaryo), Menteri Perekonomian (Burhanuddin Harahap), Menteri Sosial (KH. Fattah Yasin), dan Menteri Agama (KH. M. Ilyas).

Pastilah keberhasilan NU dalam posisi politik seperti itu tidak akan pernah terjadi, jikalau NU masih tetap berada di dalam Partai Masyumi. Dan keberhasilan ini juga merupakan bukti kebesaran massa NU yang, ketika masih berada di Masyumi, seringkali dipertanyakan. (Anam, 1999:250-252).

Muktamar NU ke-21 pada Desember 1956 di Medan, pembahasan masail diniyah sudah tidak lagi menjadi pembahasan utama. Masalah politik lebih mendapat perhatian serius dari peserta muktamar. Terlebih lagi, ketika itu, wakil-wakil rakyat

khususnya wakil dari NU sedang menghadapi perdebatan serius dalam Majelis Konstituante, yakni masalah dasar negara.

Hal ini bukan berarti *masail diniyah* sudah lenyap sama sekali dari suasana muktamar. Persoalan hukum agama tetap ada, tetapi yang dibahas justru persoalan LESBUMI yang diprakarsai oleh H. Djamaluddin Malik. Para ulama menyetujui berdirinya LESBUMI dengan maksud agar para 'Khattat' (penulis Arab halus) atau seni lukis dalam bentuk tulisan Arab yang indah, kaligrafi, dapat diorganisasi. Para ulama benar-benar berpikir untuk membatasi seniman dan budayawan sejauh yang masih dibolehkan oleh hukum Islam.

Tetapi apa yang terjadi sangat jauh di luar dugaan. Sementara para ulama dipimpin KH. Bishri Syansuri sibuk membahas hukumnya *mizmar* (seruling), biola, batas-batas tarian yang diperbolehkan agama, sementara itu pula anggota LESBUMI di Jakarta sibuk menyelesaikan film "Pagar Kawat Berduri". Di sinilah bermulanya tata nilai dalam NU tergusur secara perlahan-lahan. Selain itu, menurut Mahfoedz, Muktamar ke-21 di Medan juga telah membawa nilai yang sama sekali baru. Pembicaraan mulai menghangat pada persoalan calon Ketua Umum Tanfidziyah. Sebab peranan Tanfidziyah dalam mekanisme Partai NU sangat dominan, di banding dengan para Syuriyah. Mekanisme dimaksud adalah hubungan NU dengan pemerintah. Sehingga masalah calon Ketua Umum menjadi topik utama dalam muktamar tersebut.

Namun demikian, kriteria calon Ketua Umum PBNU selain harus mempunyai keterampilan di bidang politik maupun strategi, juga harus alim dan pandai ilmu agama Islam. Kehadiran Idham Chalid dalam muktamar ternyata tidak sia-sia. Sebab

selain ia juga diakui sebagai ulama intelektual NU, ketika itu menyandang sebagai Wakil Perdana Menteri dalam kabinet Ali-Roem-Idham, ia juga dikenal sebagai sosok yang alim. Maka terpilih lah Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU, dan Saifuddin Zuhri sebagai sekretarisnya. (Anam, 1999:254-255).

Muktamar NU ke-22 pada 14-18 Desember 1959 di Jakarta, Idham Chalid di depan muktamar perlu menjelaskan bahwa keadaan negara (kala itu) memerlukan kebijaksanaan dan cara yang banyak berbeda dari keadaan normal sebelumnya. Maksudnya, untuk menghadapi situasi di masa itu, diperlukan taktik dan strategi yang “serba baru”. Ukuran dan siasat lama tidak sesuai lagi dengan (atau untuk menghadapi) keadaan yang serba darurat. Sebab itu, NU sengaja tidak menyatakan sikap. “Tetapi bukan berarti NU tidak mempunyai sikap. Sebab partai, tentu saja mempunyai sikap, hanya tidak dinyatakan dan diumumkan.

Sikap defensif dipilih oleh NU dalam menghadapi keadaan setelah Dekrit Presiden, dimaksudkan untuk memudahkan masuknya NU dalam kabinet baru. Seperti diakui Idham Chalid sendiri, antara tanggal 5-9 Juli 1959 terjadi kegiatan kasak-kusuk di istana guna membentuk kabinet baru. Tiga kali Idham Chalid diajak berunding presiden tentang kabinet tersebut. Sekali pun pada mulanya terdapat tabir psikologi yang menghalangi NU untuk bisa masuk dalam kabinet, karena ada sementara golongan yang menuduh NU termasuk menentang kembalinya UUD 1945 dalam bidang konstituante, tetapi berkat penjelasan Idham Chalid, presiden bisa mengerti dan akan memberikan tempat bagi NU dalam kabinet baru yang akan dibentuk.

Namun optimisme Idham Chalid segera lenyap, ketika tiba-tiba presiden mengumumkan kabinet baru terdiri dari orang-orang yang tidak berpartai. Dan terbentuklah kabinet baru dengan nama Kabinet Kerja, yang sama sekali tidak menyentuh hasil rembukan Idham Chalid dengan presiden. Tetapi, karena watak NU yang tidak mudah protes, tidak oposan dan tidak pula merasa bagai suatu keharusan “memakan buah simalakama” bila menghadapi persoalan peliknya politik, maka kenyataan itu pun diterima NU dengan dada terbuka. Ternyata, sikap semacam itu, mampu mengundang perhatian presiden untuk mengikutsertakan anggota NU dalam kabinet yang akan dibentuk. KH. Wahib Wahab (yang kemudian diganti KH. Saifuddin Zuhri) dan KH. Fatah Yasin, keduanya dari NU, ditunjuk presiden masing-masing menduduki kursi Menteri Agama dan Menteri Penghubung Alim Ulama dalam Kabinet Kerja. Penunjukan itu disambut dengan tangan terbuka oleh NU. Tentu saja, kedudukan kementerian yang diberikan bukan semata mengandung pertimbangan politis belaka, melainkan lebih penting lagi karena pertimbangan agama. Sebab apabila NU menolak, mungkin sekali kedudukan kementerian agama itu akan diduduki orang lain yang akibatnya akan lebih merugikan cita-cita umat Islam *Ahussunnah wal jamaah*.

Beberapa hal yang perlu dicatat selama NU menduduki kementerian agama antara lain:

1. Tentang penyelenggaraan ibadah haji. Apabila kita sekarang mengenal penyelenggaraan ibadah haji dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam satu Yayasan Haji Indonesia, atau yang lebih terkenal dengan istilah Panitia

Haji Indonesia (PHI), maka itu adalah hasil rintisan Menteri Agama KH. A. Wahid Hasyim.

2. Pendirian Masjid Istiqlal yang saat ini merupakan simbol kemegahan Islam di Indonesia, adalah atas hasil usaha Menteri Agama KH. A. Wahid Hasyim di jaman Bung Karno, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Agama KH. Ilyas, dari NU.
3. Pendirian Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah hasil usaha Menteri Agama KH. Wahib Wahab.
4. Penerjemahan atau tafsir serta pencetakan Al-Qur'an oleh Departemen Agama, merupakan rintisan Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri.
5. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang sampai saat ini masih terus bergema, hasil usaha Menteri Agama KH. M. Dachlan.

Semua itu diusahakan NU di masa kabinet jatuh-bangun, di masa roda pemerintahan belum stabil, di masa revolusi kita belum selesai, dan pada situasi di mana intrik-intrik serta agitasi PKI terus berlangsung. (Anam, 1999:278-280).

Muktamar NU ke-23 pada 24-29 Desember 1962 di Surakarta (Sala), Presiden Soekarno berpidato tentang sumbangan besar NU bagi negara di depan *muktamirin* sebagai berikut:

"Baik ditinjau dari sudut agama, nasionalisme maupun sosialisme, NU memberi bantuan yang sebesar-besarnya.....malahan, ya memang benar, ini lho Pak Wahab ini bilang sama saya waktu di DPA dibicarakan: berunding apa tidak dengan Belanda mengenai Irian Barat, beliau mengatakan: Jangan Politik Keling. Ya bilang Pak Bandrio, katanya. Ketika itu saya katakan: nanti orang Keling marah lho, "Jangan Politik Keling". Atas advis anggota DPA yang bernama Kiai Wahab Hasbullah itu, maka kita menjalankan Trikora, dan Trikora berhasil saudara-saudara.....Pada 1 Oktober bendera Belanda

turun di Irian Barat diganti bendera U N T E A....Pada 31 Desember 1963 nanti, bendera satu-satunya di Irian Barat adalah Merah-Putih.

Dari sini kita dapat melihat tingkah laku politik NU setelah diberlakukannya Dekrit Presiden. Seperti telah dikemukakan bahwa ketika itu NU memilih sikap defensif atau diam. Tetapi sejarah telah mencatat, bahwa sikap diam NU ternyata menyebabkan PKI agak menemui kesulitan untuk melancarkan kemauannya politik. Dan disinilah perbedaan NU dengan gerakan Islam lainnya, khususnya dengan Masyumi. Dalam kondisi kritis saat itu, NU melihat dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Tetapi prinsip yang dipegang NU lebih baik menempuh bahaya yang kecil dengan resiko dituduh berangkuhan dengan PKI daripada resiko yang lebih besar, pembubaran partai. (Anam, 1999:285-286).

Muktamar NU ke-24 pada 3-9 Juli 1968 di Bandung, diselenggarakan ketika merosotnya peranan partai politik terutama NU, dan mantapnya Format politik baru ciptaan Soeharto. Munculnya Golkar sebagai sambungan tangan pemerintah dan mantapnya dwi fungsi ABRI dilembaga konstitusi, merupakan kekuatan raksasa yang senantiasa siap melayani perlawanan kekuatan demokrasi (partai-partai politik) dalam lembaga tersebut. Kalau tidak dikatakan akan memudahkan bagi sejumlah pemimpin partai untuk segera menyesuaikan diri kepusat-pusat kekuasaan.

Terlebih lagi, diserukannya keharusan “monoloyalitas” bagi Golongan Karya (GOLKAR). Praktis kekuatan sosial politik, khususnya NU, kehilangan sejumlah pemimpinnya baik yang berada di Departemen Agama (DEPAG) maupun didepartemen-departemen lain.

Kenyataan-kenyataan itu cukup membuat gentar partai NU. Sejumlah pemimpinnya tampak berhati-hati dan selalu mengendalikan diri dalam muktamar ini. Kekhawatiran akan diklasifikasikan sebagai “radikal” atau “keras”, benar-benar menyelimuti suasana muktamar. Pembahasan soal-soal politik akhirnya kurang mendapat tempat, sebaliknya masalah pemilihan ketua (pemimpin NU) justru menjadi topik utama.

Subchan mengemukakan, muktamar Bandung tidak lebih dari arena pemilihan kepala desa. Kalau kepala desa sudah terpilih, tidak perlu lagi susah payah membahas program. Karena itu, Subchan tidak segan-segan menyalahkan PBNU kurang memberikan perangsang kepada *muktamirin* untuk berdiskusi, bermuyawarah secara mendalam. Pengurus Besar hanya dihindangi momok menakutkan yang, jika membicarakan masalah-masalah politik tidak perlu dibicarakan dan akhirnya didiamkan saja. (Anam, 1999:308-309).

Muktamar NU ke-25 pada 20-25 Desember 1971 di Surabaya, keinginan Subchan untuk mengubah citra NU hampir berhasil melalui muktamar Surabaya ini. Sebagian *muktamirin* mengharapkan menjadi Ketua Umum PBNU. Ketika sidang akan melakukan pemilihan secara demokratis, tiba-tiba ditunda karena KH. Bishri Syansuri mengeluarkan pernyataan tidak bersedia duduk bersama Subchan di PBNU. Namun Subchan tidak kehilangan akal. Ia meminta agar diadakan konsensus yang diaktamasikan lewat ikrar, dan Subchan bersedia mengundurkan diri dihadapan muktamar. Ternyata, ikrar Subchan ditolak *muktamirin*. Ini berarti, massa NU masih menghendaki Subchan untuk menjadi orang pertama di NU. Dan berarti pula, Subchan merupakan manifestasi kemauan dan sikap politik warga NU. Pertentangan

antara kelompok Idham dan kelompok Subchan, mulai menemukan bentuknya. (Anam, 1999:314-315).

Muktamar NU ke-26 pada 6-11 Juni 1979 di Gedung PHI Semarang, Jawa Tengah, untuk memantapkan kembali eksistensi NU. Ada tiga masalah pokok yang menjadi perhatian di dalam muktamar tersebut. (1) Perubahan AD/ART NU dari parpol menjadi *jam'iyah diniyah*, (2) Perumusan program pengembangan lima tahun NU, dan (3) Pemilihan pengurus baru *jam'iyah* NU. (Anam, 1999:324). Dari tiga pokok bahasan di dalam muktamar tersebut, satu diantaranya yang cukup berhasil, adalah memantapkan kembali eksistensi NU sebagai *jam'iyah diniyah* organisasi sosial keagamaan. Ini terlihat dari terumuskannya program dasar pengembangan lima tahun NU, yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan kerja NU sebagai organisasi sosial keagamaan. (Anam, 1999:324).

Menurut Mustofa Bisri (Gus Mus), ketika berlangsung Muktamar NU ke-26 di Semarang, saya termasuk penggembira. Pada waktu itu, seperti pada umumnya muktamar-muktamar atau konferensi-konferensi, isu yang ramai bukanlah soal apa program lima tahun ke depan, tapi soal siapa yang akan dipilih menjadi ketua umum. Hampir semua orang, kata A. Mustofa Bisri, sampai saat ini menyangka bahwa orang pertama di NU adalah Ketua Umum. Padahal, sebenarnya orang pertama di NU adalah *Rais Aam*. Isu mengenai Ketua Umum itu menjadi ramai karena ada isu Pak Idham Chalid, yang berperiode-periode terus menjadi Ketua Umum, menyatakan mundur pada muktamar ini. Termasuk yang menganggap hal itu bukan sekedar isu ialah tokoh-tokoh NU nasional, seperti Pak Achmad Syaichu dan Pak Zamroni *Allah yarhamhuma*. (Jawa Pos, *Sumpah*, 27 Oktober 2002, hal.1 dan 19).

Muktamar NU ke-27 pada 8-12 Desember 1984 di Situbondo, menunjukkan telah terjadi rekonsiliasi NU dengan rejim Orde Baru dan menandai munculnya elit baru di pucuk pimpinan NU. Keputusan menarik diri dari partai politik praktis, yang ternyata lebih serupa dengan keputusan Muhammadiyah lebih dari satu dasawarsa sebelumnya untuk tidak mendukung Masyumi dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal NU tidak diragukan lagi, paling tidak sebagai respon terhadap tekanan politik dari luar. Namun, keputusan tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pandangan tentang apa yang harus diperjuangkan NU, kepentingan para pendukung yang mana yang harus dibela, dan bagaimana hal itu harus dilaksanakan. Diklaim bahwa pandangan ini identik dengan pandangan asli para pendiri NU, yang telah ditinggalkan NU ketika ia menjadi partai politik, yang mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas pendidikan dan sosial lainnya. Pandangan ini kemudian disebut sebagai *Khittah*, atau pola dasar berpikir dan bertindak, 1926. (Bruinessen, 1999:115).

Muktamar NU ke-28 pada 25-28 Nopember 1989 di Yogyakarta, tidak ada keputusan penting yang diambil dalam muktamar kali ini. Muktamar ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi pengaruh keputusan Situbondo dan kinerja PBNU yang dipilih pada 1984. Hasil penilaian mengenai keduanya tampaknya positif, sejumlah besar utusan menilai bahwa pemisahan diri dari PPP telah berjalan dengan baik dan mendukung interpretasi Abdurrahman Wahid tentang keputusan kembali ke *khittah* 1926. Duet Shiddiq-Wahid terpilih kembali dan dukungan atas program pembaruan mereka semakin kuat, komposisi pengurus baru lebih kohesif, sehingga lebih memungkinkan terlaksananya program tersebut. Dengan demikian, muktamar

ini memperlihatkan langkah penting ke arah konsolidasi kebijakan-kebijakan NU yang baru dan memperkokoh persatuan. (Bruinessen, 1999:181).

Muktamar NU ke-29 pada 1-5 Desember 1994 di Cipasung-Tasikmalaya-Singaparna-Jawa Barat, selain membahas masalah-masalah aktual yang menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: Bidang Agama, Politik, Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Sumber Daya Manusia, dan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup. (Hasil-hasil Muktamar NU ke-29, 1994:201-216).

Disamping itu, dalam Muktamar Cipasung ini, terdapat wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam pandangan Nahdlatul Ulama yaitu:

1. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan "realitas kehidupan" yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanat-Nya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.
2. Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafan yang lebih besar, yang menyangkut "kehidupan bersama" seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.

3. Dalam kaitan itu, Kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ke-Tuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (umara') dan ulama, sebagai pengemban amanat kekhilafahan serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.
4. Umaro dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanat-Nya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. An-Nisa':59) yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut:

- a. Bahwa ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak.
- b. Bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan bergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

- c. Bahwa ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang yang mengemban amanat Allah SWT.
- d. Bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap ulil amri dengan menggunakan cara-cara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq r.a dalam khutbah pelantikannya:

“Wahai saudara-saudara. Saya telah dipilih menjadi pemimpin kalian, padahal saya bukanlah orang terbaik di antara kalian, kalau saya berbuat baik (benar), maka dukunglah dan bantulah saya. Kalau saya berbuat salah, maka luruskanlah saya. Kebenaran (kejujuran) adalah amanat (yang harus dilaksanakan dan kedustaan adalah pengkhianatan yang harus dihindari). Orang lemah di antara kalian saya pandang sebagai orang kuat dan akan saya berikan haknya (yang belum didapatnya) dan orang yang kuat di antara kalian saya pandang sebagai orang lemah dan akan saya ambil “hak” dari mereka (untuk diserahkan kepada yang sebenarnya berhak). Insya Allah jangan ada seorangpun diantara kita meninggalkan jihad (perjuangan) karena tidak ada kelompok yang meninggalkan jihad kecuali mereka akan tertimpa kehinaan dari Allah. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban taat kepada saya. Demikianlah, bergegaslah melakukan shalat. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian.”

- e. Kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasulnya.
- f. Bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau ulil amri, agar dapat memberikan keputusan yang adil. (Hasil-hasil Mukhtamar NU ke-29, 1994:24-27).

Begitu juga pada Mukhtamar ke-29 di Cipasung tahun 1994 ini, NU semakin mempertegas diri sebagai kekuatan *Civil Society*, berhasil lolos dari cengkeraman kekuatan otoriter rezim Orde Baru, dengan tampilnya kembali untuk ketigakalinya

Abdurrahman Wahid sebagai Ketua PBNU, setelah secara susah payah mengalahkan Abu Hasan yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru, kata Moh. Adnan (Skripsi, 2000:52).

Sedangkan *Muktamar NU ke-30* pada 21-26 November 1999 di Lirboyo-Kediri-Jatim, merekomendasikan bahwa program kerja NU harus berorientasi kepada terwujudnya kemandirian (baik secara *jamaah* maupun *jam'iyah*) yang selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan Fatah Yasin. (Duta Masyarakat, *Kado untuk Pengurus Baru PWNU Jawa Timur*, 16 Oktober 2002, hal. 4).

Muktamar NU ke-30 yang lalu, tidak saja sebagai perhelatan akbar lima tahun sekali bagi seluruh utusan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU di seluruh Indonesia. Namun juga merupakan kegiatan internal sebuah organisasi yang sangat mungkin paling banyak menyedot perhatian insan pers atau media massa dalam dan luar negeri selama tahun 1999.

Banyak faktor yang membuat perhatian hampir seluruh komponen bangsa ini seolah terfokus pada Muktamar tersebut. Salah satu diantaranya adalah, NU identik dengan 30-40 juta umatnya yang belajar di pondok pesantren-pondok pesantren, pengusaha kecil-menengah, dan petani di pedesaan, terutama di Pulau Jawa. Dengan demikian, NU terlalu besar untuk diabaikan begitu saja oleh pemerintah, dan juga kekuatan sosial politik manapun yang berkeinginan mempunyai massa di lapisan masyarakat bawah.

Sejumlah tokoh dan pengamat politik nasional dan internasional pun seolah tidak mau ketinggalan. Ada yang memantaunya melalui laporan media massa. Ada pula yang meluangkan waktunya datang ke Lirboyo, di antaranya; Nurcholish

Madjid, Fachry Ali, Mohammad Sobary, Katjung Maridjan, Mitsuo Nakamura, Andre Fiellard, dan masih banyak lagi. Menurut beberapa tajuk media massa, mereka tertarik mengamati Muktamar NU ke-30, minimal karena dua alasan. *Pertama*, keterkaitan NU dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang menduduki lembaga kepresidenan dalam suasana negara sedang dilanda multikrisis, justru masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. *Kedua*, proses demokratis ala NU yang mengedepankan etika moral dibanding kepentingan individu, di dalam memilih sosok pimpinannya, baik Rais Aam, Wakil Rais Aam, maupun Ketua Umum (*Tanfidziyah*) PBNU.

Dengan runtuhnya Orde Baru dan berganti dengan Orde Reformasi hasil pemilu 1999, dapat dipandang sebagai peluang untuk melakukan perubahan-perubahan disegala bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya maupun perubahan sistem sosial baru ke arah yang lebih adil dan demokratis. Namun harus disadari sejak awal bahwa setiap perubahan selain menghadapi tantangan baru, juga menghasilkan efek negatif. Kita menyadari bahwa perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi merupakan perubahan pemerintahan yang dipaksa oleh desakan rakyat, yang memberi pelajaran berharga dengan luar biasa mahalanya biaya-biaya dan korban yang harus dibayar baik secara sosial, politik, ekonomi, moral, dan hubungan internasional.

Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan (*al-hurriyyah*), keadilan (*al-'adalah*), demokrasi (*asy-syura*), dan kesamaan posisi (*al-musawa*), dan nilai toleransi (*at-tasamuh*), yang dijunjung tinggi dalam perjuangan dan kiprah Nahdlatul Ulama serta dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, maka Muktamar NU

ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim sebagai forum permusyawaratan tertinggi *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama menyumbangkan gagasan dan usulan dalam rangka pembaharuan Indonesia mendatang sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan, belajar dari pengalaman.
2. Pembangunan sistem politik dan kesatuan nasional.
3. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
4. Hak asasi manusia dan penegakan hukum.
5. Pembangunan ekonomi.
6. Pendidikan.
7. Agama.
8. Pembangunan sistem pertanian dan pemberdayaan petani-nelayan.
9. Pelestarian lingkungan.
10. Hubungan luar negeri.
11. Penanganan konflik sosial dan pengungsi.
12. Masalah buruh dan penyediaan lapangan pekerjaan.
13. Masalah narkoba, judi, prostitusi dan penyakit sosial lainnya.
14. Kesetaraan gender.
15. Kesehatan.
16. Waqaf. (Hasil-hasil Muktamar NU ke-30, 1999:64-99).

Dan pada Muktamar NU ke-30 ini, beredar isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim Muzadi yakni saat menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU, seperti tidak adanya nasab kiai. Isu-isu inilah yang menarik penulis untuk melakukan "*Studi*

*Tentang Terpilihnya KH. A. Hasyim Muzadi Sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004
Pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.*





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian ini, akan dikemukakan tentang fokus penelitian, jenis dan metode penelitian, paradigma, jenis pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim pada tanggal 21-26 Nopember 1999 M (13-18 Sya'ban 1420 H).

Terpilihnya *Hasyim Muzadi* ini sangat menarik untuk diteliti, pada saat menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004, beredar isu-isu yang melemahkan posisi Hasyim Muzadi, yakni tidak adanya nasab kiai.

Tetapi, isu-isu tersebut terbukti tidak cukup kuat mempengaruhi cabang-cabang dan wilayah untuk tetap memberikan dukungannya kepada Hasyim Muzadi.

3.2. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisa data sekunder. Menurut Singarimbun (1989: 11-12), analisa data sekunder adalah jenis penelitian yang sudah tersedia data yang dapat digunakan. Data tersebut mungkin hasil survai yang belum diperas dan analisa lanjutan dapat menghasilkan sesuatu yang amat berguna. Juga dapat berupa studi perbandingan dari studi-studi yang telah dilakukan.

Data dalam penelitian ini, dikumpulkan penulis melalui majalah Aula, koran Jawa Pos, Kompas, Surya, Radar Kediri pada 21-27 Nopember 1999, buku Hasyim Muzadi membangun NU pasca Gus Dur, serta buku analisa dan evaluasi pemberitaan tentang Hasyim Muzadi pada suara pembaruan Nopember 1999-Nopember 2000.

Keuntungan dari pemanfaatan data yang tersedia adalah bahwa: peneliti tidak terlibat lagi dalam mengusahakan dana untuk penelitian lapangan, merekrut dan melatih pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis terhadap *terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim*.

Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan subjek dalam penelitian ini sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. (Julia Brannen, 2002:11).

Penelitian kualitatif biasanya menekankan observatif partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001:134). Karena pertimbangan efisiensi, biaya, waktu dan tenaga yang dimiliki, penelitian ini menetapkan pengumpulan data disesuaikan dengan persoalan, paradigma, teori dan metodologi, maka dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan *wawancara mendalam dan studi dokumentasi*.

3.3. Paradigma

Menurut Ritzer (1992:8), paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*).

Paradigma ini membantu penulis dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma **definisi sosial**. Paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*sosial action*).

Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma definisi sosial ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesis Weber adalah "*tindakan yang penuh arti*" dari individu. Yang dimaksudkannya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. *Pertama*, konsep tindakan sosial. *Kedua*, konsep

tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. (Ritzer, 1992:44).

Dengan demikian yang menjadi sasaran pokok dalam penelitian ini adalah:

- a. Tindakan Hasyim Muzadi yang mengandung makna subjektif, meliputi beberapa tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata Hasyim Muzadi yang bersifat batiniah dan bersifat subjektif.
- c. Tindakan Hasyim Muzadi yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, atau tindakan yang sengaja diulang.
- d. Tindakan Hasyim Muzadi yang diarahkan kepada seseorang atau kepada individu (kandidat Ketua Umum PBNU yang lain).
- e. Tindakan Hasyim Muzadi itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain (kandidat Ketua Umum PBNU yang lain).

3.4. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Alfred Schutz sebagai salah satu tokoh teori ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. (Ritzer, 1992:69).

Ada empat unsur pokok dari teori ini yakni: *Pertama*, perhatian terhadap aktor. *Kedua*, memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). *Ketiga*, memusatkan perhatian kepada masalah mikro. *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan

dan proses tindakan dalam terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

3.5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, meliputi aspek kultural NU (kiai khos) dan aspek struktural NU (PWNU) yang mengikuti Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim baik dari pihak yang pro, kontra dan yang netral kepada Hasyim Muzadi menurut pertimbangan masing-masing.

Pertama, subjek yang pro Hasyim Muzadi yakni, **Choirul Anam** (tim sukses Hasyim Muzadi), **Ali Maschan Moesa** (wakil dari PWNU Jatim pada saat muktamar), **Hasan Usman** (Ketua PWNU NTB), **Parondo Rusli** (Ketua PWNU Sulut), **Ahmad Jayadi** (Ketua PWNU Bali) mendukung duet tokoh asal Pati-Malang, karena mampu melaksanakan ide-ide Gus Dur yang selama kepemimpinannya masih dalam tataran gagasan. (Surya, 7 *PWNU Kuatkan Hasyim-Sahal*, 23 November 1999, hal. 16).

Kedua, subjek yang kontra Hasyim Muzadi yakni, **Yusuf Hasim** (Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang) menyatakan bahwa ketua umum PBNU 1999-2004 harus pernah menjadi pengurus harian PBNU (Jawa Pos, *Pak Ud Ganjal Hasyim Muzadi*, 21 November 1999, hal. 1), **Muslim Rifai Imam Puro** (Pimpinan Ponpes Al-Muttaqin Pancasila-Klaten) menyatakan bahwa ketua umum PBNU 1999-2004 harus orang yang pandai dan memiliki tingkat kesarjanaan minimal S-2 (Jawa Pos, *Hasyim Muzadi Belum Aman, Kans Tetap Sama*, 21 November 1999, hal. 3), **Munasir Huda** (Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU)) menyatakan

bahwa Hasyim Muzadi lebih menonjol sikap politisnya daripada sikap kulturalnya. Hal itu ditunjukkan dengan manuver-manuvernya yang sering tidak sesuai dengan kultur NU (Surya, *GMNU Bentuk PBNU Tandingan*, 27 November 1999, hal. 16).

Ketiga, subjek yang netral terhadap pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim yakni, **Abdurrahman Wahid (Gus Dur)** (Presiden RI pada saat Muktamar NU ke-30 dan mantan Ketua Umum PBNU), **Kiai Idris Marzuki** (Pengasuh Ponpes Lirboyo-Kediri-Jatim), dan **Kiai Abdullah Fakhri** (Pengasuh Ponpes Langitan-Tuban-Jatim) menyerahkan sepenuhnya kepada *muktamirin* (peserta muktamar), sebab kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang bermunculan di Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, seperti Said Aqiel Siradj, Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Mustofa Bisri, Ahmad Bagja semuanya merupakan kader-kader terbaik NU (elKapim, 2000:31).

Sebagaimana dikatakan di atas, *informan kunci* dalam penelitian ini selain subjek utama **Hasyim Muzadi**, juga **Choirul Anam**, **Ali Maschan Moesa**, **Hasan Usman** (Ketua PWNU NTB), **Parondo Rusli**, **Ahmad Jayadi**, **Yusuf Hasim** (Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang), **Muslim Rifai Imam Puro** (Pimpinan Ponpes Al-Muttaqin Pancasila-Klaten), **Munasir Huda** (Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU)), **Abdurrahman Wahid** (Presiden RI pada saat Muktamar NU ke-30 dan mantan ketua PBNU), **Idris Marzuki** (Pengasuh Ponpes Lirboyo-Kediri-Jatim), dan **Abdullah Fakhri** (Pengasuh Ponpes Langitan-Tuban-Jatim).

Subjek penelitian ini, diketahui peneliti setelah melalui analisa data sekunder, yang kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ali Maschan

Moesa (Ketua PWNU Jawa Timur) pada Rabu, 20 Nopember 2002 Pukul: 06.00-07.00 WIB di rumahnya, sehingga peneliti mendapat informasi banyak tentang siapa saja yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dokumentasi dan wawancara mendalam yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data sekunder mengenai mengapa Hasyim Muzadi terpilih sebagai Ketua PBNU 1999-2004.

Sedangkan penggunaan wawancara mendalam (*dept interview*) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subjek penelitian dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, dengan pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan kepentingan penelitian.

Selanjutnya, tahap penulisan laporan penelitian yang berwujud sebuah tesis ini, berkesesuaian dengan tahapan penelitian yang ditawarkan Kirk dan Miller (1986:60), yang membagi menjadi 4 (empat) langkah, yaitu: *invention*, *discovery*, *interpretation*, dan *explanation*.

Tahap pertama, *invention* merupakan suatu langkah dimana dalam penelitian ini disain penelitian ditetapkan. Tahap ini digunakan untuk melaksanakan observasi secara menyeluruh terhadap fakta sosial yang akan diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu dan fakta lapangan yang akan

dikaji untuk mendapatkan fokus penelitian ini. Melalui penentuan fokus pada penelitian ini, maka diharapkan permasalahan yang diteliti lebih mendalam, alami, holistik dan sistemik.

Selanjutnya peneliti menggunakan dua cara untuk melakukannya, yaitu *pertama*, melalui studi kepustakaan untuk memperoleh ketajaman persoalan yang diteliti. Studi-studi terdahulu tentang NU dikaji ulang, dalam rangka menentukan apakah permasalahan penelitian ini layak diteliti atau tidak. *Kedua*, wawancara dengan **Hasyim Muzadi** (Kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dan Ketua Umum PBNU 1999-2004 terpilih), **Ali Maschan Moesa** (wakil dari PWNU Jatim pada saat Muktamar NU ke-30), dan **Said Aqiel Siradj** (Kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada saat Muktamar NU ke-30).

Tahap kedua, *discovery* dan *interpretation*, merupakan suatu langkah dimana dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat peneliti melaksanakan tahapan lapangan dimana keduanya dilaksanakan secara simultan, karena pada dasarnya keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikotomik. Bahwa data yang didapat langsung segera dianalisis.

Untuk menemukan data lapangan akan dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri. Sedangkan untuk mempermudah pencapaian teknik ini, penelitian mendasarkan pada daftar-daftar pertanyaan yang sudah disusun pada sub babasan teknik pengumpulan data dan analisis data.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Seperti hasil-hasil Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, aktifitas-aktifitas Hasyim Muzadi sebelum menjadi ketua Umum PBNU. Teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Tahap ketiga, *interpretation*, merupakan tahap membandingkan temuan data lapangan dengan teori-teori relevan dan berkaitan dengan fokus permasalahan yang dibahas penelitian ini. Untuk itu, teori sebagaimana dikemukakan di atas, ada dua kemungkinan bahwa temuan lapangan hanya merupakan sumbangan teoritik yang berada dalam khazanah teori yang sudah ada atau ada kemungkinan temuan lapangan akan menyumbangkan teori baru dari teori yang sudah ada.

Tahap keempat, *explanation*, yaitu tahapan pelaporan data hasil penelitian yang berwujud dalam bentuk tulisan dan mengkonstruksi secara tekstual fenomena terpilihnya Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Data-data yang diperoleh melalui keempat tahap tersebut, kemudian dianalisis secara saling berhubungan untuk mendapatkan dugaan sementara, sebagai landasan mengumpulkan data berikutnya, kemudian dikonfirmasi kepada informan secara terus menerus dan berlangsung secara simultan. Dugaan sementara yang telah mendapatkan persetujuan informan dikatakan valid maka akan dikemas menjadi

sebuah temuan penelitian, sedangkan yang ditolak oleh mereka ditinggalkan. Kesimpulan akhir itulah yang ditentukan sebagai temuan lapangan.

Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh, maka prosedur yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan kepada tawaran Lexy j. Moloeng (1990:173) dan S Nasution (1998:111-112) yang terdiri dari empat kriteria, yaitu *Credibility* atau derajat kepercayaan yang merupakan cara sedapat mungkin mengikutsertakan informan untuk mendiskusikan data yang ditemukan atau juga dapat pula dengan *cross check* terhadap pengumpulann data yang dilakukan. kriteria kredibilitas terhadap data dalam penelitian ini diwujudkan dengan cara berdialog atas hasil interpretasi peneliti dengan Hasyim Muzadi (Kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 dan Ketua Umum PBNU 1999-2004 terpilih), Ali Maschan Moesa (wakil dari PWNU Jatim pada saat Muktamar NU ke-30), dan Said Aqiel Siradj (Kandidat kuat Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada saat Muktamar NU ke-30) yang menjadi informan dalam penelitian ini, dengan fokus pertanyaan sejauhmana informan merasakan bahwa data tersebut telah sesuai dengan apa yang mereka rasakan.

Kemudian *transferability* atau keteralihan yang merupakan upaya melakukan perbandingan dengan kasus yang diduga memiliki kesamaan dengan fokus penelitian, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu maupun fokus lain yang sesuai dengan temuan lapangan dalam penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis terhadap terpilihnya Ali Maschan Moesa dalam konferwil NU Jatim ke-17 tanggal 4-6 Sya'ban 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 11-13 Oktober 2002 M.

Untuk membandingkan data temuan tersebut. Selanjutnya adalah *dependability* atau ketergantungan yang dilaksanakan dengan cara melakukan check

ulang temuan data dengan cara melihat setting sosial yang sama pada kepemimpinan NU. *Conformity* atau kepastian yang dilakukan dengan cara *cross check* dengan sumber data dan data yang diperoleh dan didiskusikan dengan para ahli yang memiliki wawasan, baik wawasan teoritik maupun lapangan.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini, dilaksanakan sesuai dengan cara yang dilakukan Nasution (1988:128-130), yaitu reduksi data, sajian data dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan data ke dalam konsep-konsep dan ciri-ciri yang melekat padanya atau disebut sebagai analisis domain. Konsep-konsep yang akan digunakan yaitu: *pertama*, mengapa Hasyim Muzadi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004. *Kedua*, seputar Muktamar NU Ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Adapun data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Mengapa Hasyim Muzadi bukan nasab kiai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri.
2. Bagaimana gambaran kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004.
3. Bagaimana misi dan visi kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004.
4. Prestasi apa saja yang dimiliki Hasyim Muzadi sehingga terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004.
5. Bagaimana tindakan-tindakan dan upaya yang dilakukan Hasyim Muzadi sehingga terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004.
6. Bagaimana tindakan-tindakan dan upaya yang dilakukan tim sukses Hasyim Muzadi sehingga Hasyim Muzadi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004.

7. Apa pertimbangan *muktamirin* (peserta Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim) tentang kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004.
8. Bagaimana persepsi *muktamirin* (peserta Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim) tentang Hasyim Muzadi.
9. Bagaimana Biografi Hasyim Muzadi.
10. Isu-isu yang berkembang pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.
11. Bagaimana tindakan-tindakan dan upaya yang dilakukan masing-masing antar kandidat dalam mencapai posisi Ketua Umum PBNU 1999-2004.
12. Hasil-hasil Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo-Kediri Jawa Timur.
13. Pedoman organisasi dan administrasi Nahdlatul Ulama.
14. Susunan personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 1999-2004.

Data atau informasi tersebut di atas, dikumpulkan penulis melalui majalah *Aula*, koran *Jawa Pos*, *Kompas*, *Surya*, *Radar Kediri* pada 21-27 Nopember 1999, buku Hasyim Muzadi membangun NU pasca Gus Dur, buku analisa dan evaluasi pemberitaan tentang Hasyim Muzadi pada suara pembaruan Nopember 1999-Nopember 2000, serta melalui wawancara penulis dengan Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj. Kemudian data atau informasi tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi yang terperinci, lalu disimpulkan atau dirapatkan sebagai temuan lapangan dan melalui konfirmasi dengan teori yang relevan, maka akan diperoleh temuan teoritis.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, dilakukan setelah data-data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Kemudian data-data tersebut, dianalisis secara saling berhubungan untuk mendapatkan dugaan sementara, yang dipakai dasar untuk mengumpulkan data berikutnya, lalu dikonfirmasi dengan informan secara terus-menerus secara triangulasi. Kesimpulan yang benar dan mendapat persetujuan dari informan dipertahankan, sedangkan yang ditolak informan ditinggalkan. Kesimpulan akhir itulah yang ditentukan sebagai lapangan.





BAB IV
SEPUTAR MUKTAMAR NU KE-30
DI LIRBOYO JATIM

BAB IV

SEPUTAR MUKTAMAR NU KE-30 DI LIRBOYO-KEDIRI-JATIM

4.1. Muktamar Lirboyo: Muktamar Fenomenal

Muktamar NU ke-30 dibuka presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in Lirboyo-Kediri-Jatim berlangsung seru. Selain akan dijadikan ajang syukuran atas terpilihnya Gus Dur sebagai presiden RI keempat, acara tersebut akan digunakan para kandidat untuk bertarung keras memperebutkan jabatan ketua umum PBNU.

Seperti biasanya, acara Muktamar NU selalu menjadi sebuah perhelatan akbar bagi seluruh jamaah NU. Sejak tanggal 20 Nopember 1999 (sebelum pelaksanaan Muktamar NU ke-30) dibuka, ribuan warga NU dari berbagai daerah berangkat ke Kediri. Kota inipun menjadi penuh sesak oleh para santri.

Sebagian besar utusan dari cabang-cabang seluruh Indonesia juga sudah memasuki arena muktamar. Masing-masing sudah mempunyai jago ketua umum yang bakal menggantikan Gus Dur. Ada yang menjagokan Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj, Mustofa Bisri, Salahuddin Wahid.

Keempat nama tersebut bakal bersaing ketat memperebutkan jabatan Ketua Umum PBNU yang amat strategis itu. Hal itu lantaran sang ketua umum (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI. Inilah pertama kali NU yang mempunyai massa paling besar di Indonesia memimpin negara.

Meskipun pada pemilu 1955 NU pernah menjadi empat besar, selama pemerintahan Soeharto, NU selalu dimarjinalkan. Tidak sedikitpun NU diberi

kesempatan bergabung di kabinet. Bahkan pada saat Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Gus Dur ditekan habis-habisan agar tidak terpilih kembali.

Tekanan demi tekanan tersebut, menurut Douglas Ramage dalam bukunya *Politics in Indonesia*, justru memperkuat posisi Gus Dur. Tokoh kontroversial ini malah semakin populer di dunia dan selalu menjadi objek penelitian sebagai pelopor demokratisasi di Indonesia.

Pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim, tidak ada tekanan dari pemerintah atau pihak mana pun. Para Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 akan mempunyai peluang yang sama untuk berkampanye mencari dukungan. Bahkan, Gus Dur menegaskan tidak mencampuri Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. (*Jawa Pos, Mbah Lim Restui Said, Salahuddin Kuda Hitam*, 21 Nopember 1999, hal. 1).

Sementara itu, persiapan pembukaan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim yang telah dilakukan panitia muktamar, hampir 100 persen siap. Mulai pengamanan yang diserahkan kepada sekitar 20 ribu Banser, arena pembukaan, akomodasi, *press room* dengan 50 komputer, 500 MCK, serta fasilitas lainnya. Bahkan, Pangdam V/Brawijaya yang baru pada saat muktamar, Mayjen Sudi Silalahi juga sempat meninjau arena muktamar. Ia sempat menanyakan podium yang akan dijadikan tempat pidato presiden.

Selain aula yang akan dijadikan arena muktamar, panitia menambah kursi beserta tenda disekeliling aula. Di pintu gerbang, terpampang dua mobil bercorak masjid sebagai pintu masuk. Sebuah mobil berisi sebuah tasbih besar, satunya lagi berisi Al-Qur'an besar tulisan tangan. Sedangkan di aula dekat podium terpampang

sebuah beduk besar berdiameter dua meter lebih yang rencananya digunakan untuk tanda pembukaan muktamar. (Jawa Pos, *Jalan Ke Lokasi Muktamar Mulai Macet*, 21 Nopember 1999, hal. 2).

Pembukaan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim pada 21 Nopember 1999, berlangsung meriah dan istimewa. Selain Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wapres Megawati Soekarnoputri, perhelatan akbar yang dihadiri ratusan ribu warga NU (*nahdliyyin*) ini juga dihadiri sejumlah pemimpin parpol dan ormas, para duta besar, serta puluhan pejabat sipil dan militer.

Wapres Megawati Soekarnoputri yang dijadwalkan menutup Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim pada 27 Nopember 1999 juga ikut hadir. Ia didampingi suaminya, Taufik Kiemas. Tampak juga diantara *muktamirin*, ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djaliil, Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua PP Muhammadiyah A. Syafi'i Ma'arif, dan Ketua Umum PB IIMI Anas Urbaningrum.

Inilah perhelatan akbar warga NU (*nahdliyyin*) dihadiri puluhan pejabat dan mendapat sambutan luar biasa dari para tokoh di luar NU. Tampaknya, ini terkait dengan naiknya Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke-4. suasana meriah tidak hanya tampak diarena muktamar. Di luar pun, massa menyemut sejak dini hari. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa.

Hadir pula beberapa menteri kabinet Persatuan Nasional, antara lain Menag Tholhah Hasan, Menko Polkam Jenderal (Pur) TNI Wiranto, Mendagri Surjadi Soedirja, Menlu Alwi Sihab, Menristek A.S. Hikam, Menperta Khofifah

Indarparawansa, dan Menteri Pertanian Nur Mahmudi. (Jawa Pos, *Mega Klayu, Amien Lupa Disebut*, 22 Nopember 1999, hal. 1).

Beberapa pengamat politik dari dalam dan luar negeri juga hadir antara lain Laode Ida (pengamat politik), Fachry Ali (Pengamat politik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Kacung Maridjan (pengamat NU dan Dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya), Andree Feillard (Ahli NU asal Perancis), Mitsuo Nakamura (pengamat NU asal Jepang).

Semaraknya Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim ini, maka dalam penelitian ini penulis memberikan atribut kepada muktamar Lirboyo sebagai muktamar yang fenomenal.

Agenda dan persoalan nasional yang pelik, seperti kasus Aceh, pengadilan mantan Presiden Soeharto, dwifungsi TNI/Polri, pelanggaran HAM, otonomi daerah, hingga masalah politik memberikan beban tersendiri bagi Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri. Karena itu, tidak heran kalau banyak pihak berharap NU akan memberikan alternatif penyelesaian bagi persoalan disintegrasi bangsa. NU sebagai organisasi keagamaan yang besar dan miniatur Indonesia minimal diharapkan bisa menjadi perekat bangsa kembali. Bangsa yang semakin rapuh dan destruktif akibat runtuhnya otoritarian diharapkan bisa dicarikan alternatif di Kediri kali ini. Karena itu, ada tiga hal yang menyebabkan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri menjadi penting. *Pertama*, terjadi perubahan sistem politik Indonesia dari Soeharto ke Habibie dan ke Gus Dur. Perubahan sistem politik itu membawa konsekuensi pergeseran kekuatan politik pula. *Kedua*, NU telah memberi arti besar bagi perolehan suara PKB dalam pemilu 1999. *Ketiga*, Gus Dur menjadi presiden. Faktor ini memberi arti besar

bagi warga NU (*nahdliyyin*). Faktor ini bisa berpengaruh bagi prospek politik NU, pengembangan dakwah dan pendidikan NU mendatang.

Ketiga hal itu secara politis memberi warna Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri. Di samping itu, Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri merumuskan lebih konkret tentang hubungan NU dengan politik, terutama dalam pemilu. Dalam Kasus pemilu 1999, terasa sekali NU kurang adil terhadap warga NU (*nahdliyyin*) lainnya di luar PKB. Karena itu, tuntutan keadilan dan kejelasan hubungan NU dengan politik semakin kuat.

Lebih dari itu semua, Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim menjadi salah satu harapan masyarakat untuk memberi jalan keluar bagi ancaman disintegrasi bangsa. Pola kepemimpinan Gus Dur, struktur dan kultur NU yang menasional, dan doktrin Aswaja yang mencari keselarasan diharapkan memberi fatwa kuat bagi persoalan bangsa. Di sini beban Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri semakin kuat. (Jawa Pos, *Kini, Jadi Ujian Untuk Nahdliyyin*, 22 Nopember 1999, hal. 3).

Bahkan menurut Taufikurrahman Saleh, posisi penting Muktamar NU ke-30 yang berlangsung pada 21-26 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, bisa dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang. *Pertama*, komunitas NU semakin ditantang memainkan perannya dalam wacana kebangsaan dengan semakin masuknya sayap NU dalam percaturan nasional saat ini. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4, merupakan bukti semakin terakomodasinya NU dipusat kekuasaan. Semakin membaiknya posisi NU saat ini, menuntut NU semakin kontributif terhadap pemecahan problem bangsa yang kian berat, terutama dalam penanganan krisis nasional yang belum kunjung usai. *Kedua*, perubahan fundamental tatanan politik

nasional yang melingkupi NU selama 1,5 tahun terakhir ini, banyak mempengaruhi produk keputusan muktamar di Lirboyo-Kediri-Jatim. Bila atmosfer politik NU dari Muktamar Situbondo (1984) dan Cipasung (1994) cuaca politik nasional sedang di dominasi “semangat anti partai,” Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim ini di latari euforia partai. Ibarat tangga musik, popularitas partai sedang menunggu tangga paling atas dalam blantika politik di Indonesia. *Ketiga*, muktamar Lirboyo dipastikan akan memilih kepemimpinan baru, setelah 15 tahun dipegang Gus Dur. Prospek perubahan figur ini banyak menentukan warna baru dalam gerak NU, paling tidak 5 tahun ke depan. (Surya, *Jalan Tengah Nu Dan Politik*, 22 Nopember 1999, hal. 10)

Adapun agenda Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Agenda Muktamar NU Ke-30 Di Lirboyo-Kediri-Jatim

TANGGAL	PUKUL	AGENDA MUKTAMAR
22 Nopember 1999	08.00-10.00 WIB.	Pleno V: Pengesahan Tatib sidang dan agenda Muktamar.
	10.00-10.30 WIB.	Istirahat
	10.30-12.30 WIB.	Pleno VI: Laporan Pertanggung jawaban PBNU.
	12.30-13.30 WIB.	Istirahat/Shalat/Makan.
	13.30-15.30 WIB.	Pemandangan Umum.
	15.30-15.45 WIB.	Istirahat.
	15.45-17.45 WIB.	Lanjutan Pemandangan Umum.
	17.45-19.00 WIB.	Istirahat/Shalat/Makan.
	19.00-21.00 WIB.	Pleno VII: Lanjutan Pemandangan Umum.
	21.00-22.00 WIB.	Tanggapan atas pandangan umum.
TANGGAL	PUKUL	AGENDA MUKTAMAR
23 Nopember 1999	08.00-10.00 WIB.	Sidang komisi I / Organisasi.
	10.00-12.30 WIB.	Sidang komisi II / Program.
	13.30-15.30 WIB.	Sidang komisi III / Rekomendasi.

	15.45-17.45 WIB.	Sidang komisi IV / Bahstul Masail Diniyah Waqiiyah.
	19.00-21.00 WIB.	Sidang komisi V / Bahstul Masail Diniyah Maudliiyah.

TANGGAL	PUKUL	AGENDA MUKTAMAR
24 Nopember 1999	08.00-10.00 WIB.	Sidang komisi VI / Lanjutan.
	10.30-12.30 WIB.	Sidang komisi VII / Lanjutan.
	13.30-15.30 WIB.	Sidang komisi VIII / Lanjutan.
	15.45-17.45 WIB.	Sidang komisi IX / Lanjutan.
	19.00-21.00 WIB.	Perumusan Hasil Sidang komisi.

TANGGAL	PUKUL	AGENDA MUKTAMAR
25 Nopember 1999	08.00-11.00 WIB.	Pleno IX: Pengesahan hasil sidang- komisi.
	11.00-13.00 WIB.	Pleno IX: Lanjutan pengesahan hasil sidang komisi.
	14.00-17.00 WIB.	Pleno IX: Lanjutan pengesahan hasil sidang komisi.
	17.00-21.00 WIB.	Pleno X: Pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004.

TANGGAL	PUKUL	AGENDA MUKTAMAR
26 Nopember 1999	08.00-11.00 WIB.	Lanjutan pemilihan anggota PBNU.
	14.00 WIB.- selesai.	Penutupan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri oleh Wapres RI Megawati Soekarnoputri.

Sumber: Jawa Pos, Surya, Kompas, 21-27 Nopember 1999.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas lebih jauh agenda Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim tanggal 25 Nopember 1999 pada Sidang Pleno X yaitu: tentang pemilihan Ketua Umum PBNU 1999-2004.

4.2. Pemimpin NU Pasca Gus Dur

Persoalan siapa pengganti Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih menjadi Presiden RI keempat menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim.

Di antara banyak kader yang dipersiapkan Gus Dur, tersaring secara alamiah dan diperkuat dengan pernyataan Gus Dur dalam berbagai kesempatan sebelum terpilih sebagai presiden. Semula ada empat orang, kemudian berkembang menjadi enam orang, dan akhirnya menjadi tujuh orang kandidat pengganti Gus Dur pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ciganjur itu.

Adapun tujuh orang kandidat pemimpin NU pasca Gus Dur, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Nama-Nama Kandidat Pemimpin NU Pasca Gus Dur

No.	Nama	Jabatan
1.	Mustofa Bisri	Pengasuh Ponpes Roudlotut Tholibin Rembang-Jateng.
2.	Said Aqiel Siradj	Katib Aam Syuriah
3.	Hasyim Muzadi	Ketua PWNU Jatim
4.	Fajrul Falaakh	Ketua PBNU
5.	Salahuddin Wahid	Ketua Partai Kebangkitan Umat
6.	Slamet Effendi Yusuf	Mantan Ketua GP Ansor
7.	Ahmad Bagdja	Sekjen PBNU

Sumber:

1. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (eKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemberitaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: eKapim, hal. 3, 4, 21, 32, dan 33.
2. **Jawa Pos**, *Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004: Yang Intelektual, Manajerial, Atau Berdarah Biru?*, 17 Nopember 1999, hal. 3.

Para kandidat tersebut, masih sulit dipastikan siapa yang paling berpeluang. Tapi dari analisis yang berkembang, hanya tiga nama yang memiliki peluang cukup signifikan, yakni Gus Mus, Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siradj. Sedangkan Fajrul Falaakh Salahuddin Wahid, dan Slamet Effendi Yusuf dinilai memiliki peluang kecil. Pasalnya, basis ketiganya dinilai kurang jelas. Lagi pula, mereka di nilai mempunyai sisi kelemahan yang cukup mengganggu.

Fajrul, meski memiliki tradisi intelektual memadai dan dekat dengan Gus Dur, dinilai masih terlalu muda. Selain itu, dalam hal penguasaan agama, Fajrul dinilai masih kurang.

Begitu juga dengan Slamet selain memiliki kelemahan sama dengan Fajrul, salah satu ketua DPP Golkar ini dinilai memiliki “cacat” dalam hal hubungan dengan Gus Dur. Slamet di kenal sebagai sosok yang memiliki visi yang berlawanan dengan Gus Dur. Sehingga dikalangan NU, tokoh yang aktif di Golkar ini sering disebut sebagai kader NU yang “nakal”.

Berbeda dengan Slamet dan Fajrul, Gus Sholah yang juga adik Gus Dur, sebenarnya, memiliki “persyaratan” cukup. Baik dari segi intelektual, begitu pun dari segi nasab, Gus Sholah termasuk golongan “darah biru”. Tapi sayang, Gus Sholah sama seperti Slamet. Dia dikenal sebagai orang bervisi beda dengan Gus Dur.

Di basis NU, berbeda visi dengan Gus Dur menjadi ganjalan cukup serius. Ini bukan berarti Gus Dur alergi perbedaan. Tapi, kultur yang berkembang dikalangan warga NU kini sejalan dengan visi Gus Dur. Selama ini, visi dan kultur yang dikembangkan Gus Dur di nilai pas bagi sebagian warga NU. Akibatnya, mereka

yang kebetulan berseberangan dengan Gus Dur, dengan sendirinya, menempati posisi marginal.

Hal itu karena sebagian besar warga NU tidak ingin yang dikembangkan Gus Dur selama 15 tahun berantakan begitu saja. Mayoritas warga NU menilai visi dan kultur yang dikembangkan Gus Dur telah berhasil mengangkat keberadaan warga NU di tingkat nasional dan internasional.

Karena itu, Ketua Umum PBNU 1999-2004 harus bisa meneruskan dan melestarikan yang telah dirintis Gus Dur. Lalu bagaimana dengan kans Gus Mus, Hasyim Muzadi, serta Said Aqiel Siradj dari segi dukungan, kans ketiganya hampir sama.

Gus Mus sebagai tokoh nasional, mempunyai dukungan luas dan sebagai sosok yang masuk hitungan Gus Dur.

Tapi sayang, Gus Mus selama ini dikenal tidak memiliki ambisi memadai. Bahkan, ada kecenderungan bahwa Gus Mus menolak pencalonan.

Kiai Pesantren dan budayawan independen ini cenderung tidak mau terikat urusan organisasi. Gus Mus lebih senang mengajar para santri serta melahirkan puisi dan esai bernilai tinggi. Sehingga, bisa dipastikan, kalau tidak dipaksa, Gus Mus tidak akan mau dipilih menjadi Ketua Umum PBNU.

Hasyim tidak jauh berbeda. Ketua PWNU Jatim ini dinilai berhasil membenahi kepengurusan NU Jatim. Sehingga, bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, NU Jatim dianggap paling maju, baik dari segi pembenahan keorganisasian NU.

Kelebihan Hasyim, dia cocok menjadi pengurus PBNU 1999-2004. Pasalnya, keorganisasian PBNU yang selama ini dinilai kurang baik, akan mengalami kemajuan diberbagai bidang. Sehingga tampilnya orang seperti Hasyim dinilai bisa membenahi kekurangan itu.

Kelebihan lain, dia termasuk salah satu kandidat yang cukup aktif mempromosikan diri. Bahkan, Hasyim semakin aktif berkampanye di Jakarta. Pada hari Senin 15 Nopember 1999, Hasyim menggelar jumpa pers di Jakarta. Dan pada hari Rabu, 17 Nopember 1999, Hasyim akan meluncurkan sebuah buku di Café Kencana, Jakarta.

Tapi, Hasyim bukannya tanpa ganjalan. Generasi Muda NU (GMNU), kelihatannya kurang mendukung. Ada rumor, sebagian GMNU telah melakukan Gerakan anti Hasyim. Hal ini tidak lain karena tokoh asal Tuban ini dinilai terlalu bervisi politik. Sehingga sebagian GMNU menghendaki agar Hasyim menjadi ketua PKB saja.

Hasyim juga dinilai sebagian warga NU terlalu “berambisi”. Padahal, dalam kultur NU, hal seperti itu kurang disukai. Bagi warga NU, ambisi mencapai sebuah jabatan akan berimplikasi pada target-target tertentu. Selain itu, Hasyim dinilai kurang mampu berhadapan dengan Gus Dur seperti Gus Mus. Dikhawatirkan, Hasyim tidak berani bersikap kritis terhadap pemerintah.

Sedangkan Said Aqiel, tokoh asal Jawa Barat ini mendapat dukungan luas dari GMNU. Said Aqiel dinilai sebagai sosok intelektual dan memiliki banyak kesamaan dengan Gus Dur. Dari segi keorganisasian, Said Aqiel dinilai cukup memadai meskipun tidak sehebat Hasyim Muzadi. Kelemahannya, dia dianggap pendatang

baru karena banyak menghabiskan waktunya di Makkah al Mukarramah. Dan masuknya Said Aqiel di jajaran NU lebih banyak disebabkan oleh Gus Dur. Bukan karena perintisan dari bawah.

Dengan demikian yang berpeluang menjadi Ketua Umum PBNU 1999-2004 masih sulit ditebak. Akan tetapi, posisi *Rais 'Aam Syuriah* PBNU ikut menentukan. Pada saat Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim ini, sejumlah nama muncul untuk menggantikan Kiai Ilyas Ruchiyat.

Tokoh yang santer disebut adalah Kiai M.A. Sahal Mahfudz (pengasuh Pondok Pesantren Maslahul Huda Kajen Pati), Kiai Abdullah Faqih (pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban), dan Kiai Abdullah Abbas (pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon).

Di antara ketiga nama itu, Kiai Sahal berpeluang paling besar. Alasannya, Kiai Faqih dan Kiai Abdullah Abbas dikabarkan tidak bersedia dicalonkan. Kedua kiai sepuh (senior) ini lebih senang menyerahkan posisi itu ke Kiai Sahal. Kiai Sahal dikenal sebagai sosok yang independen di hadapan Gus Dur. Kiai Sahal selalu bisa ngemong Gus Dur dengan baik.

Kelebihan Kiai Sahal ini menjadi nilai plus. Sebab, dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden RI, ada keinginan agar syuriah PBNU dipegang tokoh yang mempunyai sikap independen di hadapan Gus Dur. NU diharapkan bisa terus bersikap independen, tanpa terkooptasi oleh pemerintah. Dan Kiai Sahal-lah yang dianggap sebagai sosok yang pas. (Jawa Pos, *Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004: Yang Intelektual, Manajerial, Atau Berdarah Biru?*, 17 Nopember 1999, hal. 3)

Adapun profil keenam kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 di atas sebagai berikut: *pertama*, A. Mustofa Bisri yang biasa dipanggil Gus Mus, merupakan putra pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin, Kiai Bisri Mustofa di Rembang, Jawa Tengah. Kiai yang penampilannya selalu sederhana dan dikenal juga sebagai penyair religius itu merupakan tokoh NU satu angkatan dengan Gus Dur. Kiai penyair, demikian Gus Mus biasa disebut, merupakan sosok yang memiliki akar kuat di lingkungan *nahdliyin*. Gus Mus duduk sebagai salah satu Rais Syuriah PBNU serta pernah belajar bersama Gus Dur di Mesir, juga tercatat sebagai satu deklarator PKB. *Kedua*, Said Aqiel Siradj yang memegang posisi strategis sebagai Katib Aam Syuriah PBNU, sesuai gelar yang disandanginya merupakan sosok intelektual yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam bidang ke-*jamiyah-an*. Kecendekiawan dan popularitas kiai asal Cirebon, Jawa Barat ini cukup teruji, baik ketika tampil sebagai pembicara bersama banyak pakar. Pemikiran Said Aqil Siradj dikenal moderat dan progresif, bahkan di mata kiai sepuh NU dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Gus Dur. *Ketiga*, Fajrul Falaakh yang kini dipercaya sebagai Ketua PBNU sebagai simbol salah satu tokoh muda berbakat dan sering disebutkan Gus Dur sebagai calon pemimpin NU di masa mendatang, penguasaannya di bidang advokasi (hukum), menonjol. Putra Kiai Tolchah Mansoer, yang dikenal pula sebagai cucu pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah dalam tiap kesempatan sering diajak Gus Dur berkeliling dunia. Sehingga banyak *nahdliyin* menilai Gus Dur menyukainya, karena sama-sama dari keluarga pendiri NU dan keintelektualannya tidak perlu diragukan. *Keempat*, Hasyim Muzadi yang memegang jabatan sebagai Ketua *Tanfidziyah* PWNU Jatim. Keberhasilan Hasyim Muzadi selama dua periode memimpin PWNU Jatim mampu

mewujudkan banyak impian tokoh ulama sepuh dan juga harapan *nahdliyin*. (elKapim, 2000:4-6). *Kelima*, Salahuddin Wahid (Ketua PBNU) yang juga adik kandung Gus Dur. *Keenam*, Ahmad Bagdja yang menjabat Sekjen PBNU era Gus Dur memiliki pengalaman organisasi yang baik. (elKapim, 2000:32-33).

4.2.1. Persepsi Tokoh NU Tentang Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan persepsi para tokoh NU dari berbagai daerah yang hadir pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim tentang kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004:

a. Imron Hamzah (Rais Syuriah PWNU Jatim)

Para kandidat Ketua Umum PBNU yang muncul saat ini memiliki daya kritis yang tingkatannya berbeda. Namun, apabila salah satu di antara mereka terpilih dan kepengurusannya didukung kandidat yang lain, pasti akan lebih mantap dalam mengkritisi Gus Dur maupun pemerintah. Hasyim Muzadi, misalnya, memiliki kelebihan manajerial. Said Aqiel Siradj mempunyai wawasan keagamaan, juga seorang budayawan yang mampu merespons gejala sosial. Sedangkan Ahmad Bagdja mempunyai pengalaman berorganisasi. Siapapun di antara mereka yang terpilih, saya yakin mereka mampu mengimbangi Gus Dur, asal mampu memasang koleganya yang lain.

b. Ahmad Isa (Ketua PWNU Kalteng)

Dari empat kandidat yang muncul, saya yakin semuanya mampu menangkap apa yang diinginkan Gus Dur dalam pembukaan Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Terutama dalam mengkritisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gus Dur. Saya tidak bisa mengatakan mana diantara mereka yang paling kritis dan paling berani melakukan kritik konstruktif terhadap pemerintahan Gus Dur. Saya kira semuanya mempunyai daya kritis yang sama. Dan, mereka semua sangat pantas menduduki jabatan Ketua Umum PBNU.

c. Nuruz zuhri (Mustasyar PWNU Aceh)

Saya kira empat kandidat itu tidak perlu diragukan lagi daya kritisnya. Baik Pak Hasyim, Said Aqiel, Gus Mus, maupun Pak Bagdja. Bahkan, masih ada kandidat lain yang saya kira juga memiliki daya respons dan kritis yang juga sama dengan mereka. Apalagi Gus Dur bersama jajarannya di pemerintahan meminta agar terus dipantau dan dikritik yang konstruktif. Saya berharap kalau mereka nanti terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, mereka juga bisa memperjuangkan Aceh untuk melakukan referendum. (Jawa Pos, *Mereka Bisa Imbangi Gus Dur*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

d. Muhadi Zainuddin (Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) DI Yogyakarta)

Sementara itu, Muhadi Zainuddin Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) DI Yogyakarta mengharapkan Ketua Umum PBNU 1999-2004 sebaiknya bukan dari

akademisi atau eksekutif, tetapi ulama yang berasal dari kalangan Pondok Pesantren (PP). Sebab NU merupakan organisasi keagamaan yang lahir untuk menghimpun para ulama pemimpin umat Islam yang berbasis di PP. karena itu, pemimpinnya lebih tepat dipegang ulama dari PP. Ulama dari kalangan PP lebih menguasai kultur, adat, dan budaya pesantren sehingga tidak akan kesulitan dalam mengembangkan NU sesuai dengan eksistensi PP.

Menurut Muhadi, meskipun pemimpin NU berasal dari lingkungan PP, dia harus mampu berfungsi sebagai administrator dan politikus sehingga NU akan lebih maju dan keberadaannya lebih baik. (*Jawa Pos, Pemimpin NU Sebaiknya Dari Pesantren*, 21 Nopember 1999, hal. 3).

4.2.2. Persepsi Pengamat NU Tentang Kandidat Ketua Umum PBNU

Tantangan presiden Abdurrahman Wahid agar PBNU 1999-2004 kritis terhadap pemerintahnya masih terus bergaung di Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Wacana itu terus menjadi pembicaraan ramai di kalangan *muktamirin* (peserta muktamar) maupun pengamat yang hadir di Kediri. Dan rupanya, kemampuan untuk bersikap kritis dan independen ini mulai menjadi pertimbangan dalam menentukan figur-figur yang akan memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Seakan menjawab kecemasan masyarakat terhadap kemungkinan munculnya dominasi pemerintah atas rakyat, Gus Dur sebagai tokoh puncak NU yang menjadi presiden, meminta kepada NU untuk bersikap kritis terhadap pemerintahnya. Sebab, hanya dengan tetap dipeliharanya budaya kritis, demokrasi bisa hidup di

Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan, dia tidak ingin NU hanya suka mencari muka di depan presiden, seperti selama ini. (Jawa Pos, *Beraniakah Mereka Mengkritik?*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan persepsi pengamat NU dari dalam dan luar negeri yang hadir pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim tentang kemampuan kritis kandidat ketua umum PBNU 1999-2004.

a. Andree Feillard (Ahli NU asal Perancis)

Menurut Andree Feillard, figur Gus Mus lebih mendekati dengan figur Gus Dur pada tahun 1984 ketika menjelang muktamar Situbondo. Semangat yang dimiliki Gus Dur ketika itu, juga dimiliki Gus Mus saat Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim yakni konsistensi untuk tetap menjaga khittah 1926.

Gaya yang dimainkan Gus Mus selama ini, juga memiliki kemiripan dengan gaya Gus Dur. Dari sisi kesenimanannya, intelektualitas, maupun kenyentrikannya, analisis- analisis yang dibuatnya cukup tajam, namun tetap disampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna rakyat. Tingkat akseptabilitasnya hampir merata di setiap lapisan yang ada di tubuh organisasi ini. Baik kalangan tua maupun kalangan muda yang ada di dalam NU, semuanya hampir tidak mempunyai persoalan dengan Gus Mus.

Sedangkan Hasyim Muzadi sukses memimpin NU di Jawa Timur, manajemennya bagus, visi organisatorisnya jelas. Dia juga terkenal sebagai pembela setia Gus Dur. Dalam muktamar Cipasung, Hasyim Muzadi merupakan salah seorang kader yang gigih membela Gus Dur. Gaya oratornya sangat luar biasa dan mampu

memukau para peserta. Sehingga, keinginan untuk menggolkan kembali Gus Dur menjadi ketua umum PBNU berhasil. Hasyimlah salah seorang yang aktif melakukan lobi untuk menggalang kekuatan menggolkan Gus Dur.

Sedangkan figur Said Aqiel Siradj, dia masih terlalu muda di NU. Pendapat-pendapatnya memang kontroversial dan cerdas. Tetapi dia tidak sama dengan Gus Dur ketika tahun 1984. Analisisnya cukup tajam, dan dia juga terkenal dengan kemampuan intelektualitasnya. Namun sayang, basis dukungannya hanya dari kalangan muda (kampus). Sedangkan di kalangan tua, tingkat akseptabilitasnya masih kurang. (Jawa Pos, *Gus Mus Lebih Mendekati Gus Dur*, 23 Nopember 1999, hal. 2).

Sedangkan kans Said Aqiel Siradj, Doktor lulusan Universitas Ummul Qurra Makkah ini sedikit banyak akan terpengaruh oleh sambutan Gus Dur dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Dalam sambutannya, Gus Dur memberikan kritik cukup keras kepada Said Aqiel Siradj yang menawarkan konsep baru: memelihara yang masih baik dan menciptakan sesuatu baru yang lebih baik. Sementara itu, konsep awalnya adalah menerima nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.

Secara tidak langsung, Gus Dur menyatakan kurang sependapat dengan ide tersebut. Dengan konsep yang lama saja, kita masih berjaya dan Indonesia tetap merdeka. Karena apa, NU tetap percaya dengan *barokah*. Gus Dur sangat prihatin apabila warga NU (*nahdliyyin*) kurang percaya lagi pada *barokah*. (Jawa Pos, *Dianggap Netral, Gus Mus Masih Berpeluang*, 22 Nopember 1999, hal. 7).

b. Greg Barton (Pengamat NU Australia)

Duet PBNU Hasyim Muzadi-Sahal Mahfudz cukup serasi sebagai arsitek untuk mengendalikan dan memperbaiki kondisi NU. sebab, Kiai Sahal Mahfudz memiliki kemampuan di bidang wawasan dan keagamaan, serta memiliki daya kritis yang tajam. Sedangkan Hasyim Muzadi memiliki kemampuan mengelola organisasi dengan bagus. (Aula, *Nakoda Baru NU*, No. 10 Tahun XXI, 1999, hal. 15).

c. Laode Ida (Pengamat Politik)

Menurut Laode Ida, kemampuan kritis dan independensi masing-masing calon tersebut terhadap pemerintahan Gus Dur adalah sebagai berikut. *Pertama*, Hasyim Muzadi, yang namanya mencuat lama jauh hari sebelum Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim ini, dikenal sebagai administrator. Ia dinilai sangat berhasil dalam memimpin PWNU Jatim. Keberhasilannya itu menjadi acuan pengurus wilayah yang lain. Di samping itu, dia sukses menyelesaikan kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi. Namun, Laode meragukan Hasyim Muzadi dalam soal independensi dan sikap kritis terhadap Gus Dur. *Kedua*, Said Aqiel Siradj sama seperti Hasyim Muzadi figur yang sulit diharapkan independensinya terhadap Gus Dur. Sehingga kalau untuk kepentingan merespons tantangan kritis terhadap Gus Dur, keduanya bukan figur yang sesuai. Sebab, mereka dikenal sebagai figur yang kurang berani mengkritik Gus Dur. *Ketiga*, Mustofa Bisri sebagai figur yang sangat mungkin bersikap kritis. Selama ini, Gus Mus merupakan figur yang independen terhadap Gus Dur. Selain kemampuannya di bidang ilmu keagamaan. Gus Mus dinilai bisa mengatakan “tidak” terhadap keinginan presiden. Di samping itu, selama ini Gus Mus

juga disegani Gus Dur. *Keempat*, Salahuddin Wahid merupakan figur yang independen dan kritis terhadap Gus Dur. Kritik adik kandung Gus Dur ini bisa lebih tajam. Namun, ketajaman kritik itu tidak akan bersifat ke-NU-an, tetapi bisa bersifat persaingan individual. Sehingga, meskipun ia sangat kritis terhadap Gus Dur, itu berada di luar konteks ke-NU-an. (Jawa Pos, *Beraniakah Mereka Mengkritik?*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

d. Nurcholish Madjid (Cendekiawan Muslim)

Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid berpendapat, pemimpin NU mendatang harus tetap memiliki khazanah atau wawasan tradisional. Selain itu, ia harus mampu menangkap masalah-masalah kontemporer. Pasalnya, sekarang sedang terjadi perubahan visi di internal NU. “Kalau dulu reaksioner, sekarang NU harus lebih proaktif”, tegas Cak Nur seusai bertemu dengan empat kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 di rumah Kiai Idris Marzuki. Masing-masing dengan Hasyim Muzadi, Mustofa Bisri, Said Aqiel Siradj dan Achmad Bagja. Penegasan Cak Nur panggilan Nurcholish Madjid itu untuk menjawab pertanyaan para wartawan seputar kriteria pemimpin NU mendatang.

Bahkan Cak Nur mengatakan, NU sekarang sedang tergiring ke tengah. NU sedang memainkan peranannya dalam kekuasaan dengan tampilnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI ke-4. Karena itu, NU harus siap menerima kritikan dari luar. Kalau dulu NU biasa bersikap reaksioner, kini harus proaktif.

Menurut Cak Nur, ibarat pertandingan sepak bola, NU sebagai pemain akan mendapat kritikan, bahkan cemoohan paling keras dari para penonton. Jadi, mereka

yang berada di luar struktur pasti akan bersuara paling keras. Naiknya Gus Dur menjadi Presiden RI ke-4 sekaligus menegaskan pernyataan yang sering disampaikannya, bahwa lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, NU akan mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, perkiraannya itu justru telah mengalami *akselerasi* (percepatan).

Menurut Cak Nur, Gus Dur itu bisa dikatakan menjalani momentum, karenanya mengalami *akselerasi* (percepatan), dan percepatan itu bukan tanpa masalah. Bisa jadi, timbulnya percepatan itu bakal menjadi kegamangan tersendiri bagi NU. Artinya, jika konsistensinya tidak terpelihara, posisi sekarang justru akan menjadi bumerang bagi NU. (Jawa Pos, *NU Alami Akselerasi Momentum*, Cak Nur: *Dulu Reaksioner, Sekarang Harus Proaktif*, 23 Nopember 1999, hal. 1).

e. Azyurmadi Azra (Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Menurut Azyurmadi Azra, kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 harus mampu menggunakan fungsi rekonsiliatifnya NU secara nasional, sebab selama ini NU belum menggunakan fungsi rekonsiliatifnya secara nasional. Padahal dibanding organisasi massa atau organisasi keagamaan lainnya, NU berkemampuan besar mengupayakan rekonsiliasi nasional.

Menurutnya, paham dan tradisi keagamaan NU sama dengan tradisi dan paham keagamaan yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Kalimantan. Yaitu berorientasi pada tarekat dan lembaga-lembaga tradisional. Melalui pendekatan sufistik, ulama-ulama NU dapat menjalin dialog dengan para ulama di Aceh, untuk

membangun rekonsiliasi bangsa. Dan NU dengan sifatnya yang akomodatif dan inklusif akan mudah melakukan pendekatan.

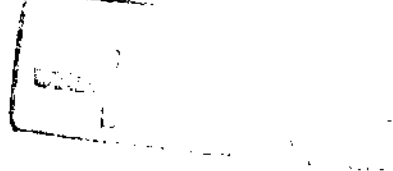
Kemampuan melakukan pendekatan semacam itu tidak dimiliki oleh Muhammadiyah maupun organisasi kaum modernis lainnya. Namun, sayangnya peran itu belum difungsikan secara optimal oleh NU. Para ulama NU belum melakukan peran integratifnya secara maksimal.

Memang, NU telah berhasil menjalankan fungsi integratifnya di Jawa. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa dan NU, maka orientasi NU yang selama ini “berat” ke Jawa harus dikembangkan ke luar Jawa. Sebenarnya potensi NU di luar Jawa sangat besar, hanya saja selama ini tidak diagendakan secara serius. Ini karena selama ini NU *inward looking*. Sekarang harus dirubah menjadi *outward looking*. (Aula, *Nakoda Baru NU*, No. 10 Tahun XXI, 1999, hal. 17).

f. Fachry Ali (Pengamat Politik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Menurut Fachry Ali, kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 yang mempunyai potensi besar membawa PBNU bersikap kritis, hanya Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur sendiri. Alasannya, Salahuddin Wahid sama-sama berdarah biru. Kritik terbuka Salahuddin Wahid terhadap Gus Dur dapat dilakukan secara terbuka. Persoalannya, konflik yang terjadi di tubuh NU muncul di antara saudara atau keluarga Gus Dur.

Akan tetapi, kemungkinan besar orang seperti Salahuddin Wahid tidak akan terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004. Menurut Fachry Ali, yang bisa terpilih adalah orang yang didukung kuat oleh presiden Gus Dur. Sementara,



Salahuddin Wahid kemungkinan besar tidak akan terpilih. Sebab, Gus Dur tidak menginginkan puncak pemimpin NU 1999-2004 dipegang keluarganya, sedangkan dia memimpin negara.

Kentalnya dukungan dua orang kandidat Said Aqiel Siradj dan Hasyim Muzadi sebagai pemimpin puncak NU terhadap Gus Dur. Menurut Fachry Ali, keduanya memiliki kegamangan yang sama. Mereka merasa dekat, tetapi bukan dari lingkaran darah biru. Meskipun dalam kampanyenya Said Aqiel Siradj telah mengumandangkan untuk tetap bersikap kritis terhadap Gus Dur, dia tetap saja tidak akan mampu merealisasikannya. (Jawa Pos, *Hanya Dari Darah Biru*, 23 Nopember 1999, hal. 3).

g. Kacung Maridjan (Pengamat NU dan Politik Universitas Airlangga)

Membicarakan siapa calon pengganti Gus Dur (Presiden RI ke-4) sebagai Ketua Umum PBNU 1999-2004 pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim penting untuk dicermati mengingat posisi NU di masa depan. Menurut Kacung Maridjan, kriteria pemimpin NU mendatang, ada dua hal yang pokok. *Pertama*, orangnya disyaratkan *pinter* atau ahli manajerial. Artinya, dia harus mampu mengelola potensi NU yang ada. Bukan saja masalah wacana, tetapi juga implementasi program-program riil untuk kemaslahatan umum, khususnya *nahdliyin* (Warga NU). *Kedua*, orangnya harus lebih otonom. Artinya, berani mengontrol atau mengkritisi kekuasaan meskipun yang menjadi presiden adalah Gus Dur. Kalau Gus Dur salah, ya harus disalahkan itu maksudnya.

Kalau dilihat dari kriteria itu, ada dua orang yang sesuai, yakni Hasyim Muzadi dan Mustofa Bisri. Hasyim Muzadi mempunyai kelebihan manajerial dan tradisi intelektual meskipun kurang otonom. Sedangkan Mustofa Bisri mempunyai kelebihan lebih otonom dan mempunyai tradisi intelektual bagus, tetapi secara manajerial kurang.

Sedangkan Said Aqiel Siradj dan Fajrul Falaakh kurang mempunyai pengalaman dalam manajerial. Tradisi intelektualnya juga masih kalah dengan Hasyim Muzadi dan Mustofa Bisri. Soal otonomi, keduanya masih boleh dibilang "Gus Durian". (Jawa Pos, *Pertarungan Sesama "Pangeran"*, 17 Nopember 1999, hal. 3).

Adapun profil kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004 baik dari aspek kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Profil Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004

No.	Nama Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004	Profil	
		Kelebihan	Kelemahan

1.	Fajrul Falaakh	<ul style="list-style-type: none"> a. Segi nasab: Golongan darah biru yaitu: Putra Kiai Tolchah Mansoer dan cucu pendiri NU Kiai Wahab Hasbullah. b. Mempunyai tradisi intelektual yang memadai. c. Penguasaan di Bidang Advokasi (Hukum) menonjol. d. Dekat dengan Gus Dur. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terlalu muda di NU. b. Penguasaan agama dikalangan NU masih kurang. c. Kurang mempunyai pengalaman dalam manajerial. d. Soal otonomi, masih "Gus Durian".
2.	Slamet Effendi Yusuf	<ul style="list-style-type: none"> a. Mantan Ketua GP Ansor. b. Ketua DPP Golkar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki visi yang berlawanan dengan Gus Dur. b. Bagian dari Golkar. c. Tidak mempunyai pendukung.
3.	Salahuddin Wahid	<ul style="list-style-type: none"> a. Segi nasab: Golongan darah biru yaitu: Adik kandung Gus Dur dan cucu pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. b. Mempunyai intelektual cukup. c. Independen dan kritis terhadap Gus Dur di luar konteks ke-NU-an. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki visi yang berlawanan dengan Gus Dur. b. Tidak mempunyai pendukung. c. Adik kandung Gus Dur/KKN.

4.	Mustofa Bisri	<ul style="list-style-type: none"> a. Segi nasab: Golongan darah biru yaitu: Putra Kiai Bisri Mustofa Rembang-Jateng. b. Tokoh nasional yang mempunyai dukungan luas dan sebagai sosok yang masuk hitungan Gus Dur. c. Salah satu deklarator PKB. d. Memiliki akar kuat di lingkungan Warga NU (<i>nahdliyin</i>). e. Kiai pesantren, budayawan, dan intelektualitas yang independen, termasuk kepada Gus Dur. f. Memiliki kemiripan dengan gaya Gus Dur yakni: dari sisi kesenimananan, intelektualitas, kenyentrikannya, analisis-analisisnya tajam namun disampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna rakyat. g. Tingkat akseptabilitasnya hampir merata disetiap lapisan, baik kalangan tua maupun muda di NU, semuanya hampir tidak mempunyai persoalan dengan Gus Mus. h. Penguasaan di bidang agama baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajerial kurang. b. Mempunyai tradisi intelektual.
5.	Hasyim Muzadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki manajerial bagus. b. Berhasil membenahi kepengurusan PWNNU Jawa Timur. c. Visi organisatorisnya jelas. d. Pembela setia Gus Dur dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung. e. Sukses menyelesaikan kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi. f. Pada pemilu 1999 lalu, Jawa Timur menyumbang separuh dari seluruh kursi yang diperoleh PKB secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan dari golongan darah biru (kiai nasab), tetapi kiai nasib. b. Terlalu bervisi politis. c. Dinilai sebagian Warga NU (<i>nahdliyin</i>) terlalu berambisi dalam mencapai sebuah jabatan. d. Kurang independen dan kurang kritis terhadap Gus Dur.

	Said Aqiel Siradj	<p>a. Sosok intelektual yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam bidang ke-<i>jamiyah</i>-an (keorganisasian).</p> <p>b. Kecendekiawan dan popularitasnya cukup teruji, baik ketika tampil sebagai pembicara bersama banyak pakar.</p> <p>c. Pemikirannya dikenal moderat dan progresif, bahkan di mata kiai sepuh NU dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Gus Dur.</p> <p>d. Mempunyai wawasan keagamaan, juga seorang budayawan yang mampu merespons gejala sosial.</p>	<p>a. Pendatang baru di NU karena banyak menghabiskan waktunya di Makkah al Mukarramah.</p> <p>b. Masuknya Said Aqiel Siradj di jajaran NU lebih banyak disebabkan oleh Gus Dur, bukan karena perintisan dari bawah.</p> <p>c. Basis dukungannya hanya dari kalangan muda (kampus), sedangkan di kalangan tua tingkat akseptabilitasnya masih kurang.</p> <p>d. Kurang independen dan kurang kritis dengan Gus Dur.</p> <p>e. Soal otonomi, masih "Gus Durian".</p>
7.	Ahmad Bagdja	<p>a. Sekjen PBNU era Gus Dur.</p> <p>b. Mempunyai pengalaman berorganisasi.</p>	<p>a. Kurang independen dan kurang kritis terhadap Gus Dur.</p> <p>b. Tidak mempunyai pendukung.</p> <p>c. Soal otonomi, masih "Gus Durian".</p>

Sumber:

1. **Jawa Pos**, *Kandidat Ketua Umum PBNU 1999-2004: Yang Intelektual, Manajerial, Atau Berdarah Biru?*, 17 Nopember 1999, hal. 3.
2. **Jawa Pos**, *Mereka Bisa Imbangi Gus Dur*, 23 Nopember 1999, hal. 3.
3. **Jawa Pos**, *Gus Mus Lebih Mendekati Gus Dur*, 23 Nopember 1999, hal. 2.
4. **Jawa Pos**, *Beraniakah Mereka Mengkritik?*, 23 Nopember 1999, hal. 3
5. **Jawa Pos**, *Hanya Dari Darah Biru*, 23 Nopember 1999, hal. 3.
6. **Jawa Pos**, *Pertarungan Sesama "Pangeran"*, 17 Nopember 1999, hal. 3.
7. **Lembaga Kajian dan Pengembangan Informasi Media (elKapim)**, (2000). *Analisa dan Evaluasi Pemheritaan tentang KH. A. Hasyim Muzadi pada Suara Pembaharuan Nopember 1999-2000*. Malang: elKapim, hal. 3, 4, 21, 32 dan 33.

Empat kandidat Ketua Umum PBNU pada 22 Nopember 1999 bertemu secara bersamaan saat makan siang di rumah Kiai Idris Marzuki. Keempat kandidat itu, masing-masing Said Aqiel Siradj, Hasyim Muzadi, Mustofa Bisri, dan Ahmad Bagdja. Mereka tampak biasa-biasa saja, seolah tidak mempedulikan gunjingan maupun tarik-menarik dukungan terhadap dirinya. Mereka juga tidak terlihat melakukan kompromi apa-apa seputar pencalonan dirinya yang sedang ramai dipergunjingkan.

Bahkan, saat beberapa wartawan mendaulat agar para kandidat itu foto bersama, ada yang menolaknya. Gus Mus meninggalkan ruangan sedang Hasyim Muzadi dan Said Aqiel Siradj keluar belakangan, sehingga sempat diabadikan bersama.

Namun di antara empat kandidat yang paling tampak antusias untuk lolos menjadi Ketua Umum PBNU 1999-2004 adalah Said Aqiel Siradj, bahkan dia menganggap kandidat yang ada saat ini sudah mengerucut tinggal dua. Masing-masing Said Aqiel Siradj dan Hasyim Muzadi.

Berikut komentar para kandidat seputar pencalonannya:

a. Said Aqiel Siradj

Selama ini pertarungan kandidat antara saya dan Pak Hasyim Muzadi lebih ditonjolkan pada dua pola pikir. Pak Hasyim lebih banyak ditonjolkan memiliki kemampuan manajerial organisasi. Sedangkan saya dinilai lebih mengedepankan basis intelektual. Itulah kelebihan masing-masing kandidat yang selama ini muncul dan menjadi sebuah opini. Kalau memang kekurangan saya terletak pada manajerial organisasi, maka dalam mengendalikan organisasi NU nanti, tentu saya akan

melibatkan atau memanggil tim ahli manajerial organisasi. Sedang program yang kami prioritaskan untuk warga NU (*nahdliyyin*) mendatang adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertanian.

b. Hasyim Muzadi

Soal penunjukan sebagai kandidat terhadap saya, itu bukan bagian saya untuk berkomentar. Karena, itu merupakan usulan cabang-cabang di Jatim yang mencalonkan saya. Maka, cabang itu juga yang harus menyosialisasikan pencalonan itu bukan saya, tanyakan saja ke cabang-cabang yang telah mencalonkan saya. Jadi kalau saya ditanya didukung berapa cabang, saya tidak tahu. Dan, kalau saya tetap ngotot nanti saya bisa kehabisan kaos.

c. Mustofa Bisri

Saya tidak pernah menyatakan mengundurkan diri. Belum ada pencalonan apa-apa kok mau mundur. Wong pencalonan masih tiga hari lagi. Gimana kok ada pengunduran diri pencalonan segala. Itu yang bilang kan pers. Sekarang belum ada pencalonan. Soal begini-begini ini kan saya sudah kelewatan. Ini sudah bukan makom saya lagi. Pada masanya Gus Dur itulah saingan saya.

d. Ahmad Bagdja

Saya siap tampil bukan karena mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh beberapa cabang dan wilayah. Karena itu, saya akhirnya matur kepada beberapa kiai dengan tujuan langkah saya untuk maju itu untuk kepentingan NU yang lebih besar.

Saya mengajak para *muktamirin* untuk memilih pengurus yang bisa membangun institusi atau mengurus organisasi. Jadi, faktor yang terpenting adalah yang memiliki kemampuan menejerial. Sedang NU yang kita bangun harus mengindonesia dan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa saja. (Jawa Pos, *Hasyim, Said, Gus Mus, Dan Bagja Tidak Pedulikan Gunjangan*, , 23 Nopember 1999, hal. 2).

4.3. NU Mempertegas Identitas Diri

Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim memperdebatkan kembali masalah asas Pancasila dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (NU). Pembahasan asas organisasi ini berlangsung dalam Sidang Komisi I (Organisasi). Inilah untuk pertama kali masalah asas diperdebatkan kembali setelah NU mengubah asas Islam menjadi Pancasila dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Ada 5 (lima) komisi yang memulai sidang-sidangnya. Yakni, Komisi I (Organisasi), Komisi II (Program), Komisi III (Rekomendasi), Komisi IV (Bahtsul Masa'il Diniyah Waqiyah), dan Komisi V (Bahtsul Masa'il Diniyah Maulidiyah).

Perdebatan sengit terjadi di Komisi I (Organisasi) saat membahas asas yang ada dalam Bab III Anggaran Dasar NU. Ada yang menginginkan berubah menjadi asas Islam, ada pula yang tetap mempertahankan asas Pancasila. Hingga sidang berakhir, belum bisa disepakati apakah NU tetap berasas Pancasila atau kembali berasas Islam. Karena begitu tajamnya perdebatan antara dua kubu yang setuju dan yang menolak asas Islam, akhirnya masalah itu disepakati untuk ditunda.

Seperti diketahui, sejak berdiri pada 1926, asas NU adalah Islam. Namun, bersamaan dengan keharusan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam

pemerintahan Soeharto, NU mengganti asas tersebut. Ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Saat itu, Kiai Ahmad Sidiq yang berhasil mencari argumentasi untuk menerima asas tunggal Pancasila bagi ormas ini. Jadilah, NU sebagai ormas Islam yang pertama menerima asas tunggal Pancasila tersebut.

Dalam Sidang Komisi Organisasi yang dipimpin Kiai Hafidz Ustman, Pancasila sebagai asas NU ternyata dipersoalkan kembali. Sebagian peserta menghendaki NU kembali kepada asas Islam seperti organisasi ini pertama dideklarasikan di Surabaya. Tepatnya, 16 Rajab 1344 (31 Januari 1926). Alasannya, pada awal akan mendirikan NU, Kiai Hasyim Asy'ari telah lebih dulu melakukan shalat *istikharah* (minta petunjuk) untuk menentukan asas yang akan digunakan dalam organisasi itu. (Jawa Pos, *NU Kembali Berasas Islam?*, hal. 1.).

Namun, pendapat tersebut tidak diamini seluruh peserta sidang. Mereka yang menolak kembali ke asas Islam berpendapat bahwa tidak ada ruginya NU berasas Pancasila. Sebab, asas itu hanya dimaksudkan untuk lebih menonjolkan komitmen NU pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, menggunakan asas Pancasila ini tidak akan merugikan kepentingan Islam, tandas salah seorang peserta.

Menurut pemimpin sidang Hafidz Ustman, munculnya dua pendapat yang berseberangan soal asas organisasi ini, merupakan bagian dari reformasi, sehingga suasananya semakin hidup.

Keputusan final sidang komisi ini diambil dalam sidang lanjutan komisi. Hasil komisi ini dibawa dalam rapat pleno. Jika keputusan muktamar menyetujui perubahan asas dari Pancasila ke Islam, ini berarti akan mengikuti langkah sejumlah ormas dan orpol berbasis Islam yang lebih dahulu mengambil keputusan serupa, beberapa saat

setelah Soeharto tidak berkuasa. Dan langkah NU ini akan diikuti ormas-ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyah.

Selain asas, komisi organisasi membahas soal wanita masuk dalam jajaran pengurus PBNU dan soal pendirian cabang istimewa di luar negeri. Perubahan masalah ini juga mendapat tanggapan yang tidak kalah seru. Soal perempuan yang akan masuk dalam kepengurusan PBNU, Hafidz Utsman menyatakan bahwa keinginan itu sebenarnya sudah lama ada.

Untuk mengakomodasikan keinginan itu, langkah pemecahan yang dilakukan PBNU adalah memberikan hak otonomi kepada perempuan NU untuk berkiprah di lembaga otonom. Antara lain, Muslimat, Fatayat, dan IPPNU.

Adapun soal perempuan menjadi kandidat Ketua Umum PBNU, menurut Hafidz Utsman kurang realitas, sebab yang pria nanti akan menuntut menjadi ketua di lembaga NU yang mengurus orang perempuan, seperti Muslimat, Fatayat, atau IPPNU.

Sementara itu, di komisi Bahtsul Masa'il Diniyah Waqiiyah dibahas beberapa masalah aktual yang pro dan kontra. Antara lain, soal hukum jual beli dan budidaya ular, jangkrik, dan cacing yang kini mulai marak diusahakan masyarakat.

Yang setuju dengan budidaya serangga, termasuk ular, memakai acuan pendapat Imam Maliki, yang menyatakan, asal memberikan manfaat boleh diperjualbelikan. (Jawa Pos, *Dibahas, Hukum Ternak Jangkrik*, 24 Nopember 1999, hal. 7.).

Keinginan sebagian peserta muktamar untuk mengubah asas NU menjadi Islam seperti pada masa kelahirannya, akhirnya tidak terpenuhi. Sidang Komisi I

(Organisasi) memutuskan, NU tetap berasaskan Pancasila sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984. Hanya, di dalam AD/ART NU tidak disebutkan Pancasila, melainkan berisi rincian 5 (lima) sila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut pemimpin Sidang Komisi I Hafidz Ustman, sikap kami mempertahankan asas Pancasila demi menjaga keutuhan negara kesatuan. Dan, ini merupakan bukti konsistensi negara Indonesia sebagai wadah berhimpun yang sah bagi bangsa Indonesia.

Ditambahkan, perbaikan redaksional Bab III Pasal 4 AD/ART NU dengan merinci semua sila itu untuk menjaga sikap hidup bernegara sesuai dengan naskah asli pendeklarasian negara Indonesia. Sebelumnya, pembahasan soal perubahan asas itu sempat menjadi perdebatan sengit.

Agar tidak berlarut-larut, akhirnya sidang memutuskan untuk *dipending*. Namun, begitu seluruh materi yang dibahas dalam komisi ini selesai, pembahasan soal asas dilanjutkan lagi. Setelah melalui beberapa argumentasi yang cukup alot, akhirnya disepakati bahwa asas itu secara substansial tidak diubah.

Menurut Hafidz Ustman, salah satu pemikiran tetap dipertahankannya Pancasila sebagai asas NU karena Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Selain itu, secara eksplisit ciri khas NU sebagai organisasi Islam sudah terakomodasi pada Bab II Pasal 3 tentang Aqidah NU. “NU sebagai *jam'iyah diniyah Islamiyah* beraqidah Islam menurut paham *ahlussunnah wal jamaah* dan menganut salah satu dari empat mazhab.

Keputusan lain yang dihasilkan komisi ini, membatasi masa jabatan *rais aam*, wakil *rais aam*, dan ketua umum PBNU. Komisi ini memutuskan, masa jabatan itu maksimal dua kali berturut-turut. Jadi, menurut Hafidz Ustman, jabatan *rais aam*, wakil *rais aam*, dan ketua umum PBNU hanya dapat dipilih dalam jabatan yang sama dua kali berturut-turut. Pembatasan itu merupakan upaya NU untuk mengantisipasi tuntutan masa mendatang yang menghendaki proses regenerasi dalam organisasi. (Jawa Pos, *NU Tetap Pertahankan Pancasila*, 25 Nopember 1999, hal.1.).

Ditempat terpisah tim perumusan komisi rekomendasi juga mengambil keputusan bahwa khittah NU '26 adalah keputusan yang final. Warga NU tetap diberi kebebasan berpolitik. Dan, NU tidak menjadi partai politik. Meskipun begitu, NU juga memberikan catatan bahwa terpencarnya aspirasi warga NU di beberapa partai politik telah menimbulkan perpecahan dan perumusan di internal warga NU. sementara itu, terkonsentrasinya aspirasi warga NU terbukti telah mendatangkan manfaat.

Berdasarkan *illat* (alasan) tersebut, tim perumus komisi rekomendasi melihat penyaluran aspirasi warga NU kepada partai politik yang lahirnya difasilitasi PBNU dapat terus dikembangkan. Dalam hal itu, tim perumus tidak menyebutkan nama PKB secara langsung.

Yang jelas, tim rekomendasi menilai, keberadaan NU setelah kembali ke khittah 1926 telah sejalan dengan harkat dan martabatnya ditengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Karena itu, NU tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai ormas keagamaan.

Ditempat terpisah, komisi Bahtsul Masail Al-Maudhu'iyah kemarin juga berhasil memutuskan beberapa hal penting, antara lain masalah demokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil, ahlussunnah wal jama'ah dan perkembangan sosial budaya, Islam dan kesetaraan gender, pemulihan perekonomian nasional berorientasi pada kepentingan rakyat, serta syariat Islam tentang status uang negara.

Dalam hal status uang negara, NU memutuskan bahwa uang adalah amanat Allah SWT., untuk kemaslahatan umum dan pemberdayaan kelompok lemah serta keadilan. Dalam hal ini, pemerintah berarti telah mendapat amanat rakyat. Karena itu, pemerintah maupun parlemen (DPR/DPRD) wajib mengacukan penggunaan uang negara dalam APBD/APBN bagi kepentingan kaum fakir, miskin, panitia zakat (*amilin*), orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), budak, orang terbelit hutang (*gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang bepergian (*ibnu sabil*).

Terkait dengan itu, seluruh rakyat langsung maupun tidak langsung, wajib melakukan kontrol atas penggunaan uang negara dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. (Jawa Pos, *Warga NU bebas berpolitik*, 25 Nopember 1999, hal.7.).

Disamping itu, keberadaan dan sepak terjang Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendapat perhatian serius dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim. Salah satu rekomendasi terpenting yang dihasilkan dalam muktamar kali ini, adalah perlunya meninjau kembali keberadaan MUI, kalau perlu dihapus saja.

Menurut sekretaris komisi rekomendasi Kiai Mufid A. Khusairi, sepak terjang MUI selama ini dianggap sering melangkahi ormas-ormas Islam yang ada. Padahal,

secara formal MUI bukan ormas Islam, tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh ormas Islam.

Menurut Mufid A. Khusairi, dengan diambilnya peranan ormas Islam oleh MUI, seperti penetapan Halal-Haram, fatwa terhadap berbagai persoalan keagamaan dan sosial, mempersempit gerak langkah ormas Islam lain yang benar-benar memiliki umat secara riil.

Khusus masalah labelisasi halal, NU menilai MUI selama ini telah menjadikan program labelisasi halal haram ini sebagai ajang bisnis. Sehingga, akurasi kehalalannya sering masih dipertanyakan masyarakat. Menurut Khusairi, kalau label halal dari MUI sudah dibisniskan, akhirnya kepentingannya ke uang, bukan kehalalan menurut agama.

Selain itu, MUI juga melakukan tindakan-tindakan politis yang mengatasnamakan umat Islam demi kepentingan sesaat dan membela pemerintah. Akibatnya, fatwa yang diberikan berdasarkan kepentingan politik dan tidak sepenuhnya berdasarkan agama. Ini semua, merugikan umat Islam dan ormas Islam.

Dari realitas MUI yang demikian, NU mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan MUI, sebab masyarakat Islam secara umum sudah tidak percaya MUI dan merugikan ormas Islam. Jika perlu, MUI sebaiknya dibubarkan saja, sebab tidak mempunyai umat dan hanya papan nama.

Berbagai peran yang selama ini dilakukan MUI, diberikan kembali ke ormas Islam atau diserahkan ke Depag. Dengan demikian. Segalanya akan lebih jelas dan tidak tumpang tindih. (Radar Kediri, *Hasil Muktamar, MUI Ditinjau Kembali*, 25 Nopember 1999, hal.1).

4.4. *Problem Solving* NU Terhadap Bangsa

Muktamar NU ke-30 di Lirboyo-Kediri-Jatim menghasilkan beberapa keputusan penting. Diantaranya, dalam komisi rekomendasi (*taushiyah*) yang telah diplenokan, beberapa persoalan pelik, seperti kasus Aceh, pengadilan mantan Presiden Soeharto, dwifungsi TNI/Polri, pelanggaran HAM, otonomi daerah, hingga masalah politik, banyak disorot.

Soal Aceh, misalnya, Muktamar NU ke-30 menghargai tuntutan rakyat Aceh untuk melakukan referendum. Soal referendum itu sendiri, muktamar sama sekali tidak menawarkan Opsi. Namun *muktamirin* dengan tegas menghendaki Aceh tetap menjadi bagian dari wilayah NKRI.

Jika wilayah Aceh memperoleh keistimewaan, wilayah yang lain harus diberi peluang yang sama untuk menyatakan keistimewaannya. Namun, menurut Kemas Madani (pemimpin sidang komisi rekomendasi), untuk Aceh saat ini keistimewaan itu harus dipandang sebagai cara pemerintah pusat menebus dosa-dosanya kepada Aceh di masa-masa lalu.

Untuk itu, Muktamar NU ke-30 mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah konkret dan cepat sehingga gejala disintegrasi tidak terus menjalar ke daerah lain. *Muktamirin* meminta agar pemecahan terhadap permasalahan itu bisa dilakukan dengan cara dialogis, demokratis, dan adil. Terutama soal distribusi kekayaan antara pusat dan daerah yang selama ini berjalan tidak adil dan tersentral.

Langkah konkret itu bisa berupa mempercepat realisasi pelaksanaan UU Nomor 22/99 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 25/99 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat-Daerah. Masalah ini banyak menjadi sorotan sekaligus yang dikehendaki oleh rakyat Riau dan Irian Jaya.

Menurut Kemas Madani (pemimpin sidang komisi rekomendasi) mengenai pemekaran propinsi Irian Jaya menjadi 3 wilayah, Muktamar NU ke-30 dapat menerima rencana itu. Namun, pelaksanaannya perlu ditangguhkan sampai situasi dan kondisi setempat memungkinkan. (*Jawa Pos, NU Minta Soeharto Diadili, 26 Nopember 1999, hal.1.*).

Selain itu, menyadari rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sejak akhir masa Orde Baru hingga sekarang, pemerintah harus memiliki ketegasan dan kejelasan dalam pembagian tugas. Terutama soal wewenang dan tanggung jawab antar unsur negara, seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan citra dan wibawa pemerintah.

Dalam masalah hukum, komisi rekomendasi meminta pemerintah baru hasil Pemilu 1999 tetap konsekuen menjunjung tinggi supremasi hukum. Khususnya dalam menangani pengadilan mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya yang diduga terlibat kejahatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Hal itu, menurut Kemas Madani (pemimpin sidang komisi rekomendasi), kami nilai sangat penting untuk membersihkan citra pemerintah. Juga demi tetap berlangsungnya rasa keadilan di bumi tercinta ini. Selain itu, *muktamirin* merekomendasi PBNU agar mendesak pemerintah untuk menghapus dwifungsi TNI/Polri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kami minta agar pemerintah mengembalikan fungsi TNI dan Polri sebagai pelaksana dan penjaga keamanan negara terhadap serangan dari luar.

Hasil rekomendasi lain yang ditujukan kepada pemerintah adalah minta beberapa undang-undang yang tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hukum dan rasa keadilan ditinjau ulang. Sebab, hal itu bisa memicu pertentangan di masyarakat. Misalnya, UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).

Dalam masalah HAM, Muktamar NU ke-30 meminta pemerintah terus meneliti dan menemukan pelaku tindak pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, Aceh sebelum dan sesudah DOM, kasus santet Banyuwangi, kerusuhan Maluku, Sambas, Irian Jaya, maupun pembunuhan terhadap buruh (kasus Marsinah) dan wartawan (kasus Udin di Jogjakarta). *Muktamirin* meminta agar masalah itu diproses di pengadilan dengan cara yang benar-benar adil.

Komisi ini juga meminta pemerintah agar segera membebaskan seluruh tahanan politik dan membebaskan mereka yang terpidana. Apalagi penahanan itu hanya disebabkan mereka berbeda pendapat dengan pemerintah. Padahal, itu sangat bertentangan dengan HAM, kecuali terpidana PKI yang telah melalui pengadilan.

Dalam bidang politik, komisi ini merekomendasikan perlunya “komisi politik”, di kepengurusan NU dari tingkat pusat hingga daerah. Komisi ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi politik Warga NU (*nahdliyin*), khususnya menjelang menghadapi pelaksanaan pemilu. Adanya “komisi politik” ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian khittah NU 1926 dan dapat mengeluarkan fatwa politik dalam situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Sehingga, kebesaran Warga NU (*nahdliyin*) dapat terkonsentrasikan dalam satu kekuatan.

Dalam rekomendasi bidang politik ini, muktamar juga menganjurkan Warga NU (*nahdliyin*) untuk menggunakan hak politiknya secara bebas sesuai dengan kultur kritis dan rasional. Namun, harus tetap mengacu kepada khittah NU 1926 dan 9 (sembilan) Pedoman Berpolitik Warga NU yang diputuskan dalam muktamar NU ke-28 di Jogjakarta. Selain itu, juga tetap mempertimbangkan hubungan historis NU dengan partai yang ada.

Namun, kepada seluruh pengurus NU dari tingkat ranting hingga pengurus besar, mereka menyerukan agar tetap menempatkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan bukan organisasi politik. Karena itu, NU harus selalu bersifat kritis terhadap partai manapun dan mengontrol partai yang dianggap sebagai penyalur aspirasi politik warganya. Untuk kepentingan tersebut, perlu ada komisi politik dalam organisasi NU. (Jawa Pos, *Bebas Salurkan Hak Politik*, 26 Nopember 1999, hal.7.).